



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN KELAYAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGOLAHAN
DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DI KANTOR PENGOLAHAN
DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASAR**

TESIS

RORY ANDHARTA

NPM 0706306270

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
Juli 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN KELAYAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGOLAHAN
DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DI KANTOR PENGOLAHAN
DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASAR**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

RORY ANDHARTA

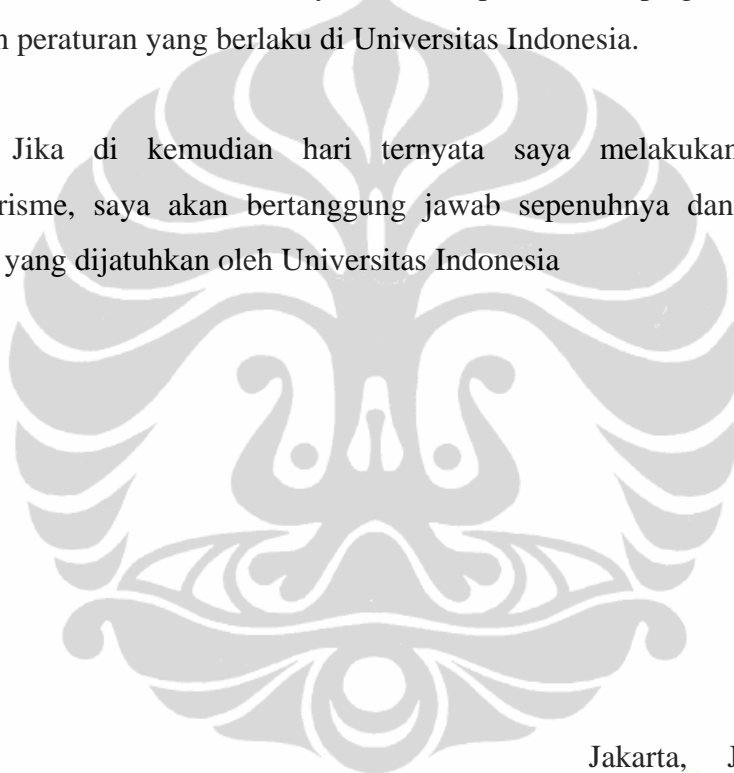
NPM 0706306270

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
Juli 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia



Jakarta, Juni 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rory Andharta', is written over the watermark.

(Rory Andharta)

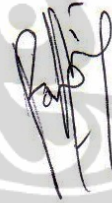
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Rory Andharta

NPM : 0706306270

Tanda Tangan :



Tanggal : Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Rory Andharta
NPM : 0706306270
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Kajian Kelayakan Pengembangan Sistem
pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di Kantor Pengolahan Data dan
Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makasar

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan Untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Iman Rozani, SE.,M.Sc. (.....)

Penguji : Dr.Andi Fahmi Lubis (.....)

Penguji : R. H Achmadi, SE., M.Sc (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Efektivitas Biaya Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makasar” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Magister pada Program Studi Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Masalah yang dibahas dalam tesis ini, ialah mengenai suatu studi kelayakan proyek, dengan mengambil kasus tentang rencana pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar. Dalam hal ini, materi tesis diperoleh langsung dari Pusat Pengolahan data dan Dokumen Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, serta bahan-bahan kepustakaan. Karena dalam penyusunan tesis ini penulis sepenuhnya menyadari masih terdapat kekurangan di sana-sini, maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati bersedia menerima saran-saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Terlepas dari itu semua maka sebagai upaya Untuk penyelesaian tesis ini banyak dimungkinkan oleh adanya bimbingan dan dorongan serta pertolongan dari mereka yang dengan rela memberikannya. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus, terutama kepada Bapak Iman Rozani, S.E, MSc, selaku pembimbing yang telah memberikan pengararahan, petunjuk, rasa hormat, serta dorongan yang sangat berharga.

Disamping itu tak lupa ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada beberapa pihak :

- Papa dan Mama yang selalu memberikan doa, dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
- Istriku tercinta Suci Rahmadhani, putriku tersayang Nasya Nayyara Hideaki Andharta, dan putraku tersayang Farras Zerach Shakir Andharta

yang telah memberiku semangat, inspirasi, materil, dan spiritual dalam menyelesaikan program S2 ini.

- Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen perpajakan yang telah memberikan izin, informasi, data, kesempatan dan fasilitas Untuk mengadakan penelitian di wilayah pengembangan KPDDP Makasar.
- Bapak Kismantoro Petrus yang telah memberikan motivasi sehingga tesis ini bisa selesai.
- Bapak Rizaldi K.Ridwan selaku Kepala bidang Pemindaian Dokumen dan Perekaman Data yang telah memberikan dorongan agar tesis dapat diselesaikan dengan baik.
- Bapak Bahar, Pak Denon, Mas Nugroho Agung Susanto, Mas Lukman Hakim, yang selalu memberikan support dalam penyelesaian tesis ini.
- Teman-teman di Seksi Pemindaian Dokumen, Bapak Sugeng dan Bapak Wahyu Pratomo yang telah sering memabntu dalam memberi dukungan agar tesis ini segera selesai.
- Dan juga kepada mas Triman, mas Harris beserta seluruh staf MPKP-FEUI yang tak jemu-jemunya memberikan dorongan semangat sampai terselesainya tesis ini.

Begitu pula terima kasih yang tak terhingga, penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu mertua, kakak Ria, serta Adik-adikku (Yoga Pranata, Neidya Karla, Miko Wiranata, dan Adie Wiranata, Apriani R.Gaban, Wahyuni R.Gaban, Wulan R.Gaban) yang telah turut membantu do'a, memberikan dukungan serta dorongan kepada penulis Untuk menyelesaikan tesis ini. Amien.

Jakarta, Juni 2011

Penulis



(Rory Andharta)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rory Andharta

NPM : 0706306270

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Departemen : Ilmu Ekonomi Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui Untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

”Kajian Kelayakan Pengembangan Sistem pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makasar”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Rory Andharta)

ABSTRAK

Nama : Rory Andharta

Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Judul : Kajian Kelayakan Pengembangan Sistem pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makasar

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak yang berdasarkan *self assessment system*, data dan dokumen perpajakan menjadi sangat penting karena data ini digunakan Untuk menguji kebenaran, kelengkapan dan kejelasan kewajiban perpajakan para wajib pajak (WP). Ketidakbenaran, ketidaklengkapan dan ketidakjelasan data/dokumen akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak efisien dan efektif.

Setelah setengah dekade reformasi jilid I itu berjalan, sejumlah kelemahan/kendala masih dirasakan oleh Ditjen Pajak. Kelemahan/kendala disebabkan karena administrasi perpajakan yang belum sempurna, selain itu belum tersedianya sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan yang handal.

Untuk mendukung penyempurnaan lanjutan administrasi perpajakan tersebut, pada awal tahun 2007 mulai dilakukan pembangunan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Fungsi dari PPDDP adalah Untuk mengumpulkan, menerima, memproses, merekam, dan menyimpan dokumen fisik SPT yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Oleh karena ini tujuan utama dari penelitian (tesis) ini adalah : Untuk mengkaji efektivitas biaya pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar secara analisis finansial (keuangan). Ada beberapa model yang diusulkan dalam pengembangan tersebut, yaitu: *Centralized scan and capture, Federated scan and centralized capture, distributed scan and centralized capture, dan distributed scan and federated capture.*

Kata kunci : administrasi pajak, manual perekaman, kajian kelayakan proyek, model sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan, rugi laba, arus kas.

ABSTRACT

Name : Rory Andharta
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : Feasibility Study System Development Data Processing and
and
Document Taxation at Data Processing and Document
Taxation
Office (KPDDP) Makasar

To improve the effectiveness and efficiency of the tax revenue based on the self assessment system, tax documents and data becomes very important because this data is used to test the correctness, completeness and clarity of the taxpayer's tax liability (WP). Untruth, incompleteness and vagueness of data / document will cause tax receipts to be inefficient and ineffective.

After half a decade of reforms volume I walked, a number of weaknesses / obstacles still being felt by the Directorate General of Taxes. Weaknesses / constraints occur because of: taxation administration is not perfect, but it is the unavailability of data processing systems and tax documents that handal.

To support the continued improvement of the tax administration, in early 2007 started the construction of the Central Data Processing and Document Taxation (PPDDP). The function of PPDDP is to collect, receive, process, record, and store physical documents SPT from the Tax Office (LTO).

Therefore the main purpose of this study (thesis) are: to assess the cost effectiveness of data processing and tax documents systems development in KPDDP Napier in financial analysis. There are several models proposed in the development: Centralized scanning and capture, Federated scan and centralized capture, distributed capture scanning and centralized, federated and distributed scanning and capture.

Keyword : tax administration, manual recording, research feasible project, model of data processing systems and tax documents, profit / loss, cash flow.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Ruang Lingkup	6
1.5. Metode Penelitian	6
1.6. Manfaat Penelitian	6
1.7. Kerangka Pemikiran.....	8
1.8. Sistem Penulisan	9
2. SISTEM PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	10
2.1. Pengertian Sistem	10
2.2. Arti dan Pentingnya Sistem Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Dalam Pengumpulan Penerimaan Pajak	12
2.3. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak	13
2.4. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	16
2.5. Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan di Kantor Pengolahan	

Data dan Dokumen Perpajakan Makasar	17
2.5.1. Kondisi Saat Ini	19
2.5.2. Rencana Pengembangan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	25
1. <i>Centralized Scan and Capture Model</i>	28
2. Federated Scan and Centralized Capture Model	33
3. Distributed Scan and Centralized Capture Model	37
4. Distributed Scan and Federated Capture Model	39
3. METODE EFEKTIVITAS BIAYA BAGI DASAR PENENTUAN KELAYAKAN PROYEK/PROGRAM	41
3.1. Pentingnya Kelayakan Bagi Proyek/Program Pemerintah	41
3.2. Beberapa Metode Kajian Kelayakan Proyek/Program.....	41
3.3. Alasan Penggunaan Metode Efektivitas Biaya Pada Kajian Kelayakan Proyek Proyek/Program Pemerintah	42
3.3.1. Faktor-faktor Yang harus Diperhatikan Penggunaan Analisa Finansial dan Analisa Ekonomi	45
3.3.1.1. Harga	45
3.3.1.2. Bunga (Interest)	48
3.3.1.3. Pajak (Tax)	48
3.3.1.4. Subsidi	48
3.3.1.5. Trade dan Non Trade Good	49
3.4. Penggunaan Metode Efektivitas Biaya Pada Proyek/Program Pengembangan Administrasi Perpajakan Yang Memanfaatkan elektronik (e-Taxation) ...	49
3.4.1 Pengertian Efektivitas	51
3.4.2. Pengertian Biaya	54
3.4.3. Pengertian Cost Effectiveness Analysis	54
3.4.4. Dasar-Dasar Dalam Efektivitas Biaya Pengembangan Sistem Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di KPDDP Makasar	56

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	57
4.1. Aspek Teknis	57
4.1.1. Spesifikasi Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi	57
4.1.2. Spesifikasi Jasa Pengambilan/Pengiriman Kemasan SPT	60
4.1.3. Spesifikasi Jasa Pengolahan Data dan Dokumen	61
4.2. Aspek Data Wajib Pajak	62
4.2.1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	62
4.2.2. Jumlah Wajib Pajak Masa PPN Terdaftar	63
4.2.3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Masa PPN yang Menyampaikan SPT dan Estimasi Jumlah Lembar SPT	63
4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa	65
4.4. Analisa Manfaat dan Biaya	65
4.4.1. Analisa Finansial (Keuangan)	65
4.4.1.1. <i>Centralized Scan and Capture Model</i>	65
4.4.1.1.1. Biaya Proyek	66
4.4.1.1.2. Rencana Pembiayaan	69
4.4.1.1.3. Pendapatan	69
4.4.1.1.4. Biaya Operasional KPDDP Makasar.....	70
4.4.1.1.4.1. Biaya Langsung	70
4.4.1.1.4.1.a. Biaya Tetap	70
4.4.1.1.4.1.b. Biaya Variabel	72
4.4.1.1.5. Bunga	72
4.4.1.1.6. Pajak	73
4.4.1.1.7. Kerangka Analisa	73
4.4.2.1. Federated Scan and Centralized Capture Model	73
4.4.2.1.1. Biaya Proyek	74
4.4.2.1.2. Rencana Pembiayaan	76
4.4.2.1.3. Pendapatan	76
4.4.2.1.4. Biaya Operasional KPDDP Makasar.....	78
4.4.2.1.4.1. Biaya Langsung	78
4.4.2.1.4.1.a. Biaya Tetap	78
4.4.2.1.4.1.b. Biaya Variabel	79

4.4.2.1.5. Bunga	80
4.4.2.1.6. Pajak	80
4.4.2.1.7. Kerangka Analisa	81
4.4.3.1. Distributed Scan and Centralized Capture Model	81
4.4.3.1.1. Biaya Proyek	81
4.4.3.1.2. Rencana Pembiayaan	84
4.4.3.1.3. Pendapatan	84
4.4.3.1.4. Biaya Operasional KPDDP Makasar.....	85
4.4.3.1.4.1. Biaya Langsung	85
4.4.3.1.4.1.a. Biaya Tetap	85
4.4.3.1.4.1.b. Biaya Variabel	87
4.4.3.1.5. Bunga	88
4.4.3.1.6. Pajak	88
4.4.3.1.7. Kerangka Analisa	88
4.4.4.1. Distributed Scan and Federated Capture Model	89
4.4.4.1.1. Biaya Proyek	89
4.4.4.1.2. Rencana Pembiayaan	92
4.4.4.1.3. Pendapatan	92
4.4.4.1.4. Biaya Operasional KPDDP Makasar.....	93
4.4.4.1.4.1. Biaya Langsung	93
4.4.4.1.4.1.a. Biaya Tetap	93
4.4.4.1.4.1.b. Biaya Variabel	94
4.4.4.1.5. Bunga	95
4.4.4.1.6. Pajak	95
4.4.4.1.7. Kerangka Analisa	95
4.5. Perbandingan Hasil Evaluasi Kelayakan Proyek Antar Model ...	96
4.5.1. Biaya Proyek	96
4.5.2. Rencana Pembiayaan	97
4.5.3. Pendapatan	97
4.5.4. Biaya Operasional KPDDP Makasar.....	98
4.5.4.1. Biaya Langsung	98
4.5.4.1.a. Biaya Tetap	98

4.5.4.1.b. Biaya Variabel	100
4.5.4.2. Bunga	102
4.5.4.3. Pajak	102
4.5.4.4. Kerangka Analisa	102
5. KESIMPULAN DAN SARAN	104
5.1. Kesimpulan	104
5.2. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR SINGKATAN.....	109
DAFTAR LAMPIRAN	110



DAFTAR TABEL

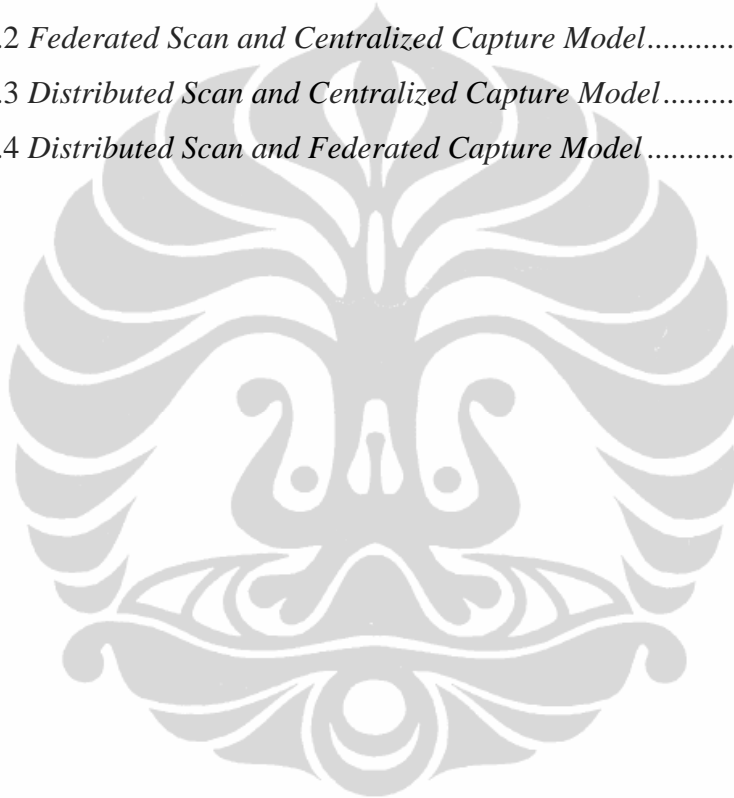
Tabel 1.1. Realisasi penerimaan dalam negeri Tahun 2001-2009 (Dalam Triliunan Rupiah).....	2
Tabel 2.1. KPP yang telah masuk dalam implementasi PPDDP.....	20
Tabel 2.2. Pencapaian Pengolahan data dan dokumen perpajakan.....	20
Tabel 2.3. Rencana Model Pengembangan KPPDDP Makasar.....	27
Tabel 3.1. Perbandingan Analisa Finansial vs Analisa Ekonomi	45
Tabel 3.2. Nilai kurs pajak	47
Tabel 3.3. Operational costs tenaga kerj	48
Tabel 4.1. Recana Kebutuhan Perangkat TIK.....	58
Tabel 4.2. Rencana Jasa Pengambilan/Pengiriman Kemasan SPT	61
Tabel 4.3. Rencana Jasa Pengolahan Data dan Dokumen	62
Tabel 4.4. Jumlah Wajib pajak SPT Orang Pribadi yang terdaftar	63
Tabel 4.5. Jumlah Wajib pajak SPT Masa PPN yang terdaftar	63
Tabel 4.6. Jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan OP dan Masa PPN dan estimasi jumlah lembar SPT	64
Tabel 4.7. Jumlah lembar Untuk SPT PPh OP	65
Tabel 4.8. Jumlah lembar Untuk SPT Masa PPN	65
Tabel 4.9. Perkiraan biaya perangkat TIK	66
Tabel 4.10. Perkiraan Biaya Pegawai outsource.....	70
Tabel 4.11. Perkiraan Biaya Perangkat TIK	74
Tabel 4.12. Perkiraan biaya Pegawai outsource.....	78
Tabel 4.13. Perkiraan biaya Perangkat TIK.....	82
Tabel 4.14. Perkiraan biaya Pegawai outsource.....	86
Tabel 4.15. Perkiraan biaya Perangkat TIK.....	89
Tabel 4.16. Perkiraan biaya Pegawai outsource.....	93
Tabel 4.17. Perbandingan biaya proyek.....	96
Tabel 4.18. Perbandingan perangkat TIK	98
Tabel 4.19. Perbandingan pegawai outsource.....	99
Tabel 4.20. Perbandingan biaya depresiasi	99
Tabel 4.21. Perbandingan Biaya Pengambilan/ Pengiriman Kemasan SPT	100

Tabel 4.22. Perbandingan Biaya Repairs, Maintanance	101
Tabel 4.23. Rekapitulasi Biaya Kemasan / Box SPT.....	101
Tabel 4.24. Perbandingan Laba Rugi.....	102
Tabel 4.25. Perbandingan Arus Kas.....	103



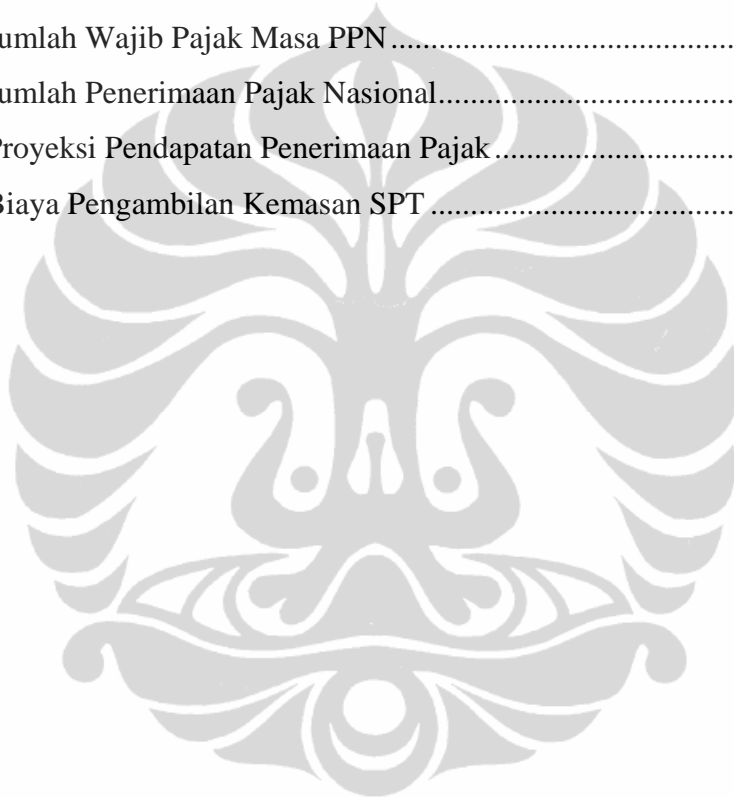
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.7 Kerangka Pemikiran.....	8
Gambar 2.3. Struktur Organisasi DJP	15
Gambar 2.5. Wilayah Kerja Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	17
Gambar 2.5.1.1 Peta wilayah kerja pengolahan data dan dokumen perpajakan	21
Gambar 2.5.2.1 <i>Centralized Scan and Capture Model</i>	28
Gambar 2.5.2.2 <i>Federated Scan and Centralized Capture Model</i>	33
Gambar 2.5.2.3 <i>Distributed Scan and Centralized Capture Model</i>	37
Gambar 2.5.2.4 <i>Distributed Scan and Federated Capture Model</i>	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Analisa Finansial Centralized scan and capture	110
Lampiran 2 Analisa Finansial Federated Scan & Centralized Captue	111
Lampiran 3 Analisa Finansial Distributed Scan & Centralized Captu	112
Lampiran 4 Analisa Finansial Distributed Scan & Federated Captue	113
Lampiran 5 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	114
Lampiran 6 Jumlah Wajib Pajak Masa PPN	115
Lampiran 7 Jumlah Penerimaan Pajak Nasional.....	116
Lampiran 8 Proyeksi Pendapatan Penerimaan Pajak	117
Lampiran 9 Biaya Pengambilan Kemasan SPT	118



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak yang berdasarkan *self assessment system*, data dan dokumen perpajakan menjadi sangat penting karena data ini digunakan untuk menguji kebenaran, kelengkapan dan kejelasan kewajiban perpajakan para wajib pajak (WP). Ketidakbenaran, ketidaklengkapan dan ketidakjelasan data/dokumen akan menyebabkan penerimaan pajak menjadi tidak efisien dan efektif.

Setelah reformasi perpajakan pertama kali di tahun 1983, masyarakat mulai menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai salah satu kewajiban dalam mengurus besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Sebelumnya para wajib pajak menyampaikan SPT melalui cara *official assessment* yaitu dimana penyampaian SPT dan penetapan pajaknya disampaikan oleh perusahaan/organisasi dimana wajib pajak bekerja.

Pada tahun 2002, karena pertimbangan diatas, maka pada tahun 2002 mulai dilakukan modernisasi terhadap administrasi perpajakan. Modernisasi ini kerap disebut dengan "Reformasi jilid I". Modernisasi/reformasi ini ditujukan untuk: meningkatkan penerimaan negara, penambahan jumlah wajib pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP). Hasilnya adalah peningkatan penerimaan pajak menjadi semakin prioritas, jumlah wajib pajak semakin bertambah, dan tingkat kepatuhan WP semakin baik.

Peran pajak bagi penerimaan negara dirasakan sangat penting. Ini mengingat penerimaan pajak akan digunakan untuk pembangunan Negara. Karena pentingnya-peran pajak maka tidak heran bila target Pajak selalu meningkat. Pada APBN-P 2010 direncanakan penerimaan pajak mencapai sekitar Rp 770,- triliun, artinya sekitar 73,91% penerimaan Negara disumbang dari pajak. Dari Rp 770,- trilliun itu, Rp 600 triliun atau Rp 50 triliun perbulan akan dihimpun langsung oleh Ditjen Pajak.¹

Data tentang realisasi penerimaan dalam negeri dari tahun 2001-2009 adalah seperti terlihat di tabel 1.1

¹ Ekonomi, Halaman 13, 18 maret 2010; Media Indonesia

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri tahun 2001-2009 (Dalam Triliunan Rupiah)²

Uraian	Laporan Keuangan Penerimaan Pemerintah				DJPB (Unaudited)
	2001	2002	2005	2008	2009
Penerimaan Perpajakan	185.54	210.09	347.03	658.70	641.38
a. Pajak Dalam Negeri	175.97	199.51	331.79	622.36	622.71
b. Pajak Perdagangan Internasional	9.57	10.58	15.24	36.34	18.67
c. Lain-lain	-	-	-	-	-
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP	115.06	88.44	146.89	320.60	226.45
a. Penerimaan SDA	85.67	64.76	110.47	224.46	137.91
B. Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN	8.84	9.76	12.84	29.09	26.05
c. PNBP lainnya	20.55	13.92	23.59	63.32	54.77
d. Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU)	-	-	-	3.64	7.71
e. Lain-lain	-	-	-	0.09	-
Peranan Penerimaan Dalam Negeri	300.60	298.53	493.92	979.31	867.83
Peranan Penerimaan Perpajakan (I:III)	61.72%	70.37%	70.26%	67.26%	73.91%
Peranan PNBP (II:III)	38.28%	29.63%	29.74%	32.74%	26.09%

Sumber : Data Pokok APBN, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB)

Pada tabel 1.1. diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak berhasil menghimpun penerimaan negara di sektor pajak sebesar 175,97 triliun rupaiah atau 61,72% dari total kontribusi penerimaan negara. Pada tahun 2005, Direktorat Jenderal Pajak berhasil menghimpun penerimaan negara disektor pajak sebesar 331,79 triliun rupaiah atau 70,26% dari total kontribusi penerimaan negara. Serta pada tahun 2009, Direktorat Jenderal Pajak berhasil menghimpun penerimaan negara di sektor pajak sebesar 622,71 triliun rupaiah atau 73,91% dari total kontribusi penerimaan negara

Sejalan dengan semangat reformasi jilid I diatas, yaitu bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, penambahan jumlah wajib pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka keberadaan administrasi perpajakan yang handal yang akan mendukung semangat tadi tentu sangat diperlukan. Sebab, tanpa kehandalan administrasi

² Buku saku pajak dalam angka tahun 2001-2009, Kementerian Keuangan RI; Direktorat Jenderal Pajak; Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan

tersebut niscaya proses penerimaan pajak, registrasi jumlah wajib pajak dan kepatuhan pembayaran pajak tidak dapat diketahui secara jelas dan terperinci, yang dapat menghambat proses reformasi jilid I tersebut.

Administrasi perpajakan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang mencakup semua kegiatan untuk menjamin pengurusan pajak menjadi baik. Pengurusan tersebut antara lain mencakup: Pendaftaran oleh wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak, penagihan utang pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, menyelesaikan sengketa dengan Wajib Pajak bila terjadi perbedaan perhitungan perpajakan. Kesemua pengurusan ini sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan menghapus utang pajak, sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan (Mansury,2002).

Setelah setengah dekade reformasi jilid I itu berjalan, sejumlah kelemahan/kendala masih dirasakan oleh Ditjen Pajak³. Kelemahan/kendala tersebut antara lain: adalah perekaman data mencapai 87% dari SPT yang masuk tetapi baru 25% isi SPT yang direkam. Perekaman data selalu terlambat atau rata-rata lebih dari 1 bulan. Akurasi perekaman SPT masih diragukan karena belum berjalan pengendalian kualitas perekaman. Kemungkinan intervensi perekaman SPT untuk kepentingan tertentu cukup besar. Fisik dokumen tersebar disetiap seksi di KPP sehingga sangat mudah tercecer atau hilang. Baru 25% WP yang mendaftarkan yang mengirimkan SPT ke KPP. Menurut Kendala tersebut terjadi karena: administrasi perpajakan yang belum sempurna, selain itu belum tersedianya sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan yang handal⁴.

Bertolak dari kelemahan/kendala diatas, maka Ditjen Pajak merasakan perlunya penyempurnaan lebih lanjut terhadap administrasi perpajakan. Penyempurnaan khususnya dilakukan pada cara pelaporan SPT manual dengan cara mendigitalkan dokumen kedalam komputer. Penyempurnaan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2008.

Untuk mendukung penyempurnaan lanjutan administrasi perpajakan tersebut, pada awal tahun 2007 mulai dilakukan pembangunan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP). Fungsi dari PPDDP adalah untuk mengumpulkan, menerima, memproses, merekam, dan menyimpan dokumen fisik SPT yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). PPDDP dibangun menggunakan teknologi *document*

³ Naskah akademis pembangunan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

⁴ Naskah Akademis Pembangunan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

imaging/digitalisasi dokumen yang berbasiskan pada teknologi komunikasi dan informasi. Dengan teknologi document imaging atau digitalisasi dokumen ini diharapkan data/informasi yang diterima dan terkumpul di Ditjen Pajak tidak lagi berbentuk berkas-berkas berupa kertas melainkan digital *image* yang disimpan dalam komputer.

Ada beberapa alasan mengapa Ditjen Pajak memutuskan untuk mereformasi dari dokumen kertas menjadi digital. Alasan tersebut yaitu: *Accessibility, Ease of access, Enables full text search, Security, Space savings* yang menjadi kehandalan dokumen digital tersebut⁵. Dimana dokumen digital tersebut nantinya akan mudah diakses karena memiliki indexing yang baik, memungkinkan seluruh teks dicari dan ditemukan, lebih aman dan dapat menghemat waktu, serta ruangan penyimpanan fisik SPT yang lebih baik.

Proses pembangunan PPDDP selesai pada akhir tahun 2007, dan pada awal tahun 2008 PPDDP mulai beroperasi secara bertahap dalam mengumpulkan, menerima, memproses, merekam, dan menyimpan dokumen fisik SPT yang berasal dari KPP. Pada saat itu proses pengambilan dokumen fisik SPT dimulai dari beberapa KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat⁶.

Pada tahun 2008 juga agenda reformasi berlanjut ketahap berikutnya (dikenal dengan reformasi jilid II). Pada reformasi jilid II ini di agendakan, dalam rencana strategis DJP 2008-2012, antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah yang memiliki resiko penggelapan pajak yang tinggi dan potensial (seperti di DKI Jakarta, Makassar, Sumatera, dan Surabaya).
2. Meningkatkan kontrol kualitas dan integritas basis data (sejak wajib pajak mendaftarkan diri menyampaikan SPT dan melakukan pembayaran pajak hingga manajemen dokumen yang berkaitan dengan wajib pajak, termasuk dari pihak ketiga).

Menyadari akan semakin besarnya jumlah dokumen fisik SPT yang akan di proses di PPDDP, sebagai akibat dari meningkatnya kesadaran WP dalam penyampaian pajak serta potensi penerimaan pajak yang semakin meningkat, akibat dari adanya penegakan hukum yang diberlakukan kepada WP dalam penyampaian SPT, juga semakin besarnya resiko rentang kendali (*span of control*) akibat dari banyaknya dokumentasi yang akan ditangani, dan kian pentingnya keamanan penanganan dokumen fisik SPT sebagai bentuk

⁵ <http://www.aiim.org/What-Is-Document-Imaging>

⁶ Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.01/2007, tentang Organisasi dan tata kerja PPDDP

proses penyampaian SPT, maka pada pertengahan tahun 2008 Ditjen Pajak bermaksud mengembangkan unit pengolahan data dan dokumen perpajakan di daerah (jadi tidak hanya di DKI Jakarta), unit pengolahan data dan dokumen di daerah yang hendaknya dikembangkan, adalah: di Propinsi Jambi, Makassar, dan Surabaya. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi akan melayani seluruh pulau Sumatera, Makassar akan melayani Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Surabaya melayani Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan NTT.

Berdasarkan informasi internal Ditjen Pajak, dalam jangka waktu dekat pembangunan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di daerah, yang direncanakan tersebut diatas, akan direalisasikan di Makassar. Ditahun 2010 yang lalu gedung Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) ini sudah selesai dibangun.

1.2 Perumusan Masalah

Seperti telah dikemukakan di bagian latar belakang bahwa dalam jangka waktu yang tidak lama lagi Ditjen Pajak akan membuka KPDDP yang baru di Makasar. Gedung untuk keperluan Kantor tersebut telah selesai dibangun pada tahun lalu, yang tinggal adalah pelaksanaannya. Permasalahannya sejauh ini adalah tim pengembangan sistem KPDDP Makasar masih belum memutuskan design sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan yang akan digunakan. Apakah kantor tersebut nantinya akan mengikuti sistem yang ada saat ini di PPDDP (penerimaan SPT dari WP ke KPP, pengambilan SPT dari KPP ke PPDDP, pemilahan SPT di PPDDP, pemindaian/digitalisasi dokumen SPT di PPDDP, perekaman SPT di PPDDP, dan pengemasan ulang dokumen SPT di PPDDP), atau mempunyai sistem baru yang diserahkan pada tim pengembangan sistem KPDDP Makasar.

Bila hal yang terakhir yang dipilih, maka ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar yaitu dari sisi biaya pengolahan secara elektronik, biaya pengambilan/pengiriman dokumen dari KPP ke KPDDP, biaya tenaga *outsourse* pengolahan data, dan biaya kemasan/box. Pilihan yang manakah yang paling membutuhkan biaya rendah dan proses yang lebih efektif ? Pertanyaan ini belum ada jawabnya, sebab sampai kini belum ada satu pun hasil penelitian yang mengungkapkannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas biaya salah satu pendekatan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan yang akan digunakan di KPDDP Makasar berdasarkan analisis finansial (keuangan) dengan pendekatan efektivitas biaya.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada di seluruh KPP Pratama Kanwil DJP Sulawesi Utara, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, dan Kanwil DJP Papua. Disamping KPP Pratama terdapat juga KPP Madya yang berada di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Gorontalo, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, serta Kanwil DJP Papua dan Maluku. Akan tetapi untuk KPP Madya tersebut tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini adalah **analisis finansial (keuangan)** dengan **pendekatan efektivitas biaya** pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan. Untuk mendapat hasil penelitian ini mendekati keadaan yang sesungguhnya, maka penelitian ini hanya di fokuskan pada seluruh KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Gorontalo, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kanwil DJP Papua dan Maluku. Adapun jumlah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak serta penerimaan pajak pada seluruh KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, dan Kanwil DJP Papua menggunakan data tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.

1.5 Metodologi

Sedangkan metodologi penelitian yang akan digunakan adalah dengan membandingkan proses bisnis sistem pengolahan data dan dokumen SPT di KPP, proses bisnis pengolahan data dan dokumen SPT di PPDDP, serta beberapa rencana proses bisnis sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan yang akan dikembangkan (KPDDP). Dari ke empat model proses bisnis sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan yang akan diteliti, maka akan dilakukan dengan analisa finansial dengan pendekatan efektivitas biaya.

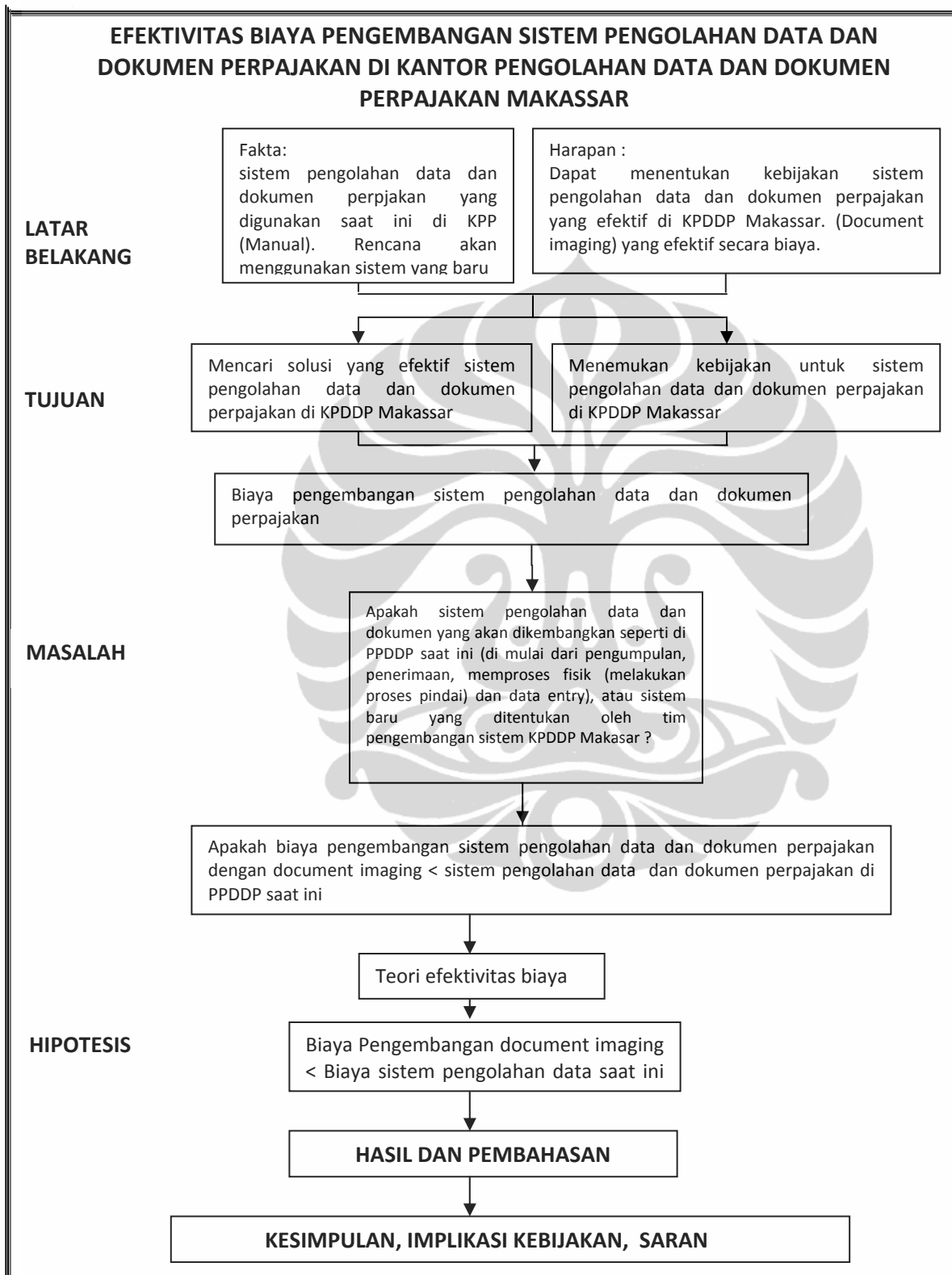
1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dalam menentukan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, studi atas penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan memberikan sumbangan kajian teoritis, khususnya yang terkait dalam menentukan pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan dilihat dari sudut pandang efektivitas biaya, serta sebagai bahan diskusi akademis yang berkaitan dengan kebijakan publik.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), di harapkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penyusunan kebijakan dalam menentukan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di daerah yang efektif dan murah.



1.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.7 Kerangka Pemikiran

1.8 Sistem Penulisan

Untuk menghasilkan kerangka tesis yang komprehensif maka diperlukan sistematika penulisan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut :

- BAB 1 : Menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, ruang lingkup dan metodologi penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab 2 : Menguraikan mengenai teori teori-teori administrasi perpajakan, administrasi perpajakan modern, teori tentang Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, teori kualitas pelayanan wajib pajak, teori tentang manajemen dokumen, tugas dan fungsi Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Teori mengenai efektivitas biaya dalam menentukan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan didaerah yang akan digunakan.
- Bab 3 : Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif (*descriptive quantitative research*) dengan menggunakan teori efektivitas biaya. Sementara itu sumber data yang akan digunakan adalah menggunakan Data Primer dan Data Sekunder.
- Bab 4 : Menguraikan tentang tahapan-tahapan mengenai gambaran umum di seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Gorontalo, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Kanwil DJP Papua dan Maluku, gambaran data dan fakta , hasil pengukuran dengan menggunakan efektivitas biaya, dan hasil analisisnya.
- Bab 5 : Merupakan penutup berisi kesimpulan, saran serta rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB 2

SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI INDONESIA

2.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. *Contoh:* Sistem Komputer terdiri dari: Software, Hardware, Brainware, dan Sistem Akuntansi. Menurut Ludwig Von Bertalanffy, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Sedangkan menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut L. ACKOFF, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.

Adapun syarat-syarat sistem sebagai berikut:

1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan.
2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan.
3. Adanya hubungan diantara elemen sistem.
4. Unsur dasar dari proses (arus informasi, energi dan material) lebih penting dari pada elemen sistem.
5. Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan elemen.

Secara garis besar, sistem dapat dibagi 2, yaitu:

a. Sistem Fisik (*Physical System*)

Kumpulan elemen-elemen / unsur-unsur yang saling berinteraksi satu sama lain secara fisik serta dapat diidentifikasi secara nyata tujuan-tujuannya.

Contoh :

- Sistem transportasi, elemen: petugas, mesin, organisasi yang menjalankan transportasi.
- Sistem Komputer, elemen: peralatan yang berfungsi bersama-sama untuk menjalankan pengolahan data.

b. Sistem Abstrak (*Abstract System*)

Sistem yang dibentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide, dan tidak dapat diidentifikasi secara nyata, tetapi dapat diuraikan elemen-elemennya.

Contoh : Sistem Teologi, hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Sistem dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Deterministik sistem*

Sistem dimana operasi-operasi (input/output) yang terjadi didalamnya dapat ditentukan/diketahui dengan pasti.

Contoh:

- Program komputer, melaksanakan secara tepat sesuai dengan rangkaian instruksinya.
- Sistem penggajian.

b. *Probabilistik sistem*

Sistem yang input dan prosesnya dapat didefinisikan, tetapi output yang dihasilkan tidak dapat ditentukan dengan pasti; (selalu ada sedikit kesalahan/penyimpangan terhadap ramalan jalannya sistem).

Contoh:

- Sistem penilaian ujian
- Sistem pemasaran.

Dalam sistem juga memiliki dua metode, yaitu:

1. *Blackbox Approach* yaitu: suatu sistem dimana input dan outputnya dapat didefinisikan tetapi prosesnya tidak diketahui atau tidak terdefinisi. Metode ini hanya dapat dimengerti oleh pihak dalam (yang menangani) sedangkan pihak luar hanya mengetahui masukan dan hasilnya. Sistem ini terdapat pada subsistem tingkat terendah. *Contoh*: Bagian pencetakan uang, proses pencernaan.
2. *Analitic System* yaitu: suatu metode yang mencoba untuk melihat hubungan seluruh masalah untuk menyelidiki kesistematian tujuan dari sistem yang tidak efektif dan evaluasi pilihan dalam bentuk ketidak efektifan dan biaya. Dalam metode ini beberapa langkah diberikan seperti di bawah ini :
 - a. menentukan identitas dari sistem.
 - sistem apa yang diterapkan.
 - batasannya.
 - apa yang dilaksanakan sistem tersebut.

- b. menentukan tujuan dari sistem.
 - output yang dihasilkan dari isi sistem.
 - fungsi dan tujuan yang diminta untuk mencoba menanggulangi lingkungan.
- c. bagian-bagian apa saja yg terdapat dalam sistem dan apa tujuan dari masing-masing bagian tersebut.
 - tujuan masing-masing bagian sistem harus jelas.
 - cara apa yang digunakan subsistem untuk berhubungan dengan subsistem lain.
- d. bagaimana bagian-bagian yang ada dalam sistem itu saling berhubungan menjadi satu kesatuan.

2.2 Arti dan Pentingnya Sistem Pengolaan Data dan Dokumen Perpajakan Dalam Pengumpulan Penerimaan Pajak

Dibeberapa negara telah melakukan perbaikan administrasi perpajakan dengan melakukan perbaikan proses bisnis yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Selanjutnya proses bisnis tersebut diarahkan penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Diharapkan dengan full automation, akan tercipta suatu business process yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan paperless. Perbaikan ini menjadi sangat penting karena dengan semakin baik administrasi data dan dokumen tersebut, maka untuk penggalian potensi penerimaan pajak semakin baik. Beberapa contoh negara yang telah berhasil melaksanakan penerapan teknologi informasi dalam perbaikan administrasi perpajakan dalam pengolahan data dan dokumen perpajakan yaitu Amerika Serikat (IRS), Malaysia, Australia (ATO), dan Newzeland.

Direktorat Jenderal Pajak merupakan unit yang melaksanakan tugas dalam mengumpulkan penerimaan Negara dari pajak. Upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak akan menjadi upaya yang dilakukan secara berkesinambungan. Usaha tersebut perlu didukung oleh sistem administrasi yang dapat meningkatkan produktifitas dengan tetap mengedepankan efektivitas biaya dalam pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan. Pengadministrasian yang kurang akurat dan lambat, bisa mengakibatkan kegagalan dalam menghimpun penerimaan pajak. Untuk menghindari akibat negatif dari permasalahan ini, maka Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk

melakukan pemisahan fungsi administrasi terhadap pengolahan data dan dokumen perpajakan. Dengan pemisahan fungsi administrasi tersebut bertujuan untuk menghasilkan kualitas data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat diandalkan. Selain itu juga untuk menjamin keamanan tinggi yang akan dijalankan oleh unit pengolahan data dan dokumen perpajakan, serta kemampuan secara terstruktur dan terawasi secara sistematis setapi proses bisnis di pengolahan data dan dokumen perpajakan.

Oleh karena itu, PPDDP sebagai unit yang menjadi pioner perekaman data dan pengadministrasian dokumen perpajakan, harus mampu menghasilkan standar layanan utama atau *service level agreement* (SLA) untuk menjamin dalam peningkatan produktifitas kerja, dapat menghasilkan data yang akurat, serta kemampuan dalam menjaga keamanan fisik SPT.

2.3 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu unit di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dalam menjalankan peranan dan fungsinya Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 Juni 2008.

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah :

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.”

Sedangkan misi Direktorat Jenderal Pajak adalah:

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampumewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.”

Adapun misi-misi secara spesifik Direktorat Jenderal Pajak adalah:

- a. Misi Fiskal: Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah ber dasarkan Undang-Undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi;

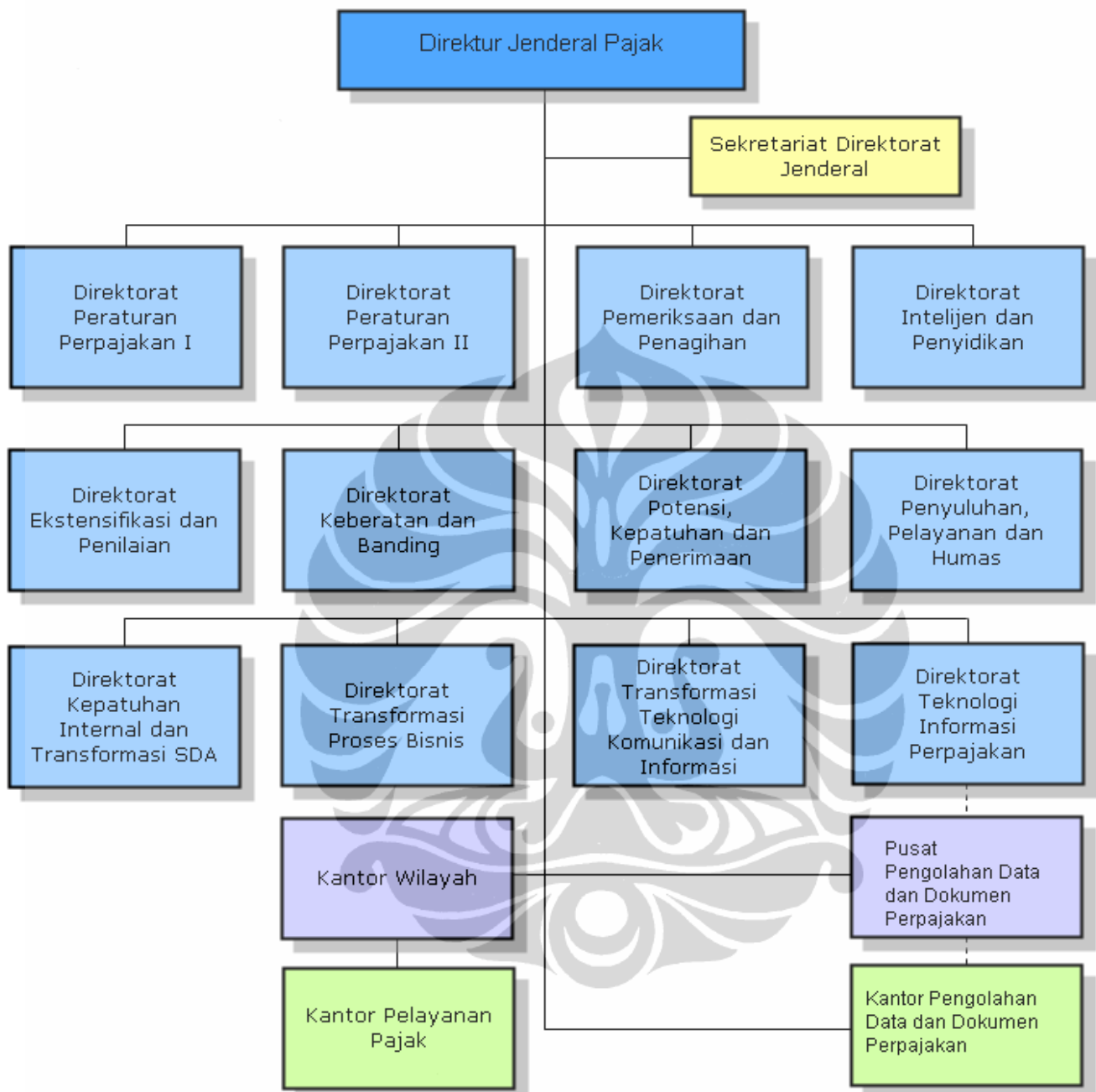
- b. Misi Ekonomi: Mendukung kebijaksanaan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang minimizing distortion;
- c. Misi Politik : Mendukung proses demokratisasi bangsa;
- d. Misi Kelembagaan: Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan yang mutakhir.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa langkah dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasinya, diantaranya:

- Melaksanakan modernisasi birokrasi yang disebut reformasi jilid I. Dimana modernisasi birokrasi tidak hanya mengubah tatanan organisasi, peningkatan pemanfaatan teknologi, akan tetapi juga memiliki budaya kerja baru yang kondusif bagi pegawainya.
- Menurut hasil survey dari Transparency Internasional tahun 2008 tentang indeks suap institusi publik, bahwa Dirrektorat Jenderal Pajak menempati urutan ketiga sebagai institusi publik yang memiliki tingkat suap terendah.
- Direktorat Jenderal Pajak telah memiliki nilai-nilai *corporate value*, yaitu: Profesionalisme, Integritas, *Teamwork*, dan Inovasi (PASTI).
- Selanjutnya pada tahun 2008-2012 dilaksanakan reformasi jilid II yang dituangkan dalam rencana strategis DJP 2008-2012. Adapun yang menjadi fokus reformasi jilid II yaitu: upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah yang memiliki resiko penggelapan pajak yang tinggi dan potensial, dan usaha untuk meningkatkan kontrol kualitas dan integritas basis data sejak WP mendaftarkan diri, menyampaikan SPT, dan melakukan pembayaran pajak hingga manajemen dokumen yang berkaitan dengan WP, termasuk data dari pihak ketiga.
- Pada tahun 2009 telah difokuskan pada penyempurnaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sumber daya manusia (SDM). Yang menjadi program unggulannya adalah *Project for Indonesian tax administration reform* (PINTAR).

Dalam rangka menjalankan organisasinya Direktorat Jenderal Pajak memiliki struktur organisasi yang tergambar pada bagian dibawah ini sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



Gambar 2.3. Struktur Organisasi DJP

Berdasarkan gambar struktur organisasi DJP diatas bahwa Pusat pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan secara struktural bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pajak. Namun PPDDP secara pembinaan di bawah Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Begitu juga dengan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) rencananya akan dibawah PPDDP.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Yang ada di Indonesia

Pusat pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) merupakan unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.91/2007 tanggal 31 juli 2007 dengan memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor B/1902.1/M.PAN/07/2007 tanggal 31 Juli 2007.

Adapun tugas pokok dan fungsi PPDDP adalah dalam mendukung pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengolahan data dan dokumen mulai dari penerimaan, penyortiran, pemindaian, perekaman, validasi, pemeliharaan basis data, pengarsipan berkas, dan pengolahan berkas data wajib pajak, serta pelayanan peminjaman berkas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan pendirian PPDDP sebagai berikut:

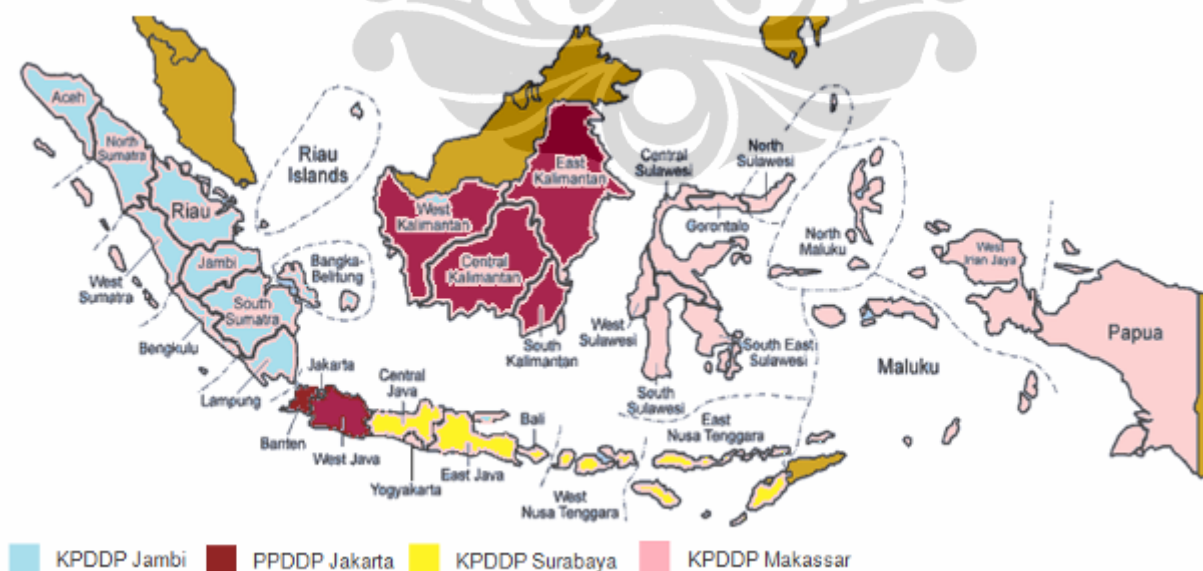
- a. Mempermudah proses *data entry* dan meningkatkan produktivitas. Teknologi sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan yang digunakan di PPDDP adalah digitalisasi dokumen sehingga akan memudahkan petugas *data entry* dalam melakukan editing dokumen yang sesuai dengan *image* dokumen SPT. Sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses perekaman data akan lebih cepat sehingga produktivitas meningkat.
- b. Mempermudah verifikasi. Dengan adanya sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan, fisik dokumen SPT yang telah dipindai, maka akan dilakukan proses *capture* data sehingga akan memudahkan dalam melakukan proses verifikasi.
- c. Mempermudah pencarian data. Dengan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan maka informasi baik fisik dokumen yang di proses di PPDDP akan mudah di temukan dengan menggunakan sistem tracking dokumen. Begitu juga data hasil perekaman akan di simpan sesuai dengan tabel yang telah disiapkan di *database* PPDDP. Dimana data tersebut akan mudah di cari sesuai kebutuhan dari pengguna di KPP.
- d. Menjaga keamanan fisik dokumen. Fisik dokumen SPT yang sudah masuk ke PPDDP akan disimpan di gudang penyimpanan. Dokumen SPT tersebut hanya bisa di pinjam apabila dalam sengketa pengadialn pajak. Serta dalam pencarian dokumen fisik SPT hanya bisa menggunakan sistem.
- e. Pengelolaan penyimpanan akan lebih baik dan umur dokumen digital tidak terbatas. Dokumen SPT yang telah di simpan di PPDDP akan dilakukan proses fumigasi dan the

humadifier. Fumigasi yaitu proses dimana dokumen SPT di lakukan penyemprotan zat kimia agar terhindar dari rayap. The humadifier yaitu proses dimana suhu ruangan gudang penyimpanan diatur kelembaban udara agar dokumen SPT tidak berubah warna atau menjadi rusak.

2.5 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan di Kantor Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar

Seiring dengan semakin besarnya peran pengolahan data dan dokumen perpajakan di Direktorat Jenderal pajak dalam mendukung perbaikan administrasi perpajakan dalam pengolahan data dan dokumen perpajakan, yaitu: mengumpulkan dokumen SPT, meningkatkan validitas data yang dapat dihandalkan, pemeliharaan data base, serta penyimpanan dokumen SPT yang lebih baik, maka Direktorat Jenderal Pajak memandang perlu untuk melakukan perluasan wilayah kerja dari Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan dengan membentuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di Daerah. KPPDDP tersebut nantinya secara structural akan dibawah PPDDP saat ini yang telah beroperasi.

Sementara wilayah yang telah selesai dibangun kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan adalah Makassar. Berikut ini pembagian wilayah kerja pengolahan data dan dokumen perpajakan, baik Pusat Pengolahan data dan dokumen Perpajakan maupun rencana Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan sebagai berikut:



Gambar 2.5. Wilayah Kerja Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Berdasarkan pada gambar 2.5 diatas menggambarkan wilayah sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di bagi menjadi 4 empat wilayah kerja yaitu Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) di Jakarta, Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makasar, Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Jambi, dan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Surabaya.

Adapun rincian dari masing-masing PPDDP maupun KPDDP adalah sebagai berikut :

1. Wilayah cakupan kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jakarta Pusat
 - b. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jakarta Barat
 - c. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jakarta Selatan
 - d. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jakarta Timur
 - e. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jakarta Utara
 - f. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Banten
 - g. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat I
 - h. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jawa Barat II
 - i. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Kalimantan Timur
 - j. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
 - k. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Kalimantan Barat
2. Rencana wilayah cakupan kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Nangro Aceh Darussalam
 - b. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Sumatera Utara I
 - c. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Sumatera Utara II
 - d. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau

- e. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
 - f. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Palembang, dan Bangka Belitung
 - g. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Bengkulu, dan Lampung
3. Rencana wilayah cakupan kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Surabaya, adalah sebagai berikut:
- a. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jawa Tengah I
 - b. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jawa Tengah II
 - c. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
 - d. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jawa Timur I
 - e. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jawa Timur II
 - f. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Jawa Timur III
 - g. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Bali dan Nusa Tenggara
 - h. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Nusa Tenggara
4. Rencana wilayah cakupan kerja Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar, adalah sebagai berikut:
- a. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat
 - b. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
 - c. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kanwil DJP Papua dan Maluku

2.5.1. Kondisi Saat Ini

Saat ini Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan menangani dokumen SPT yang wilayah cakupannya seperti yang telah diuraikan diatas, terkecuali Kanwil DJP Kalimantan timur, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil DJP Kalimantan Barat masih belum beroperasi, karena saat ini sedang menunggu peraturan dari Dirjen Pajak. Sehingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi Stakeholder PPDDP dalam pengolahan data dan dokumen perpajakan dapat di lihat pada tabel berikut;

Tabel 2.1. KPP yang telah masuk dalam tahapan implementasi PPDDP

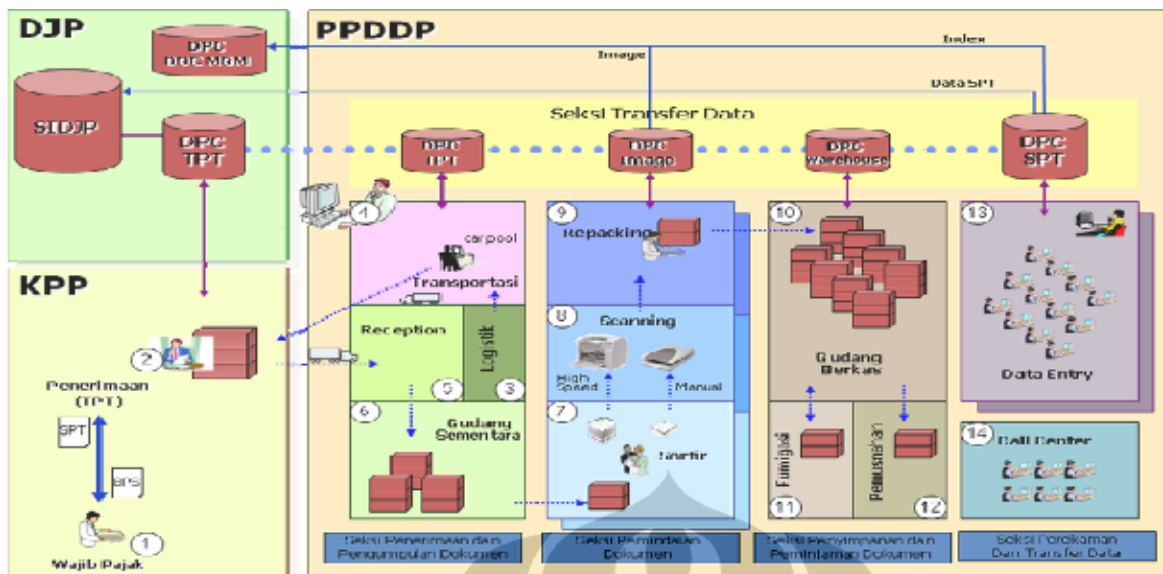
Tahun	2008	2009	2010
Jumlah KPP	57	57	98

Adapun jenis pajak yang diproses di PPDDP masih terbatas pada SPT Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi (SPT PPh OP) dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN). Jumlah SPT yang telah di tangani PPDDP sampai dengan tahun 2010 telah mencapai 3.595.750 lembar SPT. Adapun gambaran pengolahan SPT di PPDDP dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

	2008	2009	2010	Jumlah (lembar SPT)
SPT Diterima di PPDDP	212.219	1.263.543	2.318.618	3.794.380
Pemindaian Dokumen	122.394	1.030.205	2.546.763	3.699.362
Penyimpanan Dokumen	122.409	784.833	2.630.213	3.537.455
Transfer Data dari PPDDP ke SIDJP	121.651	983.150	2.490.949	3.595.750
keterangan: SIDJP adalah aplikasi utama Sistem Informasi DJP				

Pada prinsipnya proses bisnis kerja di PPDDP adalah berkesinambungan. Hasil dari suatu unit merupakan input bagi unit yang lain. untuk itu dokumen SPT yang akan di proses harus lengkap menurut undang-undang perpajakan, sehingga dokumen tersebut nantinya dapat diproses lebih lanjut. Adapun gambaran proses bisnis di PPDDP saat ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peta wilayah kerja pengolahan data dan dokumen perpajakan

Berdasarkan tabel 2.1. diatas maka proses bisnis di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Proses dimulai dari wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP.
2. SPT yang telah diterima di KPP dicetak tanda terima berupa lembar pengawasan arus dokumen (LPAD) dan bukti penerimaan surat (BPS). Selanjutnya LPAD dan SPT disatukan, sedangkan BPS diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya LPAD dan SPT tersebut diberikan *barcode sticker* di LPAD untuk didaftarkan kedalam sistem sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun *barcode sticker* tersebut berisi informasi yang ada dalam LPAD yaitu NPWP, Nama, Masa, Tahun Pajak, dan Status Bayar. Kemudian seluruh SPT-SPT yang diterima di KPP melalui seksi pelayanan, dimasukkan kedalam kemasan yang sudah disiapkan. Kemasan tersebut diberikan *barcode* yang telah didaftarkan ke sistem. Selanjutnya SPT tersebut dimasukkan kedalam kemasan secara sistem. Rata –rata dalam satu kemasan minimal 300 SPT atau setara dengan 3000 lembar SPT. Apabila kemasan tersebut sudah penuh selanjutnya akan dicetak daftar isi dalam kemasan tersebut, dan ditanda tangani oleh kepala seksi pelayanan di KPP. Kemudian kemasan tersebut siap diambil oleh petugas pengambil kemasan dari PPDDP.
3. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen melalui seksi penerimaan dan pengumpulan menyiapkan logistik. Logistik adalah berupa kemasan, *barcode sticker* untuk di tempelkan di LPAD, *barcode sticker* untuk kemasan, serta segel kemasan yang akan digunakan di KPP. Penyiapan logistik akan dilakukan berdasarkan *stock* yang ada di KPP secara *online*.

4. Seksi penerimaan dan pengumpulan dokumen melakukan pemantauan kemasan yang siap diambil di KPP. Selanjutnya kepala seksi penerimaan dan pengumpulan dokumen membuat surat tugas untuk pengambilan kemasan di KPP beserta pengiriman logistik. Surat tugas tersebut berisi petugas pengambil, lokasi kemasan yang akan diambil, mobil yang akan digunakan. Pada saat petugas pengambil kemasan jalan ke KPP, maka petugas pengambil kemasan wajib mencatat kilometer terakhir pada mobil, serta pencatatan kilometer mobil pada saat petugas pengambil kemasan kembali ke Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Adapun tujuan pencatatan kilometer ini bertujuan untuk mengetahui jarak yang paling efisien dari KPP-KPP yang akan diambil kemasan. selanjutnya dilakukan pengambilan kemasan di KPP oleh seksi pengumpulan dan penerimaan Dokumen untuk dibawa ke lokasi PPDDP. Sebelum kemasan akan di bawa kembali ke PPDDP, maka petugas pengambil kemasan wajib menghitung ulang kembali jumlah SPT yang ada dalam kesemasan tersebut. Apabila jumlah yang ada dalam satu kemasan sesuai dengan daftar isi kemasan yang dicetak, maka kemasan tersebut disegel. Apabila seluruh kemasan selesai diambil, maka petugas pengambil kemasan kembali ke PPDDP.
5. Setelah sampai di PPDDP petugas pengambil kemasan menyerahkan kemasan tersebut kepada petugas penerimaan kemasan di seksi penerimaan dan pengumpulan dokumen. Adapun kemasan-kemasan tersebut akan tempatkan pada *trolley* yang sudah di beri *barcode*. Selanjutnya kemasan tersebut akan di daftarkan kedalam sistem, sehingga dalam satu *trolley* akan ketahuan berapa jumlah kemasan yang ada.
6. *Trolley* yang sudah berisi kemasan, selanjutnya akan ditempatkan pada gudang penyimpanan sementara. Petugas gudang penyimpanan sementara mendaftarkan kembali *trolley* yang akan masuk kedalam gudang sementara secara sistem. Gudang penyimpanan sementara ini berfungsi untuk menyimpan kemasan yang ada dalam *trolley* sambil menunggu untuk siap di sortir/pilah.
7. Seksi pemindaian dokumen melalui fungsi pemilahan dokumen melakukan permintaan kemasan ke petugas penyimpanan sementara. Petugas penyimpanan sementara menyerahkan *trolley* yang sudah berisi kemasan ke fungsi pemilahan dokumen melalui *supervisor* pemilahan dokumen. *Supervisor* pemilahan dokumen selanjutnya mendaftarkan kemasan-kemasan tersebut kedalam sistem. Apabila dalam satu *trolley* kemasan tersebut telah sesuai jumlahnya, maka akan dilakukan *approval* oleh petugas penyimpanan sementara bahwa kemasan yang disampaikan ke *supervisor* pemilahan

dokumen telah sesuai. Selanjutnya *supervisor* pemilahan dokumen menyerahkan kemasan tersebut ke petugas pemilahan dokumen. Selanjutnya petugas pemilahan dokumen membuka kemasan yang berisi SPT. SPT tersebut selanjutnya dipilah berdasarkan klasifikasi SPT yaitu standar dan tidak standar. SPT standar adalah SPT yang sesuai dengan cetakkan standar formulir yang telah ditetapkan oleh DJP. Sedangkan SPT yang tidak standar adalah formulir SPT yang dicetak tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan DJP. Setelah dibagi standar dan tidak standar, maka SPT tersebut dipilah menjadi jenis tulisan yang dicetak di SPT yaitu tulisan tangan, mesin ketik, dan komputer. Selanjutnya SPT tersebut dibagi kembali menjadi SPT isi dan SPT nihil murni. SPT isi adalah SPT yang didalamnya terdapat nilai transaksi. Sedangkan SPT nihil murni tidak ada transaksi sama sekali sebagai contohnya SPT Masa PPN. Pada fungsi pemilahan dokumen tersebut SPT tersebut diteliti kembali apakah bisa untuk diteruskan ke fungsi selanjutnya yaitu pemindaian dokumen atau tidak. SPT yang tidak bisa dilanjutnya disebut SPT tidak lengkap yaitu SPT yang menurut undang-undang perpajakan tidak bisa proses lebih lanjut. Setiap SPT yang dipilah harus diurutkan mulai dari LPAD, Induk SPT, Lampiran SPT, serta data pendukung lainnya. Setelah SPT tersebut dipilah maka selanjutnya SPT tersebut dimasukkan kembali dalam kemasan untuk siap dipindai.

8. Setelah kemasan telah selesai dipilah, maka selanjutnya kemasan tersebut diserahkan ke *supervisor* pemindaian dokumen. Pada fungsi pemindaian dokumen tidak ada lagi *trolley* seperti di fungsi gudang penyimpanan sementara dan fungsi pemilahan dokumen. Selanjutnya *supervisor* pemindaian dokumen menyerahkan kemasan siap pindai ke petugas pindai dengan mendaftarkan kedalam sistem. Selanjutnya petugas pemindaian dokumen melakukan proses pemindaian. Setelah dokumen dipindai maka selanjutnya akan dilakukan *document review* dan *quality control*. Adapun proses bisnis *document review* dan *quality control*, sebagai berikut:
 - a. *Document review* yaitu setelah SPT dipindai, maka selanjutnya dilakukan proses validasi hasil pindai. Apakah *image* hasil dokumen SPT yang dipindai sesuai dengan urutan dokumen SPT mulai dari LPAD, Induk SPT, lampiran SPT, serta lampiran pendukung lainnya. Apabila tidak sesuai maka diurutkan kembali agar nantinya *image* dokumen SPT bisa di *capture* datanya. Setelah dilakukan *document review* maka *image* dokumen SPT selanjutnya akan diteruskan ke fungsi *data entry*.

- b. *Quality control* yaitu proses dimana SPT yang telah dipindai mengalami masalah, diantaranya jumlah SPT tidak sesuai dengan jumlah yang ada dalam sistem, dokumen SPT yang tidak lengkap atau lolos dari penelitian di fungsi pemilahan dokumen masuk ke proses pemindaian dokumen, ketidaksesuaian informasi yang ada dalam SPT dengan LPAD baik yang telah melewati proses *document review* maupun *data entry*.

Sementara fisik dokumen SPT selanjutnya menunggu siap untuk dilakukan pengemasan ulang.

9. Fisik dokumen SPT yang siap dikemas ulang adalah seluruh SPT dalam satu kemasan telah masuk kedalam *database* PPDDP sebelum *ditransfer* ke *database* SIDJP. Apabila dalam satu kemasan ada satu SPT yang belum masuk kedalam *database* PPDDP maka kemasan tersebut tidak dapat dikemas ulang. Dalam proses pengemasan ulang kemasan tersebut bisa dicampur dengan kemasan lainnya. Karena dalam satu kemasan tidak selalu penuh sehingga bisa disatukan dengan kemasan lainnya yang siap dikemas ulang. Prinsipnya kemasan tersebut harus penuh sehingga penggunaan kemasan menjadi efisien. Selain itu kemasan tersebut berisi dari berbagai macam jenis SPT maupun berbagai wajib pajak. Ini dilakukan bertujuan untuk menjaga keamanan fisik dokumen SPT. Kemasan yang telah dikemas ulang maka akan dilakukan *approval* oleh *supervisor* pengemasan ulang. Kemasan tersebut selanjutnya akan di serahkan ke seksi penyimpanan dan peminjaman dokumen.
10. Seksi penyimpanan dan peminjaman dokumen menerima kemasan yang siap disimpan di gudang penyimpanan. Adapun kemasan tersebut diterima oleh *supervisor* gudang penyimpanan kemasan melalui sistem. Selanjutnya kemasan tersebut disimpan di pada bilik penyimpanan berdasarkan petunjuk yang telah ditentukan oleh sistem. Pada fungsi penyimpanan kemasan juga melakukan proses *stock opname* terhadap kemasan yang telah disimpan di gudang penyimpanan. Tujuan *stock opname* ini adalah untuk memastikan bahwa dalam satu kemasan telah sesuai jumlah SPT yang ada didalamnya.
11. Kemasan yang telah disimpan dalam gudang penyimpanan maka selanjutnya setiap 6 bulan sekali dilakukan proses fumigasi. Fumigasi bertujuan untuk mencegah dokumen SPT dimakan rayap, serta menjaga keawetan dokumen SPT.
12. Kemasan akan disimpan selama 10 tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan maka selanjutnya akan segera dilakukan pemusnahan kemasan. Khusus di PPDDP kemasan

akan dimusnakan setelah 11 tahun. Adapun tujuan 11 tahun untuk memberi ruang waktu, apabila dokumen SPT tersebut akan dibutuhkan oleh DJP.

13. Fisik dokumen SPT yang telah dipindai dan telah melewati proses *document review*, maka *image* dokumen selanjutnya akan di *capture*. Dimana hasil *capture* tersebut secara otomatis akan masuk kedalam aplikasi *completion*. Aplikasi *completion* adalah membandingkan hasil antara *image* SPT dengan data yang telah *dicapture* dari SPT tersebut. Dimana aplikasi *completion* ini sudah bisa menghitung secara otomatis hasil dari perhitungan pajak dalam satu jenis SPT. Petugas *completion* di seksi perekaman dan *transfer* data melakukan validasi dan *editing* dokumen apabila karakter dari data yang *dicapture* tidak jelas dan hasil penjumlahannya yang ada dalam SPT tidak sama. Pada prinsipnya pekerjaan hasil pekerjaan *completion* harus sesuai dengan *image* SPT, meskipun hasil penjumlahan data SPT tersebut tidak sesuai. Selain pekerjaan *completion* di seksi perekaman dan *transfer* juga melakukan *supervisor*. Aplikasi *supervisor* adalah seluruh hasil kegiatan *completion* yang telah dikerjakan oleh petugas *completion* harus dilakukan validasi akhir sebelum data SPT hasil *capture* di kirim ke *database* PPDDP, dan selanjutnya data SPT di *transfer* ke *database* SIDJP untuk digunakan selanjutnya oleh KPP.
14. *Call center* di PPDDP dalam pelaksanaan operasional sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan digunakan untuk membantu KPP yang membutuhkan bantuan terhadap fisik dokumen SPT maupun data SPT yang telah direkam. Selain itu *Call center* juga berfungsi untuk memantau fisik dokumen SPT yang perlu segera dilakukan pengemasan, agar segera dikirim dan diproses di PPDDP.

2.5.2. Rencana Pengembangan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar

Telah diketahui bersama, bahwa proses administrasi perpajakan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pengadministrasian yang akurat dan lambat, bisa mengakibatkan kegagalan dalam menghimpun pajak. Untuk menghindarkan akibat negatif dari permasalahan ini, PPDDP sebagai unit yang menjadi pionir perekaman data dan pengadministrasian dokumen perpajakan, perlu untuk mencermati kondisi organisasi saat ini dan kebutuhan organisasi dimasa mendatang. Perencanaan bertujuan agar dapat disusun suatu organisasi yang

strukturnya mendukung adanya kesempurnaan dalam proses bisnis administrasi pengolahan dan pemanfaatan data dan dokumen perpajakan.

Dengan semakin luas wilayah cakupan dalam proses pengolahan data dan dokumen perpajakan di PPDDP, maka diperlukan pengembangan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan di daerah. Adapun Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang telah selesai pembangunan gedung Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan tahun 2010 adalah Makasar. Oleh karena itu segera dilakukan kajian dalam menentukan proses bisnis yang baik sebagai komponen penting dalam pengolahan data dan dokumen perpajakan di Makasar. Sampai dengan saat ini Direktorat jenderal Pajak telah merancang beberapa proses bisnis untuk KPDDP Makasar. Namun sampai dengan saat ini belum diputuskan proses bisnis yang akan digunakan nantinya di KPDDP Makasar. Ada beberapa pertimbangan dalam pengembangan proses bisnis di KPDDP Makasar, yaitu:

1. Lebih dari satu proses bisnis yang dapat di implementasikan di KPDDP Makasar;
2. Perbedaan *Area* memungkinkan untuk menggunakan proses bisnis yang berbeda;
3. Proses dan prosedur harus standar untuk memastikan mekanisme pengukuran dalam lingkungan proses distribusi dapat berjalan dengan baik;
4. Resiko dan biaya untuk mengirimkan dokumen menjadi pertimbangan faktor jarak dan transportasi;
5. Pengembangan sistem informasi seharusnya fleksibel untuk mendukung berbagai macam proses bisnis.

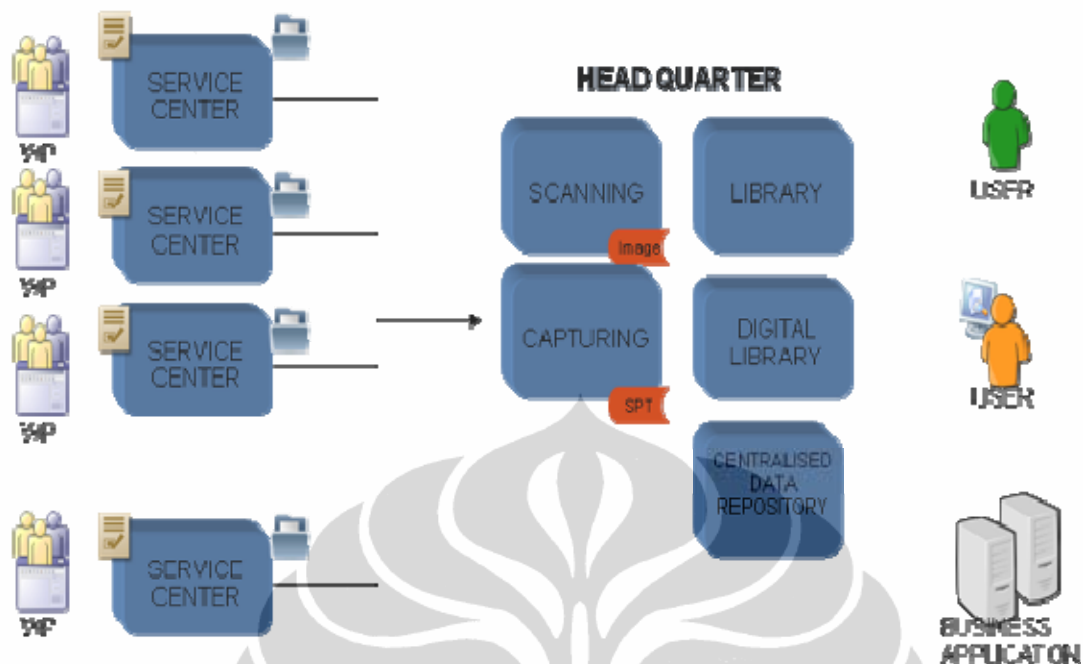
Rencana wilayah cakupan Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar yang akan dikembangkan memiliki kondisi geografis yang berbeda. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa KPDDP Makasar melayani Indonesia bagian timur. Dengan kondisi seperti ini sangat memungkinkan proses bisnis yang dikembangkan lebih dari satu model yang dapat diterapkan di KPDDP Makasar. Wilayah yang cukup sulit dalam jangkauan transportasi tentu bisa menggunakan proses bisnis yang berbeda. Dengan kondisi tersebut KPDDP Makasar harus memiliki proses dan prosedur yang standar untuk memastikan mekanisme pengukuran dalam melakukan distribusi dapat berjalan dengan baik. Selain itu dokumen yang akan dikirim ke KPDDP tentu memiliki resiko dan biaya dalam mempertimbangkan faktor jarak dan transportasi. Seluruh rangkaian sistem yang akan dibangun harus fleksibel sehingga dapat mendukung berbagai macam proses bisnis yang akan dikembangkan. Berikut tabel dibawah ini ada beberapa model proses bisnis Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar yang dapat dikembangkan, yaitu:

Tabel 2.3. Rencana Model Pengembangan KPPDDP Makasar

No	Deskripsi	Centralized Scan & Capture	Federated Scan & Centralized Capture	Distributed Scan & Centralized Capture	Distributed Scan & Federated Capture
A	Kantor Pelayanan Pajak				
1	SPT dikirim ke KPP	v	v	v	v
2	Pencetakan LPAD + SPT	v	v	v	v
3	Pengemasan SPT	v	v	-	-
4	Logistik kemasan SPT	v	v	-	-
B	Jasa Pengambilan/Pengiriman SPT				
5	Pengambilan/Pengiriman Kemasan	v	v	-	-
C	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan				
6	Gudang Sementara	v	v	-	-
7	Pemilahan SPT	v	v	-	-
8	Pemindaian Dokumen	v	v	-	-
9	<i>Quality control</i>	v	v	-	-
10	<i>Document review</i>	v	v	-	-
11	<i>Completion</i>	v	-	v	v
12	<i>Supervisor</i>	v	-	v	v
13	Pengemasan Ulang	v	v	-	-
14	Gudang Akhir	v	v	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan secara rinci rencana pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar, sebagai berikut:

1. *Centralized Scan and Capture Model*



Gambar 2.2. *Centralized Scan and Capture Model*

Berdasarkan gambar diatas, bahwa konsep proses bisnis *centralized scan and capture* yang akan dikembangkan untuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar adalah sama dengan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Dimana SPT yang disampaikan wajib pajak (WP) diterima di KPP (*Service Center*), selanjutnya SPT dimasukkan kedalam satu kemasan. Setelah kemasan tersebut penuh maka kemasan tersebut di kirim ke KPDDP Makasar (*Head quarter*). Di KPDDP Makasar dilakukan proses pemilahan SPT, proses pemindaian dokumen (*scanning*), *data entry* (*capturing*), serta penyimpanan dokumen SPT. Setelah dokumen SPT menjadi *image* dan data yang lengkap, maka selanjutnya data dan *image* SPT di *transfer* ke *Database* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP). Setelah data dan *image* SPT di terima di KPDJP, maka KPP sudah bisa menggunakan data dan *image* SPT tersebut. Adapun secara rinci proses bisnis dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Proses dimulai dari wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP.
2. SPT yang telah diterima di KPP (*Service Center*) dicetak tanda terima berupa Lembar pengawas arus data (LPAD) dan bukti penerimaan surat (BPS). Selanjutnya LPAD dan SPT disatukan, sedangkan BPS diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya LPAD dan SPT tersebut diberikan *barcode sticker* di LPAD untuk di daftarkan kedalam

sistem sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun *barcode sticker* tersebut berisi informasi yang ada dalam LPAD yaitu NPWP, Nama, Masa, Tahun Pajak, dan Status Bayar. Kemudian seluruh SPT-SPT yang diterima di KPP melalui seksi pelayanan, dimasukkan kedalam kemasan yang sudah disiapkan. Kemasan tersebut diberikan *barcode* yang telah di daftarkan ke sistem. Selanjutnya SPT tersebut dimasukkan kedalam kemasan secara sistem. Rata-rata dalam satu kemasan minimal 300 SPT atau setara dengan 3000 lembar SPT. Apabila kemasan tersebut sudah penuh selanjutnya akan di cetak daftar isi dalam kemasan tersebut, dan ditanda tangani oleh kepala seksi pelayanan di KPP. Kemudian kemasan tersebut siap diambil oleh petugas pengambil kemasan dari KPDDP atau KPP mengirimkan kemasan tersebut melalui jasa pengiriman dokumen (pihak ketiga).

3. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Makasar (*Head quarter*) melalui seksi penerimaan dan pengumpulan menyiapkan logistik. Logistik adalah berupa kemasan, *barcode sticker* untuk di tempelkan di LPAD, *barcode sticker* untuk kemasan, serta segel kemasan yang akan digunakan di KPP. Penyiapan logistik akan dilakukan berdasarkan *stock* yang ada di KPP secara *online*.
4. Seksi penerimaan dan pengumpulan dokumen melakukan pemantauan kemasan yang siap di ambil di KPP. Ada dua cara yang bisa ditempuh dalam pengambilan kemasan dari KPP yaitu : petugas KPDDP Makasar langsung mengambil kemasan tersebut khusus untuk wilayah di sekitar KPDDP Makasar, dan pengiriman kemasan oleh KPP melalui jasa pihak pengiriman dokumen (pihak ketiga) baik melalui udara maupun laut.
5. Setelah kemasan diterima di KPDDP Makasar, maka petugas pengambil/pengirim kemasan menyerahkan kemasan tersebut kepada petugas penerimaan kemasan di seksi penerimaan dan pengumpulan dokumen. Adapun kemasan-kemasan tersebut akan tempatkan pada *trolley* yang sudah di beri *barcode*. Selanjutnya kemasan tersebut akan di daftarkan kedalam sistem, sehingga dalam satu *trolley* akan ketahuan berapa jumlah kemasan yang ada.
6. *Trolley* yang sudah berisi kemasan, selanjutnya akan ditempatkan pada gudang penyimpanan sementara. Petugas gudang penyimpanan sementara mendaftarkan kembali *trolley* aygn akan masuk kedalam gudang sementara secara sistem. Gudang penyimpanan sementara ini berfungsi untuk menyimpan kemasan yang ada dalam *trolley* sambil menunggu untuk siap di sortir/pilah.

7. Seksi pemindaian dokumen melalui fungsi pemilahan dokumen melakukan permintaan kemasan ke petugas penyimpanan sementara. Petugas penyimpanan sementara menyerahkan *trolley* yang sudah berisi kemasan ke fungsi pemilahan dokumen melalui *supervisor* pemilahan dokumen. *Supervisor* pemilahan dokumen selanjutnya mendaftarkan kemasan-kemasan tersebut kedalam sistem. Apabila dalam satu *trolley* kemasan tersebut telah sesuai jumlahnya, maka akan dilakukan *approval* oleh petugas penyimpanan sementara bahwa kemasan yang disampaikan ke *supervisor* pemilahan dokumen telah sesuai. Selanjutnya *supervisor* pemilahan dokumen menyerahkan kemasan tersebut ke petugas pemilahan dokumen. Selanjutnya petugas pemilahan dokumen membuka kemasan yang berisi SPT. SPT tersebut selanjutnya dipilah berdasarkan klasifikasi SPT yaitu standar dan tidak standar. SPT standar adalah SPT yang sesuai dengan cetakkan standar formulir yang telah ditetapkan oleh DJP. Sedangkan SPT yang tidak standar adalah formulir SPT yang dicetak tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan DJP. Setelah dibagi standar dan tidak standar, maka SPT tersebut dipilah menjadi jenis tulisan yang dicetak di SPT yaitu tulisan tangan, mesin ketik, dan komputer. Selanjutnya SPT tersebut dibagi kembali menjadi SPT isi dan SPT nihil murni. SPT isi adalah SPT yang didalamnya terdapat nilai transaksi. Sedangkan SPT nihil murni tidak ada transaksi sama sekali sebagai contohnya SPT Masa PPN. Pada fungsi pemilahan dokumen tersebut SPT tersebut diteliti kembali apakah bisa untuk diteruskan ke fungsi selanjutnya yaitu pemindaian dokumen atau tidak. SPT yang tidak bisa dilanjutnya disebut SPT tidak lengkap yaitu SPT yang menurut undang-undang perpajakan tidak bisa proses lebih lanjut. Setiap SPT yang dipilah harus diurutkan mulai dari LPAD, Induk SPT, Lampiran SPT, serta data pendukung lainnya. Setelah SPT tersebut dipilah maka selanjutnya SPT tersebut dimasukkan kembali dalam kemasan untuk siap dipindai.
8. Setelah kemasan telah selesai dipilah, maka selanjutnya kemasan tersebut diserahkan ke *supervisor* pemindaian dokumen. Pada fungsi pemindaian dokumen tidak ada lagi *trolley* seperti di fungsi gudang penyimpanan sementara dan fungsi pemilahan dokumen. Selanjutnya *supervisor* pemindaian dokumen menyerahkan kemasan siap pindai ke petugas pindai dengan mendaftarkan kedalam sistem. Selanjutnya petugas pemindaian dokumen melakukan proses pemindaian. Setelah dokumen dipindai maka selanjutnya akan dilakukan *document review* dan *quality control*. Adapun proses bisnis *document review* dan *quality control*, sebagai berikut:

- a. *Document review* yaitu setelah SPT dipindai, maka selanjutnya dilakukan proses validasi hasil pindai. Apakah *image* hasil dokumen SPT yang dipindai sesuai dengan urutan dokumen SPT mulai dari LPAD, Induk SPT, lampiran SPT, serta lampiran pendukung lainnya. Apabila tidak sesuai maka diurutkan kembali agar nantinya *image* dokumen SPT bisa di *capture* datanya. Setelah di lakukan *document review* maka *image* dokumen SPT selanjutnya akan diteruskan ke fungsi *data entry*.
- b. *Quality control* yaitu proses dimana SPT yang telah dipindai mengalami masalah, diantaranya jumlah SPT tidak sesuai dengan jumlah yang ada dalam sistem, dokumen SPT yang tidak lengkap atau lolos dari penelitian di fungsi pemilahan dokumen masuk ke proses pemindaian dokumen, ketidaksesuaian informasi yang ada dalam SPT dengan LPAD baik yang telah melewati proses *document review* maupun *data entry*.

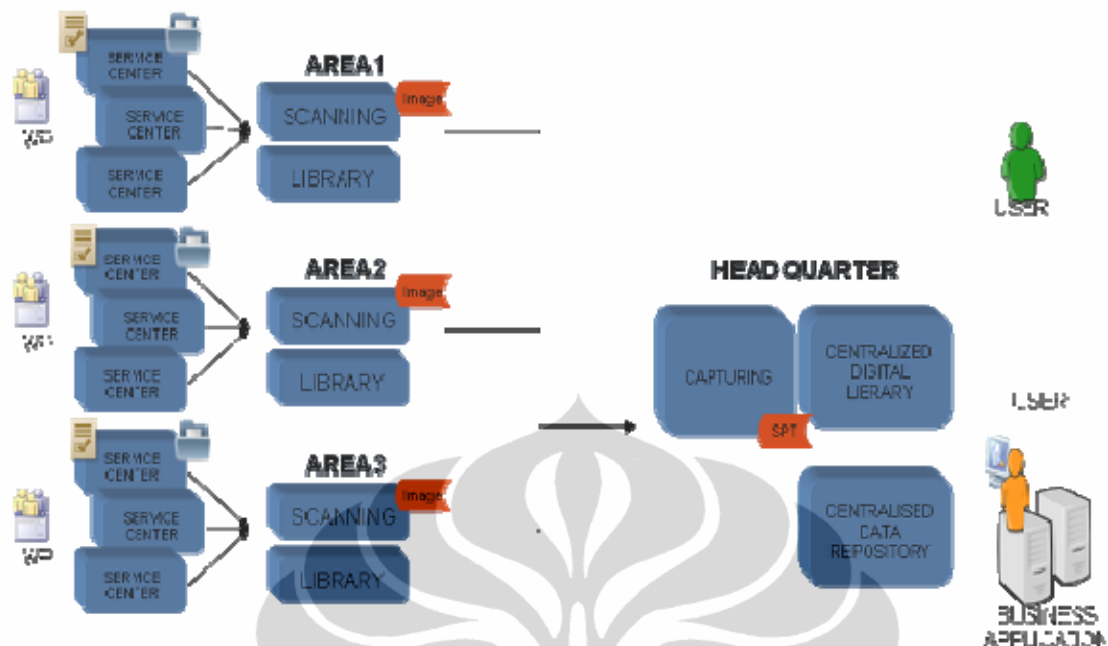
Sementara fisik dokumen SPT selanjutnya menunggu siap untuk dilakukan pengemasan ulang.

9. Fisik dokumen SPT yang siap dikemas ulang adalah seluruh SPT dalam satu kemasan telah masuk kedalam *database* KPDDP Makasar sebelum di *transfer* ke *database* SIDJP. Apabila dalam satu kemasan ada satu SPT yang belum masuk kedalam *database* KPDDP maka kemasan tersebut tidak dapat dikemas ulang. Dalam proses pengemasan ulang kemasan tersebut bisa dicampur dengan kemasan lainnya. Karena dalam satu kemasan tidak selalu penuh sehingga bisa disatukan dengan kemasan lainnya yang siap dikemas ulang. Prinsipnya kemasan tersebut harus penuh sehingga penggunaan kemasan menjadi efisien. Selain itu kemasan tersebut berisi dari berbagai macam jenis SPT maupun berbagai wajib pajak. Ini dilakukan bertujuan untuk menjaga keamanan fisik dokumen SPT. Kemasan yang telah dikemas ulang maka akan dilakukan *approval* oleh *supervisor* pengemasan ulang. Kemasan tersebut selanjutnya akan di serahkan ke seksi penyimpanan dan peminjaman dokumen.
10. Seksi penyimpanan dan peminjaman dokumen menerima kemasan yang siap disimpan di gudang penyimpanan. Adapun kemasan tersebut diterima oleh *supervisor* gudang penyimpanan kemasan melalui sistem. Selanjutnya kemasan tersebut disimpan pada bilik penyimpanan berdasarkan petunjuk yang telah ditentukan oleh sistem. Pada fungsi penyimpanan kemasan juga melakukan proses *stock opname* terhadap kemasan yang telah disimpan di gudang penyimpanan. Tujuan *stock opname* ini adalah untuk

memastikan bahwa dalam satu kemasan telah sesuai jumlah SPT yang ada didalamnya.

11. Kemasan yang telah disimpan dalam gudang penyimpanan maka selanjutnya setiap 6 bulan sekali dilakukan proses fumigasi. Fumigasi bertujuan untuk mencegah dokumen SPT dimakan rayap, serta menjaga keawetan dokumen SPT.
12. Kemasan akan disimpan selama 10 tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan maka selanjutnya akan segera dilakukan pemusnahan kemasan.
13. Fisik dokumen SPT yang telah dipindai dan telah melewati proses *document review*, maka *image* dokumen selanjutnya akan di *capture*. Dimana hasil *capture* tersebut secara otomatis akan masuk kedalam aplikasi *completion*. Aplikasi *completion* adalah membandingkan hasil antara *image* SPT dengan data yang telah di *capture* dari SPT tersebut. Dimana aplikasi *completion* ini sudah bisa menghitung secara otomatis hasil dari perhitungan pajak dalam satu jenis SPT. Petugas *completion* di seksi perekaman dan *transfer* data melakukan validasi dan *editing* dokumen apabila karakter dari data yang di *capture* tidak jelas dan hasil penjumlahannya yang ada dalam SPT tidak sama. Pada prinsipnya pekerjaan hasil pekerjaan *completion* harus sesuai dengan *image* SPT, meskipun hasil penjumlahan data SPT tersebut tidak sesuai. Selain pekerjaan *completion* di seksi perekaman dan *transfer* juga melakukan *supervisor*. Aplikasi *supervisor* adalah seluruh hasil kegiatan *completion* yang telah dikerjakan oleh petugas *completion* harus dilakukan validasi akhir sebelum data SPT hasil *capture* di kirim ke *database* KPDDP, dan selanjutnya data SPT di *transfer* ke databse SIDJP untuk di gunakan selanjutnya oleh KPP.

2. Federated Scan and Centralized Capture Model



Gambar 2.3. *Federated Scan and Centralized Capture Model*

Berdasarkan gambar diatas, bahwa konsep proses bisnis *federated scan and centralized capture* yang akan di kembangkan untuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar adalah dimana SPT yang disampaikan wajib pajak (WP) diterima di KPP (*Service Center*). Selanjutnya SPT dimasukkan kedalam satu kemasan. Setelah kemasan tersebut penuh maka kemasan tersebut di kirim ke KPDDP Makasar (*Area*). Di KPDDP Makasar dilakukan proses pemilahan SPT dan proses pemindaian dokumen (*scanning*), serta penyimpanan dokumen SPT. Sedangkan proses *data entry* (*capturing*) dilakukan di PPDDP (*Head quarter*). Setelah dokumen SPT menjadi *image* dan data yang lengkap di PPDDP, maka selanjutnya data dan *image* SPT di *transfer* ke *database* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP). Setelah data dan *image* SPT di terima di KPDJP. Adapun secara rinci proses bisnis dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Proses dimulai dari wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP.
2. SPT yang telah diterima di KPP (*Service Center*) dicetak tanda terima berupa Lembar pengawas arus data (LPAD) dan bukti penerimaan surat (BPS). Selanjutnya LPAD dan SPT disatukan, sedangkan BPS diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya LPAD dan SPT tersebut diberikan *barcode sticker* di LPAD untuk di daftarkan kedalam sistem sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun *barcode sticker* tersebut berisi informasi yang ada dalam LPAD yaitu NPWP, Nama, Masa, Tahun Pajak, dan Status Bayar. Kemudian

seluruh SPT-SPT yang diterima di KPP melalui seksi pelayanan, dimasukkan kedalam kemasan yang sudah disiapkan. Kemasan tersebut diberikan *barcode* yang telah di daftarkan ke sistem. Selanjutnya SPT tersebut dimasukkan kedalam kemasan secara sistem. Rata –rata dalam satu kemasan minimal 300 SPT atau setara dengan 3000 lembar SPT. Apabila kemasan tersebut sudah penuh selanjutnya akan di cetak daftar isi dalam kemasan tersebut, dan ditanda tangani oleh kepala seksi pelayanan di KPP. Kemudian kemasan tersebut siap diambil oleh petugas pengambil kemasan dari KPDDDP atau KPP mengirimkan kemasan tersebut melalui jasa pengiriman dokumen (pihak ketiga).

3. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Makasar melalui seksi penerimaan dan pengumpulan menyiapkan logistik. Logistik adalah berupa kemasan, *barcode sticker* untuk di tempelkan di LPAD, *barcode sticker* untuk kemasan, serta segel kemasan yang akan digunakan di KPP. Penyiapan logistik akan dilakukan berdasarkan *stock* yang ada di KPP secara *online*.
4. Seksi penerimaan dan pengumpulan dokumen melakukan pemantauan kemasan yang siap di ambil di KPP. Ada dua cara yang bisa ditempuh dalam pengambilan kemasan dari KPP yaitu : petugas KPDDDP Makasar langsung mengambil kemasan tersebut khusus untuk wilayah di sekitar KPDDDP Makasar, dan pengiriman kemasan oleh KPP melalui jasa pihak pengiriman dokumen (pihak ketiga) baik melalui udara maupun laut.
5. Setelah kemasan diterima di KPDDDP Makasar, maka petugas pengambil/pengirim kemasan menyerahkan kemasan tersebut kepada petugas penerimaan kemasan di seksi penerimaan dan pengumpulan dokumen. Adapun kemasan-kemasan tersebut akan tempatkan pada *trolley* yang sudah di beri *barcode*. Selanjutnya kemasan tersebut akan didaftarkan kedalam sistem, sehingga dalam satu *trolley* akan ketahuan berapa jumlah kemasan yang ada.
6. *Trolley* yang sudah berisi kemasan, selanjutnya akan ditempatkan pada gudang penyimpanan sementara. Petugas gudang penyimpanan sementara mendaftarkan kembali *trolley* yang akan masuk kedalam gudang sementara secara sistem. Gudang penyimpanan sementara ini berfungsi untuk menyimpan kemasan yang ada dalam *trolley* sambil menunggu untuk siap di sortir/pilah.
7. Seksi pemindaian dokumen melalui fungsi pemilahan dokumen melakukan permintaan kemasan ke petugas penyimpanan sementara. Petugas penyimpanan sementara menyerahkan *trolley* yang sudah berisi kemasan ke fungsi pemilahan dokumen melalui

supervisor pemilahan dokumen. *Supervisor* pemilahan dokumen selanjutnya mendaftarkan kemasan-kemasan tersebut kedalam sistem. Apabila dalam satu *trolley* kemasan tersebut telah sesuai jumlahnya, maka akan dilakukan *approval* oleh petugas penyimpanan sementara bahwa kemasan yang disampaikan ke *supervisor* pemilahan dokumen telah sesuai. Selanjutnya *supervisor* pemilahan dokumen menyerahkan kemasan tersebut ke petugas pemilahan dokumen. Selanjutnya petugas pemilahan dokumen membuka kemasan yang berisi SPT. SPT tersebut selanjutnya dipilah berdasarkan klasifikasi SPT yaitu standar dan tidak standar. SPT standar adalah SPT yang sesuai dengan cetakkan standar formulir yang telah ditetapkan oleh DJP. Sedangkan SPT yang tidak standar adalah formulir SPT yang dicetak tidak sesuai dengan ukuran yang telah di tetapkan DJP. Setelah dibagi standar dan tidak standar, maka SPT tersebut dipilah menjadi jenis tulisan yang dicetak di SPT yaitu tulisan tangan, mesin ketik, dan komputer. Selanjutnya SPT tersebut dibagi kembali menjadi SPT isi dan SPT nihil murni. SPT isi adalah SPT yang didalamnya terdapat nilai transaksi. Sedangkan SPT nihil murni tidak ada transaksi sama sekali sebagai contohnya SPT Masa PPN. Pada fungsi pemilahan dokumen tersebut SPT tersebut diteliti kembali apakah bisa untuk diteruskan ke fungsi selanjutnya yaitu pemindaian dokumen atau tidak. SPT yang tidak bisa dilanjutnya disebut SPT tidak lengkap yaitu SPT yang menurut undang-undang perpajakan tidak bisa proses lebih lanjut. Setiap SPT yang dipilah harus diurutkan mulai dari LPAD, Induk SPT, Lampiran SPT, serta data pendukung lainnya. Setelah SPT tersebut dipilah maka selanjutnya SPT tersebut dimasukkan kembali dalam kemasan untuk siap dipindai.

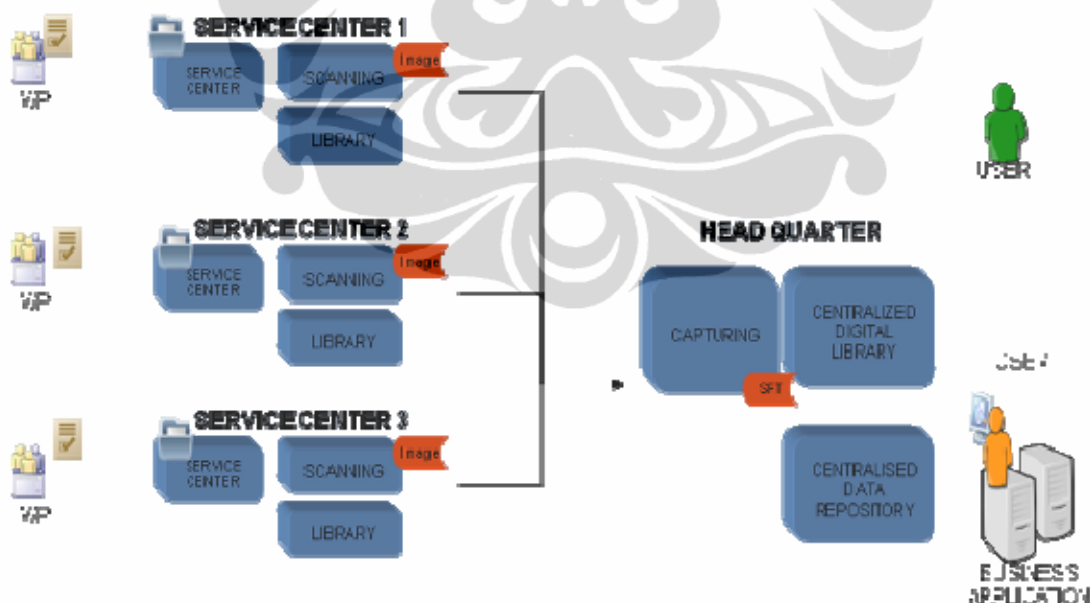
8. Setelah kemasan telah selesai dipilah, maka selanjutnya kemasan tersebut diserahkan ke *supervisor* pemindaian dokumen. Pada fungsi pemindaian dokumen tidak ada lagi *trolley* seperti di fungsi gudang penyimpanan sementara dan fungsi pemilahan dokumen. Selanjutnya *supervisor* pemindaian dokumen menyerahkan kemasan siap pindai ke petugas pindai dengan mendaftarkan kedalam sistem. Selanjutnya petugas pemindaian dokumen melakukan proses pemindaian. Setelah dokumen dipindai maka selanjutnya akan dilakukan *document review* dan *quality control*. Adapun proses bisnis *document review* dan *quality control*, sebagai berikut:
 - a. *Document review* yaitu setelah SPT dipindai, maka selanjutnya dilakukan proses validasi hasil pindai. Apakah *image* hasil dokumen SPT yang dipindai sesuai dengan urutan dokumen SPT mulai dari LPAD, Induk SPT, lampiran SPT, serta lampiran pendukung

lainnya. Apabila tidak sesuai maka diurutkan kembali agar nantinya *image* dokumen SPT bisa di *capture* datanya. Setelah di lakukan *document review* maka *image* dokumen SPT selanjutnya akan diteruskan ke fungsi *data entry*.

- b. *Quality control* yaitu proses dimana SPT yang telah dipindai mengalami masalah, diantaranya jumlah SPT tidak sesuai dengan jumlah yang ada dalam sistem, dokumen SPT yang tidak lengkap atau lolos dari penelitian di fungsi pemilahan dokumen masuk ke proses pemindaian dokumen, ketidaksesuaian informasi yang ada dalam SPT dengan LPAD baik yang telah melewati proses *document review* maupun *data entry*. Sementara fisik dokumen SPT selanjutnya menunggu siap untuk dilakukan pengemasan ulang.
9. Fisik dokumen SPT yang telah dipindai siap dikemas ulang adalah seluruh SPT dalam satu kemasan telah masuk kedalam *database* KPDDP Makasar sebelum di *transfer* ke *database* PPDDP. Apabila dalam satu kemasan ada satu SPT yang belum masuk kedalam *database* KPDDP maka kemasan tersebut tidak dapat dikemas ulang. Dalam proses pengemasan ulang kemasan tersebut bisa dicampur dengan kemasan lainnya. Karena dalam satu kemasan tidak selalu penuh sehingga bisa disatukan dengan kemasan lainnya yang siap dikemas ulang. Prinsipnya kemasan tersebut harus penuh sehingga penggunaan kemasan menjadi efisien. Selain itu kemasan tersebut berisi dari berbagai macam jenis SPT maupun berbagai wajib pajak. Ini dilakukan bertujuan untuk menjaga keamanan fisik dokumen SPT. Kemasan yang telah dikemas ulang maka akan dilakukan *approval* oleh *supervisor* pengemasan ulang. Kemasan tersebut selanjutnya akan di serahkan ke seksi penyimpanan dan peminjaman dokumen.
10. Seksi penyimpanan dan peminjaman dokumen menerima kemasan yang siap disimpan di gudang penyimpanan. Adapun kemasan tersebut diterima oleh *supervisor* gudang penyimpanan kemasan melalui sistem. Selanjutnya kemasan tersebut disimpan pada bilik penyimpanan berdasarkan petunjuk yang telah ditentukan oleh sistem. Pada fungsi penyimpanan kemasan juga melakukan proses *stock opname* terhadap kemasan yang telah disimpan di gudang penyimpanan. Tujuan *stock opname* ini adalah untuk memastikan bahwa dalam satu kemasan telah sesuai jumlah SPT yang ada didalamnya.
11. Kemasan yang telah disimpan dalam gudang penyimpanan maka selanjutnya setiap 6 bulan sekali dilakukan proses fumigasi. Fumigasi bertujuan untuk mencegah dokumen SPT dimakan rayap, serta menjaga keawetan dokumen SPT.
12. Kemasan akan disimpan selama 10 tahun sesuai dengan undang-undang perpajakan maka selanjutnya akan segera dilakukan pemusnahan kemasan.

13. Fisik dokumen SPT yang telah dipindai dan telah melewati proses *document review*, maka *image* dokumen selanjutnya di *transfer* ke PPDDP (*Head quarter*) untuk dilakukan proses *capture*. Dimana hasil *capture* tersebut secara otomatis akan masuk kedalam aplikasi *completion*. Aplikasi *completion* adalah membandingkan hasil antara *image* SPT dengan data yang telah *dicapture* dari SPT tersebut. Dimana aplikasi *completion* ini sudah bisa menghitung secara otomatis hasil dari perhitungan pajak dalam satu jenis SPT. Petugas *completion* di seksi perekaman dan *transfer* data melakukan validasi dan *editting* dokumen apabila karakter dari data yang *dicapture* tidak jelas dan hasil penjumlahannya yang ada dalam SPT tidak sama. Pada prinsipnya pekerjaan hasil pekerjaan *completion* harus sesuai dengan *image* SPT, meskipun hasil penjumlahan data SPT tersebut tidak sesuai. Selain pekerjaan *completion* di seksi perekaman dan *transfer* juga melakukan *supervisor*. Aplikasi *supervisor* adalah seluruh hasil kegiatan *completion* yang telah dikerjakan oleh petugas *completion* harus dilakukan validasi akhir sebelum data SPT hasil *capture* di kirim ke *database* PPDDP, dan selanjutnya data SPT di *transfer* ke databse SIDJP untuk di gunakan selanjutnya oleh KPP.

3. *Distributed Scan and Centralized Capture Model*



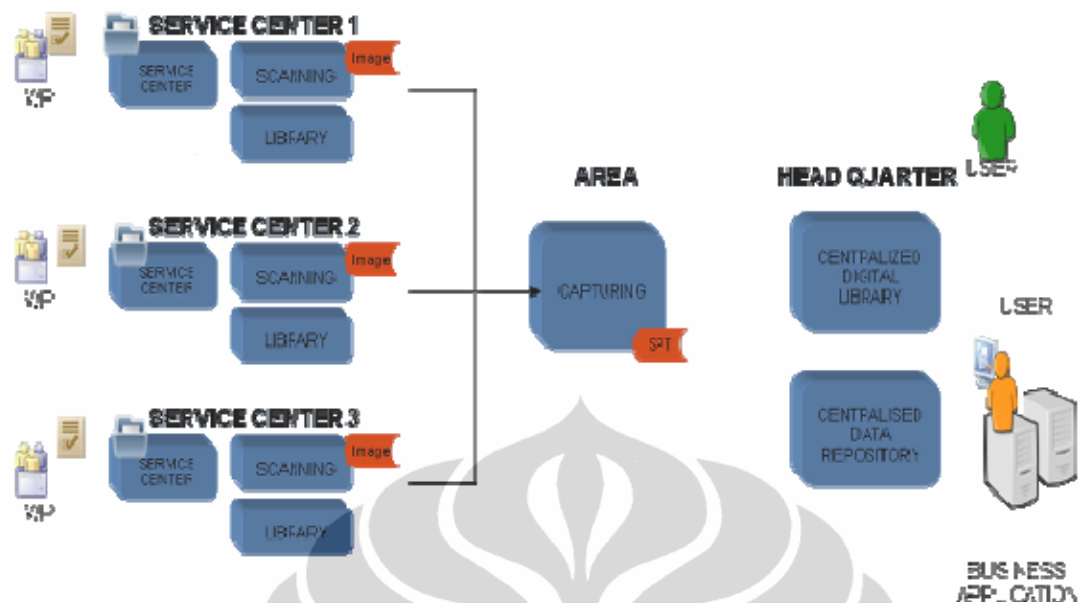
Gambar 2.4. *Distributed Scan and Centralized Capture Model*

Berdasarkan gambar diatas, bahwa konsep proses bisnis *distributed scan and centralized capture* yang akan di kembangkan untuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah proses pemilahan dokumen SPT dan pemindaian dokumen (*scanning*), serta

penyimpanan dokumen fisik SPT dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (*Service Center*). Sedangkan proses *data entry* dilakukan di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar (*Head quarter*). Dimana data hasil dari *data entry* di simpan sementara di KPDDP Makasar sebelum di *transfer* ke PPDDP. Adapun secara rinci proses bisnis dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Proses dimulai dari wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP.
2. SPT yang telah diterima di KPP dicetak tanda terima berupa Lembar pengawas arus data (LPAD) dan bukti penerimaan surat (BPS). Selanjutnya LPAD dan SPT disatukan, sedangkan BPS diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya LPAD dan SPT tersebut diberikan *barcode sticker* di LPAD untuk di daftarkan kedalam sistem sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun *barcode sticker* tersebut berisi informasi yang ada dalam LPAD yaitu NPWP, Nama, Masa, Tahun Pajak, dan Status Bayar. Proses tersebut dilakukan di Kantor pelayanan Pajak (*Service Center*). Kemudian seluruh SPT-SPT yang diterima di KPP melalui seksi pelayanan, dimasukkan kedalam kemasan yang sudah disiapkan. Kemasan tersebut diberikan *barcode* yang telah di daftarkan ke sistem. Selanjutnya SPT yang ada dalam kemasan tersebut dipilah dan input kedalam aplikasi pemilahan SPT di KPP. Setelah proses pemilahan di KPP selanjutnya dilakukan proses pemindaian dokumen dengan menggunakan scanner. Setelah dokumen SPT tersebut dipindai, maka selanjutnya dokumen SPT tersebut di simpan ke dalam gudang penyimpanan dokumen SPT di KPP. Sementara *image* hasil pindai di *transfer* ke KPDDP Makasar.
3. *Image* hasil pindai yang telah diterima di KPDDP Makasar (*Head quarter*), selanjutnya di lakukan proses *data entry*. Jadi fungsi KPDDP hanya melakukan proses *data entry* saja. Apabila *image* SPT yang akan di entry tidak lengkap maka *image* SPT tersebut di kembalikan lagi ke KPP untuk di lakukan proses pindai ulang.
4. Hasil dari *data entry* SPT dan *image* SPT yang telah lengkap, selanjutnya di lakukan proses *transfer* data dari KPDDP ke Data Center PPDDP.
5. Setelah data SPT hasil dari *data entry* dan *image* SPT diterima, maka selanjutnya dilakukan proses *transfer* ke *database* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Apabila data sudah diterima, maka KPP sudah bisa menggunakan data dan *image* SPT tersebut.

4. *Distributed Scan and Federated Capture Model*



Gambar 2.5. *Distributed Scan and Federated Capture Model*

Berdasarkan gambar diatas, bahwa konsep proses bisnis *distributed scan and federated capture* yang akan di kembangkan untuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah proses pemilahan dokumen SPT dan proses pemindaian dokumen (*scanning*), serta penyimpanan fisik SPT di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (*Service Center*). Sedangkan proses *data entry* dilakukan di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar (*Area*). Sementara data hasil *data entry* dan *image* SPT tersimpan didatabase PPDDP (*Head quarter*). PPDDP hanya sebagai tempat penampungan data dan *image* SPT sebelum data dan *image* SPT tersebut di *transfer* ke *database* SIDJP di KPDJP. Adapun secara rinci proses bisnis dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Proses dimulai dari wajib pajak menyampaikan SPT ke KPP.
2. SPT yang telah diterima di KPP dicetak tanda terima berupa Lembar pengawas arus data (LPAD) dan bukti penerimaan surat (BPS). Selanjutnya LPAD dan SPT disatukan, sedangkan BPS diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya LPAD dan SPT tersebut diberikan *barcode sticker* di LPAD untuk di daftarkan kedalam sistem sehingga menjadi satu kesatuan. Adapun *barcode sticker* tersebut berisi informasi yang ada dalam LPAD yaitu NPWP, Nama, Masa, Tahun Pajak, dan Status Bayar. Proses tersebut dilakukan di Kantor pelayanan Pajak (*Service Center*). Kemudian seluruh SPT-SPT yang diterima di KPP melalui seksi pelayanan, dimasukkan kedalam kemasan yang sudah disiapkan. Kemasan tersebut diberikan *barcode* yang telah di daftarkan ke sistem. Selanjutnya SPT

yang ada dalam kemasan tersebut dipilah dan input kedalam aplikasi pemilahan SPT di KPP. Setelah proses pemilahan di KPP selanjutnya dilakukan proses pemindaian dokumen dengan menggunakan scanner. Setelah dokumen SPT tersebut dipindai, maka selanjutnya dokumen SPT tersebut di simpan ke dalam gudang penyimpanan dokumen SPT di KPP. Sementara *image* hasil pindai di *transfer* ke KPDDP Makasar.

3. *Image* hasil pindai yang telah diterima di KPDDP Makasar (*Area*), selanjutnya di lakukan proses *data entry*. Jadi fungsi KPDDP hanya melakukan proses *data entry* saja. Apabila *image* SPT yang akan di entry tidak lengkap maka *image* SPT tersebut di kembalikan lagi ke KPP untuk di lakukan proses pindai ulang.
4. Hasil dari *data entry* SPT dan *image* SPT yang telah lengkap, selanjutnya pekerjaan di KPDDP Makasar telah selesai.
5. Setelah data SPT hasil dari *data entry* dan *image* SPT masuk ke *database* PPDDP (*Head quarter*), maka selanjutnya dilakukan proses *transfer* ke *database* SIDJP di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Apabila data sudah diterima, maka KPP sudah bisa menggunakan data dan *image* untuk penggalian potensi penerimaan pajak baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

BAB 3

METODE EFEKTIVITAS BIAYA BAGI DASAR PENENTUAN KELAYAKAN PROYEK/PROGRAM

3.1 Pentingnya Kajian Kelayakan Bagi Proyek/Program Pemerintah

Dalam tesis ini akan dibahas masalah efektivitas biaya pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar, kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan proyek. Yang dimaksud dengan proyek adalah suatu kegiatan di mana dikeluarkan biaya dengan harapan untuk memperoleh hasil pada waktu yang akan datang, dan yang dapat direncanakan, dibiayai, dan dilaksanakan sebagai satu unit. Kegiatan suatu proyek ditujukan untuk mencapai sesuatu tujuan (*objective*) dan mempunyai suatu titik tolak (*starting point*) dan suatu titik akhir (*ending point*). Baik biaya maupun hasilnya yang penting biasanya dapat diukur. Selain itu kajian kelayakan merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil.

Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan analisa, dimana maksud dari analisa proyek adalah untuk menentukan pemilihan proses bisnis yang efektif secara biaya. Karena sumber-sumber yang tersedia bagi pelaksanaan proyek adalah terbatas. Sehingga tujuan dalam pelaksanaan proyek dapat menghindari pengorbanan sumber-sumber yang tidak diharapkan. Oleh karenanya maka sebelum proyek dilaksanakan, perlu diadakan perhitungan percobaan untuk menentukan hasil dan memilih diantara berbagai alternatif proses bisnis pengolahan data dan dokumen perpajakan dengan jalan menghitung seluruh biaya yang akan dikeluarkan, sehingga nantinya diharapkan mendapatkan manfaat (*benefit*).

3.2 Beberapa Metoda Kajian Kelayakan Proyek/Program

Dalam hal ini agar suatu proyek dianggap layak atau *feasible* dalam arti dapat dilaksanakan hendaknya dipertimbangkan atau dievaluasi dalam semua aspek. Adapun aspek-aspek yang akan dibahas sesuai kebutuhan. Sehubungan dengan rencana pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar, maka di perlukan beberapa aspek-aspek lain yang mendukung proyek ini. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam evaluasi proyek, sebagai berikut : aspek teknis; aspek manajerial dan administratif; aspek organisasi; aspek komersial; aspek finansial dan aspek ekonomis. (Kadariah, 1986: 1-2)

- **Aspek teknis** meliputi evaluasi tentang spesifikasi bisnis proses dan kesesuaiannya dengan infrastuktur TI yang akan di perlukan oleh proyek.
- **Aspek manajerial dan administratif** menyangkut kemampuan staff proyek untuk menjalankan administrasi kegiatan dalam ukuran besar (*large scale activities*). Keahlian management hanya dapat dievaluasi secara subjektif, namun kalau hal ini tidak mendapat perhatian khusus, maka akan banyak kemungkinan terjadi pengambilan keputusan yang kurang baik dalam proyek yang direncanakan.
- **Aspek organisasi** perhatiannya terutama ditujukan pada hubungan antara setiap fungsi dari proses bisnis KPDDP Makasar dengan fungsi yang ada pada PPDDP yang bertujuan untuk melihat apakah hubungan antara masing-masing wewenang (*authority*) dan tanggungjawab (*responsibility*) dapat diketahui dengan jelas.
- **Aspek produksi atau operasional** menganalisa jumlah dokumen SPT yang akan di olah di KPDDP Makasar. Dan juga terlebih dahulu akan dilakukan forcast jumlah dokumen SPT (barang, penumpang dan kendaraan) baik dilihat dari jumlah wajib pajak terdaftar maupun jumlah wajib pajak yang menyampaikan dokumen SPT.
- **Aspek finansial** menganalisa terutama perbandingan antara pengeluaran dan *revenue earningnya* dari pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar. Apakah proyek itu akan terjamin dananya yang diperlukan, apakah proyek akan mampu membayar kembali dana tersebut, dan apakah proyek akan berkembang sedemikian rupa sehingga secara finansial dapat memberikan benefit bagi Direktorat Jenderal Pajak.
- **Aspek ekonomis** menganalisa apakah proyek itu akan memberi sumbangan atau mempunyai peranan yang cukup besar dalam perbaikan administrasi perpajakan, dan dapat meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam kelengkapan penyampaian dokumen SPT secara tidak langsung, dan apakah peranannya cukup besar untuk membenarkan (*to justify*) penggunaan sumber-sumber yang langka.

3.3 Alasan Penggunaan Metode Efektivitas Biaya Pada Kajian Kelayakan Proyek/Program Pemerintah

Pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di Makasar ini membutuhkan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung proses pengolahan data dan dokumen perpajakan nantinya. Pada umumnya peralatan TIK yang

akan digunakan berasal dari barang-barang impor. Sementara nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar dipasaran terlalu tinggi, dan nilai tukar di pasar gelap yang jauh lebih rendah. sehingga di butuhkan nilai tukar resmi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang di sebut juga “nilai bayangan” atau “*shadow prices*”.

Analisis efektivitas biaya berbeda dari analisis *cost and benefit* yang biasanya digunakan dalam evaluasi proyek publik. Dalam istilah moneter, CEA hanya berdasarkan kriteri biaya. Efektivitas biaya sangat ideal untuk penilaian dan dalam pengambilan keputusan dimana peran biaya sangat penting dan harus dapat diidentifikasi secara terpisah. Keuntungan dari menggunakan efektivitas biaya yaitu:

- Objektif harus jelas
- Tingginya tingkat transparansi dan akuntabel
- Pendukung keputusan untuk masalah keuangan akan sulit untuk di nilai

Untuk memperoleh hasil dari pengembangan suatu program/proyek di instansi pemerintah perlu dilakukan kajian, agar dapat memberikan gambaran yang lengkap dari program/proyek yang akan dijalankan. Dalam evaluasi kelayakan proyek biasanya ada dua macam pendekatan analisa, yaitu analisa finansial dan analisa ekonomi. Dalam analisa finansial proyek dilihat dari sudut badan atau orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Dalam analisa ekonomis proyek dilihat dari sudut perekonomian sebagai keseluruhan (Kadariah, 1986: 2-3). Adapun penjelasan tentang analisa finansial dan analisa ekonomis sebagai berikut:

- a. Jika investasi proyek tersebut dibiayai dari dana pemerintah dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat, maka titik berat analisa/evaluasi adalah pada aspek sosial profitabilitas (*social profitability*), yang menekankan sampai seberapa jauh manfaat proyek tersebut kepada perekonomian secara keseluruhan. Ini berarti, seandainya suatu rencana investasi pemerintah, ditinjau dari segi finansialnya menunjukkan hasil analisa didasarkan pada perbandingan *benefit dan cost*-nya adalah lebih kecil dari satu ($B/C < 1$), tetapi ditinjau dari manfaat sosialnya akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat maupun kehidupan perekonomian secara keseluruhan, proyek tersebut akan dilaksanakan. Sebagai contoh dengan adanya KPDDP Makasar, maka akan tersedianya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat (jasa tenaga kerja), menambah pendapatan

masyarakat setempat, dapat menghidupkan kegiatan ekonomi daerah, masuknya teknologi baru di daerah tersebut, adanya *transfer knowledge* tentang pemahaman administrasi perpajakan, dan lain-lain. Oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan inilah walaupun hasil analisa menunjukkan $B/C < 1$, pemerintah akan memutuskan untuk melaksanakan investasi proyek tersebut. Jadi titik berat terletak pada hasil analisa ekonominya.

- b. Dalam analisa ekonomis yang diperhatikan adalah hasil total, atau produktivitas atau keuntungan yang diperoleh dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian sebagai keseluruhan, tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut. Hasil itu disebut '*the social return*' atau '*the economic return*' daripada proyek. Bahkan bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) yang penting adalah mengarahkan penggunaan sumber-sumber yang langka kepada proyek-proyek yang dapat memberikan hasil yang paling banyak bagi perekonomian sebagai keseluruhan, artinya yang menghasilkan '*social return*' atau '*economic return*' yang paling tinggi. Dalam hal ini pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar memiliki dampak ekonomis yaitu terjadinya penghematan biaya dalam pengolahan data dan dokumen perpajakan. Selain itu kemampuan dalam pengolahan data dan dokumen perpajakan diharapkan semakin meningkat.

⁷Ada beberapa alasan manfaat yang akan diperoleh dari kajian kelayakan proyek, yaitu: manfaat finansial, manfaat bagi perekonomian nasional, dan manfaat sosial. Tujuan dari kajian kelayakan dalam pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar adalah sebagai berikut:

- Menghindari kerugian
- Memaksimalkan keuntungan
- Evaluasi aspek-aspek yang mempengaruhi
- Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan
- Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- Mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi
- Mengetahui biaya yang harus disediakan

⁷ Alam Santosa dalam presentasi “ Studi kelayakan(feasibility study)”

3.3.1 Faktor-faktor Yang Harus Diperhatikan Penggunaan Analisa Finansial dan Analisa Ekonomis

Sehubungan dengan adanya perbedaan penekanan pada analisa finansial dan analisa ekonomis sebagaimana tersebut diatas, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kedua analisa tersebut sebagai berikut dibawah Tabel 3.3.1. (Zulkarnain Djamin, 1993 : 9-15).

Tabel 3.1. Perbandingan Analisa Ekonomi vs Finansial

No	Uraian	Analisa Finansial	Analisa Ekonomis
1	Hasil Usaha/Revenues : (semua hasil/income : pendapatan kotor, hasil sewa salvage-value dsb)	X	X
2	Invesment Cost	X	X
3	Operating Cost, antara lain : a. Biaya operasi (Pengiriman Dokumen, kemasan, segel) b. Biaya SDM (upah, gaji) c. Biaya pemeliharaan d. Pembelian suku cadang e. Pembayaran kembali hutang : - Angsuran bunga (interest) - Angsuran hutang pokok (principal) f. Pajak	X X X X X X X	X X*) X X X*) X*) X*)
Revenue – total costs ((1) – (2 + 3))		Net income = net benefit/profit	Net economic benefit = Social returns/ the economic returns

Keterangan : *) Di dalam kita melakukan analisa, ada beberapa unsur yang berlainan penilaiannya dalam kedua macam analisa tersebut, yaitu sebagai berikut :

3.3.1.1 Harga

Dalam teori keynes, bahwa harga terjadi apabila adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Tapi pada Kenyataannya bahwa tidak ada pasar yang sempurna dan situasi perekonomian yang tidak bisa tetap berada dalam keseimbangan, jadi harga pasar yang sebenarnya tidak mencerminkan nilai-nilai yang sempurna. Meskipun demikian, pada umumnya cara terbaik untuk mencari “nilai sebenarnya” (*true value*) terhadap barang dan jasa menggunakan harga pasar (*market*

prices). Dalam prakteknya, harga pasar untuk suatu barang merupakan harga terbaik untuk digunakan menilai biaya ataupun manfaat.

Penekanan pada analisa finansial adalah pada “*private return*”, yang digunakan harga pasar untuk mencari “nilai sebenarnya” terhadap barang dan jasa. Sedangkan Penekanan pada analisa ekonomis adalah pada “*the social returns*” atau “*economic returns*”, di mana dilihat berapa jauh sumbangan proyek terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan (*the project’s social profitability*). Dengan adanya penekanan-penekanan ini, maka di dalam analisa ekonomis, tidak dipakai harga pasar tetapi selalu dipakai ‘harga bayangan’ (*shadow prices*) atau disebut pula sebagai ‘harga akuntansi’ (*accounting prices*).

Apakah yang dimaksud “harga bayangan” atau “*shadow prices*” itu ? Yang dimaksud dengan “harga bayangan” adalah terjadinya pasar yang tidak sempurna yang disebabkan oleh karena lembaga pemasaran yang tidak fleksibel, pengawasan harga, informasi yang tidak sempurna mengenai harga yang ditawarkan oleh penjual/pembeli saingan, adanya kebijaksanaan pemerintah berupa pajak tidak langsung, subsidi maupun dalam hal pengaturan harga. Karena adanya ketidak sempurnaan ini, penggunaan harga pasar dalam analisa ekonomis dapat menimbulkan kesalahan pada waktu menganalisa proyek. Kesalahan ini bisa terjadi misalnya dalam kita menganalisa suatu proyek yang banyak menggunakan barang-barang/komponen-komponen yang harus diimpor dari luar negeri, sedangkan harga valuta asing untuk mengimpor tersebut kemungkinan dinilai terlalu rendah sehingga hasil analisa akan menguntungkan proyek tersebut.

Kesalahan lain mungkin saja terjadi dalam pembayaran upah tenaga kerja yang bekerja pada suatu proyek, dimana upah yang dibayarkan terlalu tinggi, sehingga hasil analisa akan menunjukkan lebih menguntungkan bila proyek tersebut dilaksanakan secara “padat karya” (*labour intensive*). Justru di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia ini, dalam rangka pemerataan kesempatan kerja/penciptaan lapangan kerja baru, maka pelaksanaan proyek-proyek haruslah secara ‘padat karya’ dan bukan “padat modal”.

Untuk menghindari pembiasan ini, maka dalam analisa ekonomis, tidak digunakan harga pasar, tetapi digunakan “harga bayangan”, yang lebih mencerminkan nilai sosial alau nilai ekonomis yang sesungguhnya (*the true social or economic value*) terhadap barang dan jasa. Adapaun beberapa cara penggunaan harga bayangan adalah:

1. Nilai Valuta Asing

Nilai valuta asing (kurs valuta asing) ditetapkan secara resmi oleh pemerintah bila si pembeli (perorangan maupun importir) memerlukan valuta asing maka ia akan ke bank dan membayar seharga nilai resmi dengan mata uang dalam negeri untuk memperoleh mata uang asing tersebut sejumlah yang dinginkannya. Sebagai contoh table dibawah ini.

Rp Kurs Pajak

Periode : 09/05/2011 s.d. 15/05/2011 ▼
KMK No : 296/KM.01/2011

Mata Uang	Kurs
USD (Dolar AS)	8.553,00
AUD (Dolar Australia)	9.273,69
EUR (EURO)	12.685,28
GBP (Poundsterling)	14.155,03

Tabel 3.2. Nilai kurs Pajak

Kadang-kadang ada dua atau lebih nilai resmi untuk tujuan atau penggunaan yang berlainan. Biasanya nilai resmi tersebut terlalu tinggi, lebih tinggi daripada nilai di pasaran bebas (secara legal maupun illegal). Jadi nilai resmi valuta asing cenderung dinilai lebih rendah di dalam negeri dibandingkan dengan nilai di pasaran bebas. Tetapi bila terdapat pasaran valuta asing resmi dengan jumlah pembeli dan penjual yang besar, nilai tukar di pasaran gelap (illegal) belum tentu merupakan nilai sempurna. Nilai yang sebenarnya mungkin terletak di antara nilai pasaran resmi dan nilai pasaran gelap. Di dalam hal ini, untuk menentukan nilai sebenarnya dari valuta asing tersebut, lebih baik menggunakan harga bayangan atau nilai resmi yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang di negara yang bersangkutan.

2. Tenaga Kerja

Dalam menentukan penggunaan harga bayangan untuk upah tenaga kerja khususnya tenaga kerja tidak terdidik (*unskilled labour*) adalah agak sulit. Bagi tenaga kerja terdidik (*skilled labour*) di mana pada umumnya sifat pasarnya adalah kompetitif, maka upah tenaga kerja yang diterima seorang tenaga kerja atau dapat dikatakan setingkat/seimbang dengan tingkat upah yang berlaku di pasaran tenaga kerja. Tetapi tidak demikian halnya dengan upah tenaga kerja tidak terdidik. Pada analisa ekonomis biaya, khususnya operational proyek (*operation costs*) untuk

seorang tenaga kerja tidak terdidik (*unskilled labour*) dalam suatu tahun (misalnya dalam tahun kedua proyek berjalan), akan dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.3. *Operational costs* untuk tenaga kerja

Biaya	Total (US\$ 000)	Keterangan
Opportunity Cost Associated costs (biaya yang timbul untuk seorang tenaga kerja per tahun)	7	Production forgone (nilai yang seharusnya diterima seorang tenaga kerja yang bersangkutan bila ia tidak bekerja di proyek)
1. Biaya transport	3	Total of production forgone + associated costs per tahun bagi seorang tenaga kerja tidak terdidik
2. Tambahan makanan dan pakaian	1	
3. Biaya latihan	1	
	12	

3.3.1.2 Bunga (*Interest*)

Di dalam analisa finansial, bunga merupakan biaya proyek (*project cost*), oleh karena itu harus dihitung. Demikian pula angsuran hutang bila mendapat pinjaman/kredit dari bank ataupun pinjaman perorangan. Di dalam analisa ekonomis, bunga tidak diperhitungkan sebagai biaya (*project cost*) karena bunga yang diterima pemerintah, akan dimanfaatkan kembali untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain dalam masyarakat.

Dalam kajian kelayakan pada proyek pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen tidak bisa menggunakan analisa finansial, karena dananya langsung usulkan dalam DIPA, bukan dalam bentuk pinjaman hutang.

3.3.1.3 Pajak (*Tax*)

Di dalam analisa finansial, pajak merupakan biaya proyek (*project cost*), jadi harus dihitung. Didalam analisa ekonomis, pajak tidak dihitung, karena pajak merupakan bagian dari pendapatan negara (*government revenue*) dan pajak yang diterima dari masyarakat, akan dikeluarkan kembali/dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan lain dalam masyarakat, merupakan “*transfer of payment*”. Oleh karena itu tidak diperhitungkan dalam analisa ekonomis.

3.3.1.4 Subsidi

Di dalam analisa finansial, subsidi (dapat merupakan pengurangan pajak, pembebasan pajak impor terhadap bahan baku, dapat pula berbentuk sarana-sarana

lainnya yang dapat dimanfaatkan proyek yang bersangkutan) akan mengurangi biaya proyek, berarti akan menambah keuntungan (profit). Oleh karena itu harus dihitung dalam analisa finansial. Di dalam analisa ekonomis, subsidi tidak dihitung sebagai salah satu penyebab bertambahnya keuntungan sebagaimana halnya dalam analisa finansial, oleh karena itu tidak dihitung.

3.3.1.5 Trade Dan Non-Trade Good

Penyesuaian-penyesuaian lain yang harus dilakukan adalah terhadap input dan output proyek yang “trade” dan “non-trade”. Yang dimaksud dengan *trade goods* ialah barang dan jasa yang dipakai atau dihasilkan oleh proyek yang mempunyai pengaruh langsung pada neraca perdagangan. Dengan perkataan lain *oppurtunity cost*-nya untuk perekonomian adalah nilainya di pasar dunia (*world market*). Sedangkan yang dimaksud dengan *non-trade goods* ialah barang-barang dan jasa yang dipakai dan dihasilkan proyek, hal ini mempunyai pengaruh langsung pada perekonomian dalam negeri dan pengaruh tidak langsung pada neraca perdagangan luar negeri.

Dalam kajian kelayakan proyek ini tidak akan memasukkan unsur *trade* dan *non trade good* pada pengembangan isistempengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat juga unsur-unsur lain yang di dalam analisa ekonomis maupun analisa finansial yang tidak diperhitungkan sebagai faktor biaya, sebagaimana diperhitungkan di dalam neraca rugi/laba :

a. Sunk cost

Adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan jauh sebelum rencana investasi tersebut diputuskan. Yang diperhitungkan di dalam analisa proyek adalah hanya pengeluaran-pengeluaran yang akan datang dan pendapatan yang akan datang juga.

b. Depresiasi (penyusutan)

Karena depresiasi ini bukanlah pengeluaran secara riil. Yang merupakan pengeluaran secara riil atau dianggap sebagai biaya suatu proyek adalah investasi semula atau dalam syarat-syarat tertentu pelunasan hutang/pinjaman beserta bunganya.

3.4 Penggunaan Metode Efektivitas Biaya Pada Proyek/Program Pengembangan Administrasi Perpajakan yang Memanfaatkan Elektronik (*E-Taxation*)

Menurut Mitja DEČMAN Janez Stare Maja KLUN Mitja DEČMAN dalam “*e-government and cost effectiveness: e-taxation in Slovenia*” bahwa dalam meningkatkan

kinerja pemerintah telah tujuan utama dari reformasi regulasi. Efektivitas biaya, kerjasama dan pendekatan bottom-up, fleksibilitas, dinamika, respon adalah bagian penting reformasi. Perbaikan kinerja regulasi mencakup target untuk mengurangi beban administrasi, dan teknologi informasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyajian penggunaan kertas dengan komunikasi informasi teknologi (TIK) dalam prosedur pemerintah dan berdampak pada efisiensi biaya-pemerintah.

e-perpajakan Portal Slovenia didirikan pada akhir 2003. Awalnya, pembayar pajak dapat menemukan dan mencetak formulir pajak dari portal e-perpajakan. Kemudian penyelesaian isian formulir sangat mudah, sehingga pembayar pajak dapat menyelesaikan formulir isian pajak, mencetak, dan menyerahkan formulir isian pajak melalui pos ke administrasi pajak. Elektronik pengajuan pajak penghasilan pribadi dan PPN telah diaktifkan pada tahun 2004. Sejak itu jumlah layanan tersedia untuk pembayar pajak telah meningkat setiap tahun. Penggunaan portal gratis dan menawarkan beberapa pelayanan pajak wajib pajak. Portal ini terus diperbarui dan ditingkatkan. Untuk mendaftar dan menggunakan layanan, pembayar pajak memerlukan komputer pribadi, *web browser* dan sertifikat digital.

Wajib Pajak dapat menggunakan sertifikat digital yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bebas biaya atau mereka dapat menggunakan beberapa sertifikat yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga lainnya. Ini bermanfaat bagi mereka pembayar pajak yang sudah digunakan layanan *e-banking* dan sertifikat digital yang dimiliki. Pribadi wajib pajak penghasilan yang tidak dapat mendaftar di portal e-perpajakan karena berbagai alasan (kurangnya peralatan, kurangnya komputer tahu-bagaimana) dapat mengotorisasi anggota keluarga dan teman-teman untuk mendaftar bagi mereka. Otorisasi harus ditandatangani dan diserahkan ke kantor pajak atas kertas. Pembayar pajak korporasi dapat mengotorisasi kantor akuntansi (otorisasi eksternal) dan karyawan mereka (otorisasi internal). Untuk tujuan penelitian ini penulis berusaha untuk mengevaluasi dampak dari Pengenalan TIK pada pajak penghasilan pribadi.

Menurut Ekonomi Proyek *e-Government* (eGEP) (Komisi Eropa, 2006b) di Slovenia pengeluaran TIK untuk administrasi publik mencapai € 93.300.000 pada tahun 2004. *e-Government* pengeluaran adalah € 30.980.000, yang € 15,52 per kapita dan 0,12% dari GDP di tahun 2004. Terakhir investasi dalam *e-government* di Slovenia dapat dievaluasi dari anggaran nasional (Departemen Keuangan, 2009). Menurut

Kementerian Administrasi Publik 1998 - 2010 rencana investasi, bersama dengan e-VEM portal (*one-stop-shop* untuk bisnis), e-belanja pemerintah yang direncanakan mencapai € 12.100.000. Pelaksanaan e-perpajakan dilaporkan dalam rencana investasi bagi administrasi pajak Slovenia untuk periode 2005-2009. Informasi pengeluaran sistem umum direncanakan mencapai € 15.600.000, dukungan sistem untuk pembayar pajak PPN €, peralatan 4,2 juta dan perangkat lunak € 11.500.000 dan e-perpajakan sistem informasi € 24.800.000. Pemerintah Slovenia tidak menerbitkan evaluasi keuangan dari dampak yang diharapkan. Satu-satunya estimasi yang dibuat adalah untuk e-VEM portal, yang harus mengurangi biaya pemerintah oleh € 0.900.000. Pengurangan biaya diantisipasi untuk bisnis jauh lebih tinggi di € 10.700.000 per tahun (Kementerian Administrasi Publik, 2008). eGEP menemukan bahwa e-pemerintah secara signifikan meningkatkan produktivitas kerja sektor publik, menghasilkan pelayanan yang lebih baik, biaya tabungan dan pertumbuhan PDB.

Oleh karena itu penggunaan e-taxation dalam menghitung efektivitas biaya dalam evaluasi proyek pemerintah perlu dilakukan. Karena dengan pendekatan yang dilakukan oleh slovenia bisa membantu direktorat jenderal pajak dalam perbaikan administrasi perpajakan, yang merupakan modal dasar dalam penggalan potensi penerimaan negara dari pajak.

3.4.1 Pengertian Efektivitas

⁸Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa : “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Sedangkan pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35) adalah sebagai berikut : “Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OA) > (OS) disebut efektif ”. Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) adalah : “Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input “.

⁸ <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/> di unduh tanggal 05 mei 2011

Dari pengertian-pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektivitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \text{Output Aktual} / \text{Output Target} \geq 1$$

1. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektivitas.
2. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektivitas tidak tercapai.

⁹Menurut Ravianto (1989:113), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Apapun penilaiannya, efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Barnard (dalam Prawirosoentono, 1997: 27) berpendapat "*Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not.*" Pendapat ini antara lain menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.

Mengutip Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal

⁹ <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html> di unduh tanggal 05 mei 2011

yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindak-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan Tujuan dan pendekatan sistem (1997:27-29). Dua pendekatan tersebut antara lain : Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (*input*) dan keluaran (*output*) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (*input*) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (*output*).

Gibson, Donnely dan Ivancevich memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem (1997:31-32) antara lain :

1. Produksi

Produksi merupakan Kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu *output* yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

2. Efisiensi

Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan *input*. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan output.

3. Kepuasan

Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan dan pengguna .

4. Adaptasi

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan ekstern dan intern.

5. Perkembangan

Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk hidup terus dalam jangka panjang.

6. Hidup terus

Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang.

3.4.2 Pengertian Biaya

Pengertian biaya menurut Hansen, Mowen (2004:40) dikemukakan bahwa: “Biaya adalah kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi”.

Adapun definisi biaya menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (1994: 24) adalah sebagai berikut : “Biaya adalah penurunan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menyangkut pembagian kepada penanam modal”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan untuk mendapatkan barang atau jasa dan memiliki jangka waktu masa ekonomis dari barang dan jasa tersebut.

3.4.3 Pengertian *Cost Effectiveness Analysis* (CEA)

Cost effectiveness analysis (CEA) adalah suatu bentuk dari analisis ekonomi yang membandingkan biaya dan tujuan (pengaruh) dari dua atau lebih rangkaian tindakan. CEA berbeda dari *cost benefit analysis* (CBA), yang mana is menentukan suatu nilai harga untuk mengukur dari tujuan (pengaruh).¹⁰

¹¹Selain itu defenisi CEA adalah bentuk dari analisis ekonomi yang membandingkan pengeluaran (*costs*) dan hasil (*effects*) dari dua atau lebih tindakan yang dilakukan. CEA sering digunakan dimana CBA tidak tepat. CEA berbeda dari CBA, yang mana digunakan untuk melakukan evaluasi dari proyek publik. Dimana istilah keuangan CEA hanya berdasarkan kriteria biaya, sedangkan CBA menjelaskan dalam istilah keuangan.

Pada sisi input atau sisi biaya keduanya sesuai untuk metode dari CBA dengan pendekatan dari *opportunity costs*. Manfaat (*effect*) adalah berbeda dari CBA dalam analisis

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Cost-effectiveness_analysis diunduh tanggal 2011-05-07

¹¹ http://www.bukisa.com/articles/445624_understanding-the-cost-effectiveness-analysis-cea di unduh 2011-05-07

dari unit bukan keuangan (*non-monetary units*). Lebih dari itu, manfaat dapat di tampilkan dalam istilah fisik, menunjukkan pencapaian dari bagian tujuan (*sub-objectives*). Manfaat yang dinilai dalam CBA oleh sistem penilaian bobot (*a weighted poin system*). CEA sesuai untuk menggunakan penilaian dan situasi dalam pengambilan keputusan dimana biaya yang berjalan sesuatu aturan penting. Dan harus teridentifikasi secara terpisah.

Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan CEA, yaitu:

1. Tujuan harus di definis secara jelas;
2. Semakin tinggi derajat dari transparansi dan akuntabel;
3. Pendukung keputusan untuk masalah keuangan merupakan suatu kesulitan untuk di nilai;

Kekurangan dengan menggunakan CEA, yaitu:

1. Kadang-kadang kriteria yang dibuat tidak lengkap;
2. Dalam beberapa kasus hasilnya tergantung pada individu;
3. Manipulasi hasil oleh berbagai macam objektif kriteria dan evaluasi;
4. Pembuat keputusan harus membuat asumsi intuitif atau nilai pendapat;

CEA sering digunakan dalam infrastruktur aset manajemen dari pada CBA dimana tujuannya untuk memelihara standar service yang ada. Pergantian atau memperbaharui dari suatu keamanan infrastruktur merupakan salah satu contoh yang bagus. Keuntungan yang diperoleh untuk standar tersentu dan berbagai macam opsi untuk mencapai standar ini dibandingkan dengan identifikasi cara pengeluaran yang lebih sedikit sebagai opsi yang lebih baik. Penggunaan CEA didukung oleh manfaat yang telah di identifikasi dalam perencanaan manajemen aset dimana biaya dari umur manfaat dapat ditentukan. Jadi, perencanaan manajemen aset menjadi indikasi dari *cost-benefit ratio* untuk aset individu yang telah ditentukan sebagai bagian dari sistem. CEA menyediakan suatu framework untuk aman digunakan dari CEA untuk aset individu. Efektivitas biaya secara khusus menjelaskan sebagai suatu rasio tambahan efektivitas biaya, hubungan antara perubahan dalam biaya dan perubahan dalam manfaat (*effects*). Dalam implementasi CEA memiliki delapan langkah, yaitu:

1. *Target analysis*. Tujuan yang akan dicapai harus lengkap, konsisten dan dapat di laksanakan/operasional. jika objektif analisis tidak dilakukan dengan hati-hati, hasil yang akan diperoleh adalah error;
2. *Collcetion of constraints*. Batasan adalah syarat, tanpa tujuan tidak akan bertemu;
3. *Alternative provision*. Rancangan ini memerlukan alternatif. Anda harus dapat untuk memenuhi objektif dan konsisten dengan batasan;
4. *Cost analysis*. Faktor-faktor biaya harus di tentukan untuk setiap pengukuran;
5. *Effectiveness analysis*. Output harus relevan dan terukur. Berdasarkan dua langkah, yaitu:
 - a. Pengembangan yang tepat mempengaruhi standar untuk setiap tujuan;
 - b. Pengukuran yang efektif dari berbagai standar pada suatu skala: skala cardinal (derajat dari kemanjuran berbeda), skala ordinal (pernyataan perbandingan dari perbedaan : tinggi atau lebih rendah), skala nominal (hanya klasifikasi: ya atau tidak);
6. *Temporal hemogenization*. Biaya dari perubahan waktu dan efesiensi dihasilkan oleh mengabaikan pendapat umum dalam waktu, sehingga dapat dibandingkan.
7. *Consideration of risk and uncertainty*: seharusnya ketidaksempurnaan informasi mungkin memiliki biaya dan efisiensi tergantung pada perbedaan hasil.
8. *Submit project recomendtions*. Matrik efektivitas biaya dapat diciptakan.

3.4.4 Dasar-Dasar dalam efektivitas biaya pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar

Adapun dasar-dasar dalam pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar yaitu menggunakan efektivitas biaya menurut **(Zulkarnain Djamin, 1993 : 9-15)**.

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

IV.1 Aspek Teknis

IV.1.1 Spesifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Beberapa pertimbangan dasar dalam menentukan spesifikasi perangkat TIK yang akan dibeli adalah :

1. *Hardware*

- *Server*
- *Workstation*
- *Notebook*
- *Scanner*
- Backup System Device
- Media Komunikasi dan Network
- Penyimpanan Data dan Gambar
- Peralatan Keamanan Gedung

2. *Software*

- *Database Engine*
- Digitalisasi dan *Document Management*
 - Aplikasi Dokumen Manajemen
 - *Input Management Solution*
 - Aplikasi Administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen
- Aplikasi Administrasi KPDDP

Berikut tabel dibawah ini yang berisi daftar rincian rencana perangkat TIK yang dibutuhkan oleh setiap model yang dapat dikembangkan pada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP) Makasar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rencana Kebutuhan Perangkat TIK

No	Type	Jenis Barang/Jasa	Centralized Scan & Capturer Model (Jumlah)	Federated Scan & Centralized Capture (Jumlah)	Distributed Scan & Centralized Capture (Jumlah)	Distributed Scan & Federated Capture (Jumlah)
I	Hardware					
	A	Server				
1		Application Server	15	12	12	12
2		Database Server	2	2	2	2
3		Rack 42 U	5	5	5	5
4		Rack 24 U	7	0	7	7
	B	Workstation				
5		Komputer Personal untuk manajemen	60	60	60	60
6		komputer Personal untuk Data entry	243	68	175	175
7		Windows Server CAL OLP user CAL	303	128	235	235
8		Windows Server STD OLP	15	12	12	12
9		Management Desktop	318	140	247	247
10		Management Server	17	12	17	17
11		Management Printer & Network	2	2	2	2
12		CRM Professional CAL	10	10	10	10
13		CRM Professional Server OLP	1	1	1	1
14		SQL server Enterprise edition	1	1	1	1
15		SQL CAL OLP user CAL	10	10	10	10
	C	Notebook				
16		Notebook PC	10	10	10	10
	D	Scanner				
17		High Speed Scanner:	6	6	0	0
18		Medium Speed Scanner	2	2	0	0
19		Flatbed Scanner:	2	2	0	0
20		Handheld Barcode Scanner – RAM based	10	10	0	0
21		Handheld Barcode Reader - Cordless	10	10	0	0
22		Handheld Barcode Reader Cord	17	17	0	0
	E	Backup System Device				
23		Eksternal DVD Writer	4	4	4	4
24		DVD R/W 4,7 gbyte	1000	1000	1000	1000

(Sambungan Tabel 4.1)

		Media Komunikasi dan Network				
	F					
	25	<i>Core Switch</i>	1	1	1	1
	26	<i>Access Switch</i>	6	6	6	6
	27	<i>Router</i>	1	1	1	1
		<i>Access Control & Manager</i>				
	28	<i>Access Control</i>	1	1	1	1
	29	<i>Installation Cabling (UTP)</i>	318	140	247	247
	30	<i>Kabel Fiber (6 Lantai)</i>	1	1	1	1
		<i>Wireless Access Point</i>	17	17	17	17
		<i>Accelerator & load balancer</i>	2	2	2	2
	31	<i>Wireless LAN Controller + Manager</i>	1	1	1	1
	32					
	G	Storage				
	33	<i>Storage 20 TB</i>	1	0	1	0
	34	<i>SAN Switch</i>	2	0	2	0
	35	<i>External disk backup 1 TB</i>	10	1	0	10
	H	Others				
	36	<i>Printer Laser Jet</i>	17	10	17	17
		<i>Barcode Printer + Label</i>				
	37	<i>Barcode</i>	2	2	0	0
		<i>Label</i>	100	100	0	0
	38	<i>Mesin Pemotong Kertas</i>	1	1	0	0
	39	<i>Mesin Multifunction</i>	2	2	2	2
		<i>TV Monitor LCD 40" + Bracket</i>	7	7	7	7
	41	<i>FingerPrint</i>	15	15	15	15
	42	<i>CCTV for security</i>	1	1	1	1
		<i>- FIXED OUTDOOR CAMERA + Housing</i>	4	4	4	4
		<i>- Fix Dome Camera</i>	24	24	24	24
		<i>- Moving Dome Camera</i>	8	8	8	8
		<i>- Digital Video Recorder</i>	2	2	2	2
		<i>- Monitor LCD</i>	2	2	2	2
		<i>- Keyboard Digital Joystick</i>	1	1	1	1
	43	<i>Raised Floor</i>	1	1	1	1
		<i>ongkos raised floor</i>	1	1	1	1
	44	<i>Printer DotMatrix</i>	5	5	5	5
II	Software					
		Database Engine				
	1	<i>Database License</i>	2	2	2	2
		Digitalisasi & Document Management				
	2	<i>Aplikasi Document Management (licenses)</i>	100	100	100	100
		<i>- Administrator aplikasi (licenses)</i>	1	1	1	1

(Sambungan Tabel 4.1)

	3	- Developer aplikasi (Licenses) <i>Input Management Solution (licenses)</i>	1 1	1 0	1 1	1 1
	4	Aplikasi Administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen - Modul Manajemen Tranportasi - Modul Manajemen Template Dokumen - Modul Manajemen Gateway - Modul Manajemen Perekaman Data - Modul Manajemen Pemantauan Kinerja - Modul Manajemen Interfacing ke SIDJP - Modul Manajemen Kepegawaian - Modul Manajemen Penyimpanan & Peminjaman Berkas - Modul Manajemen Command Center & helpdesk management - Modul Command Center & helpdesk management	1	0	0	0

IV.1.2 Spesifikasi Jasa Pengambilan/Pengiriman Kemasan SPT

Manajemen transportasi dalam sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan dalam mengambil/mengirimkan dokumen SPT menggunakan beberapa cara yaitu:

- Transportasi Darat

Untuk wilayah sekitar KPDDP Makasar maka akan menggunakan transportasi darat, seperti beberapa KPP Pratama di Kanwil Sulawesi Selatan.

- Transportasi Udara

Untuk wilayah diluar KPDDP Makasar maka akan menggunakan transportasi udara, seperti Seluruh KPP Pratama di lingkungan Kanwil Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Gorontalo, Maluku Utarta, Seluruh KPP Pratama di Kanwil Papua dan Maluku.

Berikut tabel dibawah ini tentang rencana kebutuhan jasa pengambilan/pengiriman kemasan SPT dari KPP ke KPDDP Makasar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rencana Jassa Pengambilan/Pengiriman Kemasan SPT

Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan		Centralized Scan & Capture (Jumlah)	Federated Scan & Centralized Capture (Jumlah)	Distributed Scan & Centralized Capture (Jumlah)	Distributed Scan & Federated Capture (Jumlah)
1	Jasa Sewa Mobil				
-	Pemakaian kendaraan Mobil per bulan	v	v	-	-
-	Jumlah Kendaraan Mobil	v	v	-	-
-	Biaya Kendaraan Mobil per tahun	-	-	-	-
2	Jasa Kurir				
-	Biaya Pengiriman/pengambilan				
-	Biaya Pengiriman/pengambilan per tahun.	v	v	-	-
Jumlah Total Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan					

Note: v adalah “Ya”

- adalah “Tidak”

IV.1.3 Spesifikasi Jasa Pengolahan Data dan Dokumen (Tenaga Kerja / Labor Supply)

KPDDP Makasar dalam melaksanakan kegiatan pengolahan data membutuhkan jasa pengolahan data dan dokumen dari pihak ketiga. Adapun spesifikasi jasa tenaga kerja yang digunakan memiliki persyaratan minimum, sebagai berikut:

- lulusan SMA/D1 untuk operator;
- lulusan D3/S1 untuk Team leader;
- Diutamakan lulusan dari sekitar Wilayah cakupan KPDDP Makasar;
- memiliki kemampuan dalam mengoperasikan computer;
- memiliki pengetahuan tentang perpajakan;
- menandatangani *non disclosed agreement* (NDA) tentang kerahasiaan data wajib pajak (UU KUP Pasal 34).

Berikut tabel dibawah ini rencana kebutuhan jasa pengolahan data dan dokumen perpajakan (Tenaga Kerja/labor Supply) yang dapat dikembangkan di KPDDP Makasar sebagai berikut:

Tabel 4.3. Rencana Jasa Pengolahan Data dan Dokumen

Biaya Pegawai <i>Outsource</i>	<i>Centralized Scan & Capture</i>	<i>Federated Scan & Centralized Capture</i>	<i>Distributed Scan & Centralized Capture</i>	<i>Distributed Scan & Federated Capture</i>
1) Gaji Pegawai <i>Outsource</i>				
Pemilahan Dokumen	v	v	-	-
Pemindaian Dokumen	v	v	-	-
<i>Quality control</i>	v	v	-	-
<i>Document review</i>	v	v	-	-
<i>Data entry Completion</i>	v	-	v	v
<i>Supervisor</i>	v	-	v	v
Pengemasan Ulang	v	v	-	-
- Jumlah Pegawai	-	-	-	-
- Gaji rata-rata / orang / bulan	-	-	-	-
Jumlah gaji / tahun	-	-	-	-
2) Tunjangan				
a) Uang makan / orang / hari	v	v	v	v
Biaya uang makan / tahun	v	v	v	v
c) Kesehatan / orang / bulan	v	v	v	v
Biaya kesehatan / tahun	v	v	v	v
Pakaian dinas 2 (dua) stel / orang /				
d) tahun	v	v	v	v
Biaya pakaian dinas/tahun	v	v	v	v
e) JAMSOSTEK 10% x total gaji Crew.	v	v	v	v
Tunjangan Hari Raya (1 x gaji)				
f) dan	v	v	v	v
jasa produksi				
Jumlah Tunjangan / Tahun	-	-	-	-
Jumlah Total Biaya Pegawai <i>Outsource</i> + Tunjangan	-	-	-	-

Note: v adalah "Ya"

- adalah "Tidak"

IV.2 Aspek Data Wajib Pajak

IV.2.1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar

Berikut ini informasi mengenai jumlah wajib pajak terdaftar tahunan orang pribadi (PPH OP) berdasarkan wilayah cakupan KPDDP Makasar, sebagai berikut:

Tabel 4.4. Jumlah Wajib Pajak SPT Orang Pribadi yang terdaftar

No	KANWIL	2008		2009	
		Pusat	Cabang	Pusat	Cabang
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	247,866	6,646	383,955	7,657
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	124,845	6,156	176,768	6,763
C	Kanwil Papua dan Maluku	82,485	4,046	121,408	4,157
	Total	455,196	16,848	682,131	18,577
		472,044		700,708	

(sumber : Buku Saku Pajak Dalam Angka Tahun 2001-2009, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan: hal 96-97)

IV.2.2. Jumlah Wajib Pajak PPN Terdaftar

Berikut ini informasi mengenai jumlah wajib pajak terdaftar Masa PPN berdasarkan wilayah cakupan KPDDP Makasar, sebagai berikut

Tabel 4.5. Jumlah Wajib Pajak SPT Masa PPN yang terdaftar

No	KANWIL	2008		2009	
		Pusat	Cabang	Pusat	Cabang
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	48,349	3,214	53,815	3,675
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	36,616	2,367	39,642	2,573
C	Kanwil Papua dan Maluku	34,126	2,337	38,157	2,550
	Total	119,091	7,918	131,614	8,798
		127,009		140,412	

(sumber : Buku Saku Pajak Dalam Angka Tahun 2001-2009, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan: hal 169-170)

IV.2.3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Masa PPN yang Menyampaikan SPT dan Estimasi Perkiraan Jumlah Lembar SPT

Menurut SE-18/PJ/2011 tentang kebijakan kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh pada tahun 2011, dan dalam Rapimnas III di Direktorat Jenderal Pajak, pada Direktorat

Potensi, kepatuhan, dan Penerimaan bulan april 2011. Adapun target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahun 2011 secara nasional sebagai berikut:

- a. SPT Tahunan PPh sebesar 62,5 %
- b. SPT Masa PPN sebesar 45 %

Sementara itu untuk menghitung jumlah lembar SPT yang akan di proses di KPDDP Makasar perlu juga di hitung persentase kenaikan jumlah lembar SPT tahun berikutnya. Dalam Rapimnas III, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan bulan April 2011, menyatakan bahwa:

“Jumlah SPT Tahunan PPh yang masuk s.d 31 maret 2011 sebanyak 7.952.930. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2010 yang sebesar 6.111.727 SPT, penerimaan SPT pada tahun 2011 ini mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 30%.”

Dengan peningkatan kepatuhan menyampaikan SPT pada tahun 2011 tersebut, maka untuk mengambil gambaran jumlah lembar SPT besaran kenaikan dari jumlah lembar SPT sebesar 30%. Berdasarkan dari data diatas tentang jumlah wajib pajak terdaftar baik pada SPT PPh OP dan Masa PPN maka dapat di gambarkan pada table di bawah, sebagai berikut:

Tabel 4.6. Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dan estimasi jumlah Lembar pada setiap SPT

	WP OP	WP Masa PPN	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh OP	WP OP	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Masa PPN	WP Masa PPN
Jumlah SPT (2009)	700,708	140,412		437,943		63,185
Asumsi Jumlah Lembar	5.33	7		5.33		7
Jumlah Lembar 2009	3,737,109	982,884		2,335,693		442,298
kenaikan jumlah SPT 30%						
2010	4,858,242	1,277,749	62.5%	3,036,401	45%	574,987
2011	6,315,715	1,661,074		3,947,322		747,483
2012	8,210,429	2,159,396		5,131,518		971,728
2013	10,673,558	2,807,215		6,670,974		1,263,247
2014	13,875,625	3,649,379		8,672,266		1,642,221
2015	18,038,313	4,744,193		11,273,946		2,134,887
2016	23,449,807	6,167,451		14,656,129		2,775,353
2017	30,484,749	8,017,687		19,052,968		3,607,959
2018	39,630,174	10,422,993		24,768,858		4,690,347

2019	51,519,226	13,549,891	32,199,516	6,097,451
2020	66,974,993	17,614,858	41,859,371	7,926,686
2021	87,067,491	22,899,315	54,417,182	10,304,692
2022	113,187,739	29,769,110	70,742,337	13,396,099
Jumlah lembar tahun 2022	474,286,061	124,740,311	296,428,788	56,133,140

Untuk dapat memperoleh rata-rata jumlah lembar yang akan diproses di KPDDP Makasar nantinya perlu diketahui berapa rata-rata lembar setiap jenis SPT yang akan diproses. Adapun dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7. Jumlah Lembar Untuk SPT PPh OP

SPT PPh OP	8
SPT PPh OP S	5
SPT PPh OP SS	3
Rata-rata per Lembar	5.33

Tabel 4.8. Jumlah Lembar Untuk SPT Masa PPN

SPT Masa PPN 1111	7
Rata-rata per Lembar	7.00

IV.3 Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pengadaan Barang dan Jasa sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar menggunakan sesuai Kepres No 54 Tahun 2010. Adapun pendanaan menggunakan DIPA yang telah disetujui oleh Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2011.

IV.4. Analisa Biaya

Dalam ilmu evaluasi proyek setelah aspek teknik, pemasaran dan lain-lain dianggap feasible, maka analisa lazimnya hanya dilakukan pada dua macam aspek, yaitu : analisa finansial (keuangan) dan analisa ekonomi. Sesuai dengan ruang lingkup penulisan ini maka analisa finansial (keuangan) yang akan digunakan untuk menentukan efektivitas biaya ke 4 (empat) model bisnis proses di KPDDP Makasar yang diteliti yaitu:

1. *Centralized Scan and Capture Model*
2. *Federated Scan and Centralized Capture Model*
3. *Distributed Scan and Centralized Capture Model*
4. *Distributed Scan and Federated Capture Model*

IV.4.1. Analisa Finansial (Keuangan)

IV.4.1.1. Centralized Scan and Capture Model

Berdasarkan konsep proses bisnis *centralized scan and capture* yang akan dikembangkan untuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar adalah sama dengan Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Dimana SPT yang disampaikan wajib pajak (WP) diterima di KPP (*Service Center*), selanjutnya SPT dimasukkan kedalam satu kemasan. Setelah kemasan tersebut penuh maka kemasan tersebut di kirim ke KPDDP Makasar (*Head quarter*). Di KPDDP Makasar dilakukan proses pemilahan SPT, proses pemindaian dokumen (*scanning*), *data entry* (*capturing*), serta penyimpanan dokumen SPT. Setelah dokumen SPT menjadi *image* dan data yang lengkap, maka selanjutnya data dan *image* SPT di *transfer* ke *Database* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP). Setelah data dan *image* SPT di terima di KPDJP, maka KPP sudah bisa menggunakan data dan *image* SPT tersebut.

IV.4.1.1.1. Biaya Proyek

Perkiraan kebutuhan investasi perangkat TIK yang akan di instalasi di KPDDP Makasar tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1. Harga Perangkat TIK Rp 60,082,049,287,-
(asumsi harga 1 US \$ = Rp 9.006)

Tabel 4.9. Perkiraan biaya perangkat TIK

No	Type	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Harga Satuan (Rupiah)	Total Harga (Rupiah)
I	Hardware				
	A	Server			
	1	Aplication Server	15	Rp 141,574,320.00	Rp 2,123,614,800.00
	2	Database Server	2	Rp 790,006,320.00	Rp 1,580,012,640.00
	3	Rack 42 U	5	Rp 70,697,100.00	Rp 353,485,500.00
	4	Rack 24 U	7	Rp 29,809,860.00	Rp 208,669,020.00
		Total			Rp 4,265,781,960.00
	B	Workstation			
	5	Komputer Personal untuk manajemen	60	Rp 11,887,920.00	Rp 713,275,200.00
	6	komputer Personal untuk <i>Data entry</i>	243	Rp 11,212,470.00	Rp 2,724,630,210.00
	7	Windows Server CAL OLP user CAL	303	Rp 258,382.14	Rp 78,289,788.42

(Sambungan Tabel 4.9)

	8	Windows Server STD OLP	15	Rp 6,578,792.94	Rp 98,681,894.10
	9	Management Desktop	318	Rp 368,435.46	Rp 117,162,476.28
	10	Management Server	17	Rp 5,226,091.74	Rp 88,843,559.58
	11	Management Printer & Network	2	Rp 540,360.00	Rp 1,080,720.00
	12	CRM Professional CAL	10	Rp 8,693,671.92	Rp 86,936,719.20
	13	CRM Professional Server OLP	1	Rp 18,319,464.84	Rp 18,319,464.84
	14	SQL server Enterprise edition	1	Rp 77,870,018.76	Rp 77,870,018.76
	15	SQL CAL OLP user CAL	10	Rp 1,409,348.94	Rp 14,093,489.40
		Total			Rp 4,019,183,540.58
	C	Notebook			
	16	Notebook PC with Intel Centrino Duo Technology	10	Rp 14,292,522.00	Rp 142,925,220.00
		Total			Rp 142,925,220.00
	D	Scanner			
	17	High Speed Scanner:	6	Rp 711,428,970.00	Rp 4,268,573,820.00
	18	Medium Speed Scanner	2	Rp 383,016,174.00	Rp 766,032,348.00
	19	Flatbed Scanner:	2	Rp 73,263,810.00	Rp 146,527,620.00
	20	Handheld Barcode Scanner – RAM based	10	Rp 14,859,900.00	Rp 148,599,000.00
	21	Handheld Barcode Reader - Cordless	10	Rp 10,491,990.00	Rp 104,919,900.00
	22	Handheld Barcode Reader Cord	17	Rp 1,801,200.00	Rp 30,620,400.00
		Total			Rp 5,465,273,088.00
	E	Backup System Device			
	23	Eksternal DVD Writer	4	Rp 670,000.00	Rp 2,680,000.00
	24	DVD R/W 4,7 gbyte	1000	Rp 9,006.00	Rp 9,006,000.00
		Total			Rp 11,686,000.00
	F	Media Komunikasi dan Network			
	25	Core Switch	1	Rp 4,506,557,370.00	Rp 4,506,557,370.00
	26	Access Switch	6	Rp 819,996,300.00	Rp 4,919,977,800.00
	27	Router	1	Rp 125,273,460.00	Rp 125,273,460.00
	28	Access Control & Manager		Rp 702,738,180.00	Rp 702,738,180.00
	29	Access Control	1		
	29	Installation Cabling (UTP)	318	Rp 1,125,750.00	Rp 357,988,500.00
	30	Kabel Fiber (6 Lantai)	1	Rp 126,084,000.00	Rp 126,084,000.00
	30	Wireless Access Point	17	Rp 10,830,615.60	Rp 184,120,465.20
	31	Accelerator & load balancer	2	Rp 722,672,961.00	Rp 1,445,345,922.00
	32	Wireless LAN Controller + Manager	1	Rp 124,392,673.20	Rp 124,392,673.20
		Total			Rp 12,492,478,370.40
	G	Penyimpanan Data dan Gambar			

(Sambungan Tabel 4.9)

	33	Storage 20 TB	1	Rp 12,313,921,812.00	Rp 12,313,921,812.00
	34	SAN Switch	2	Rp 316,723,008.00	Rp 633,446,016.00
	35	External disk backup 1 TB	10	Rp 5,160,438.00	Rp 51,604,380.00
		Total			Rp 12,998,972,208.00
		Peralatan Keamanan Gedung			
	36	Printer Laser Jet	17	Rp 5,727,816.00	Rp 97,372,872.00
		Barcode Printer + Label		Rp 21,614,400.00	Rp 43,228,800.00
	37	Barcode	2		
		Total			
	38	Label	100	Rp 40,000.00	Rp 4,000,000.00
	39	Mesin Pemotong Kertas	1	Rp 127,272,000.00	Rp 127,272,000.00
	40	Mesin Multifunction	2	Rp 123,490,272.00	Rp 246,980,544.00
	41	TV Monitor LCD 40" + Bracket	7	Rp 23,500,000.00	Rp 164,500,000.00
	42	FingerPrint	15	Rp 22,727,000.00	Rp 340,905,000.00
	43	CCTV for security	1	Rp 1,063,636,000.00	Rp 1,063,636,000.00
		- FIXED OUTDOOR CAMERA + Housing	4		
		- Fix Dome Camera	24		
		- Moving Dome Camera	8		
		- Digital Video Recorder	2		
		- Monitor LCD	2		
		- Keyboard Digital Joystick	1		
	44	Raised Floor	1	Rp 29,872,902.00	Rp 29,872,902.00
		ongkos raised floor	1	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00
	44	Printer DotMatrix	5	Rp 2,908,938.00	Rp 14,544,690.00
		Total			Rp 2,140,312,808.00
II	Software				
		Database Engine			
	1	Database License	2	Rp 430,486,800.00	Rp 860,973,600.00
		Digitalisasi & Document Management			
	2	Aplikasi Document Management (licenses)	100	Rp 2,107,404,000.00	Rp 2,107,404,000.00
		- Administrator aplikasi (licenses)	1		
		- Developer aplikasi (Licenses)	1		
	3	Input Management Solution (licenses)	1	Rp 12,248,898,492.00	Rp 12,248,898,492.00
		Total			Rp 14,356,302,492.00
		Aplikasi Administrasi Kantor Pengolahan Data dan Dokumen		Rp 3,328,160,000.00	Rp 3,328,160,000.00
	4	- Modul Manajemen Tranportasi	1		-
		- Modul Manajemen Template Dokumen			-
		- Modul Manajemen Gateway			-
		- Modul Manajemen Perekaman Data			-

(Sambungan Tabel 4.9)

		- Modul Manajemen Pemantauan Kinerja			-
		- Modul Manajemen Interfacing ke SIDJP			-
		- Modul Manajemen Kepegawaian			-
		- Modul Manajemen Penyimpanan & Peminjaman Berkas			-
		- Modul Manajemen Command Center & helpdesk management			-
		- Modul Command Center & helpdesk management			-
Total					Rp 60,082,049,287

IV.4.1.1.2 Rencana Pembiayaan

Untuk pembiayaan pengadaan perangkat TIK di KPDDP Makasar menggunakan dana DIPA yang telah disetujui oleh Bagian Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana DIPA tersebut 100% di tanggung oleh pemerintah.

IV.4.1.1.3. Pendapatan

Pendapatan yang akan diperoleh dengan adanya pengolahan data dan dokumen perpajakan di Makasar secara nyata tidak akan terlihat. Akan tetapi secara keseluruhan akan informasi yang akan diolah di KPDDP Makasar merupakan dalam rangka perbaikan administrasi perpajakan, sehingga nantinya akan mempermudah dalam penggalian potensi perpajakan. Untuk mendapat estimasi pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan cakupan wilayah KPDDP Makasar yaitu menggunakan pendekatan pendapatan penerimaan pajak nasional untuk :

1. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat;
2. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara
3. Kanwil DJP Papua, dan Maluku

Pendapatan penerimaan pajak secara nasional untuk cakupan wilayah KPDDP Makasar tahun 2009 sebesar Rp 7.604.250.000.000,-. Sehingga diperkirakan kenaikan tahun 2011 sebesar 20% yaitu Rp 10.961.072.858.000,-. Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil Rapimnas III, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20%. Oleh karena itu kenaikan

target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20% dimulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-12. Adapun alasan sampai tahun ke-12 bahwa perangkat TIK yang akan diinvestasikan akan habis masa pakai perangkat tersebut setelah 12 tahun (berdasarkan pemeriksaan barang dan jasa yang berlaku 12 tahun menurut aturan yang berlaku). Setelah 12 tahun perangkat tersebut masih tetap bisa digunakan apabila kondisi perangkat TIK tersebut masih bisa berjalan dengan baik.

IV.4.1.1.4. Biaya Operasional KPDDP Makasar

IV.4.1.1.4.1. Biaya Langsung

IV.4.1.1.4.1.a Biaya Tetap

(1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Untuk awal dalam pembangunan KPDDP Makasar ini perlu dilakukan pengadaan barang dan jasa TIK di KPDDP Makasar, maka perangkat TIK termasuk dalam komponen biaya di awal Tahun 1. Sementara pada tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 12 tidak ada lagi pembelian atau pengadaan perangkat TIK sebesar Rp. 0 ,-

Total biaya perangkat TIK yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 60,082,049,287,-. tidak termasuk Pajak.

(2) Pegawai *Outsource*

Dalam kegiatan ini direncanakan sebanyak 243 orang. Adapun perkiraan dana yang akan dianggarkan sebesar Rp 4.937.911.875,-. Untuk kenaikan gaji pegawai *outsource* diasumsikan 5% per tahun. Adapun komponen biayanya sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai *Outsource* dan tunjangan

- a. Gaji (per tahun) Rp 4.428.675.000,-
- b. Tunjangan (per tahun) Rp 509.236.875,-

Tabel 4.10. Perkiraan Biaya Pegawai *outsource*

Biaya Pegawai <i>Outsource</i>		Jumlah
1)	Gaji Pegawai <i>Outsource</i>	
	Pemilahan Dokumen	30
	Pemindaian Dokumen	8
	<i>Quality control</i>	10
	<i>Document review</i>	10
	<i>Data entry</i>	
	<i>Completion</i>	150

(Sambungan Tabel 4.10)

	<i>Supervisor</i>	25
	Pengemasan Ulang	10
	- Jumlah Pegawai	243
	- Gaji rata-rata / orang / bulan	1,518,750
	Jumlah gaji / tahun	4,428,675,000
2)	Tunjangan	
	a) Uang makan / orang / hari	10,000
	Biaya uang makan / tahun	2,430,000
	c) Kesehatan / orang / bulan	15,000
	Biaya kesehatan / tahun	3,645,000
	d) Pakaian dinas 2 (dua) stel / orang / tahun	400,000
	Biaya pakaian dinas/tahun	97,200,000
	e) JAMSOSTEK 10% x total gaji Crew.	36,905,625
	f) Tunjangan Hari Raya (1 x gaji) dan jasa produksi	369,056,250
	Jumlah Tunjangan / Tahun	509,236,875
Jumlah Total Biaya Pegawai <i>Outsource</i> + Tunjangan		4,937,911,875

(3) Biaya Depresiasi/ Penyusutan

Depresiasi perangkat TIK dihitung dengan metode *Straight Line*, dengan jumlah depresiasi sebagai berikut :

JUMLAH Perangkat TIK (unit)	1
HARGA PER UNIT	60,082,049,287
TOTAL HARGA PEROLEHAN	60,082,049,287
NILAI SISA	6,008,204,929
UMUR EKONOMIS (tahun)	12
Nilai Depresiasi	4,506,153,697

(4) Biaya *Repairs, Maintenance*

Agar seluruh perangkat TIK dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan perkiraan biaya pemeliharaan perangkat TIK baik Hardware maupun software yaitu Rp 9.012.307.393 atau 15% dari harga investasi TIK yang dikeluarkan. Angka 15%

diperoleh dari angka yang dilelangkan untuk jasa pemeliharaan TIK di Direktorat Jenderal Pajak (asumsi kenaikan akibat inflasi dan faktor-faktor lain 15% per tahun).

(5) Biaya Kemasan / Box SPT

Kemasan/*Box* SPT digunakan untuk mengangkut SPT dari KPP ke KPDDP Makasar. Pengadaan kemasan tersebut dilakukan di KPDDP, dimana untuk satu kemasan mampu menampung 3000 lembar SPT dengan berat 20 kg. Adapun biaya per satu kemasan saat ini sebesar Rp 27.500,-. Jumlah yang dibutuhkan untuk mengangkut SPT tersebut sebanyak 1.564 kemasan dengan total biaya sebesar Rp 43.013.098,- selama setahun. Adapun kenaikan harga per satu kemasan sebesar 10% berdasarkan asumsi akibat inflasi per tahun.

IV.4.1.1.4.1.b Biaya Variabel

(1) Biaya Pengambilan/Pengiriman Kemasan

Agar operasional KPDDP Makasar dapat berjalan, maka dibutuhkan transportasi yang dapat mengambil/mengirim kemasan dari KPP ke KPDDP Makasar. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam transportasi Pengambilan/Pengiriman kemasan ke KPDDP di rencanakan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Sewa kendaraan Mobil

Untuk sewa kendaraan mobil dibutuhkan untuk pengambilan kemasan dari KPP Pratama yang berada satu lokasi atau jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari KPDDP Makasar. Adapun perkiraan biaya sewa kendaraan mobil sebanyak 2 unit sebesar Rp.6.000.000,-. Sehingga dalam setahun dibutuhkan Rp. 72.000.000,-. Adapun kenaikan dari biaya pengambilan dari KPP ke KPDDP sebesar 10% per tahun berdasarkan asumsi kenaikan inflasi setiap tahun.

b. Menggunakan jasa kurir

Untuk jasa kurir dalam penulisan ini menggunakan informasi data dari PT. JNE. Adapun perkiraan total biaya yang dibutuhkan selama setahun sebesar Rp 637.292.452,- selama setahun. Adapun kenaikan dari biaya pengiriman dari KPP ke KPDDP sebesar 10% per tahun berdasarkan asumsi kenaikan inflasi setiap tahun.

IV.4.1.1.5. Bunga

Karena dana pengadaan pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan diMakasar menggunakan 100% DIPA yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak dihitung bunga pinjaman dalam evaluasi proyek ini.

IV.4.1.1.6. Pajak

Pajak penghasilan dari pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar tidak dihitung.

IV.4.1.1.7. Kerangka Analisa

Untuk menilai kelayakan proyek telah dibuat proyeksi keuangan yang meliputi proyeksi laba rugi, dan arus kas. Masa manfaat diproyeksikan 12 tahun untuk Perangkat TIK KPDDP Makasar, dengan nilai sisa pada akhir proyek sebesar 10 % dari harga perolehan.

(1) Proyeksi Laba Rugi

Perkiraan laba rugi selengkapnya disajikan pada lampiran *Centralized Scan and Capture Model*. Pada tahun pertama operasional KPDDP Makasar total pendapatan adalah sebesar Rp. 10.961.072.858.530,-. Sedangkan biaya operasionalnya sebesar Rp 87.384.207.542,-. Sehingga laba sebelum pajak dan sesudah pajak dicapai sebesar Rp 10.873.688.649.988. Sejak dioperasikan mulai tahun ke-1 sampai dengan tahun ke -12 perkiraan laba atau pendapatan penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 81.812.749.961.000,-.

(2) Arus Kas

Perkiraan arus kas selengkapnya akan di sajikan pada lampiran *Centralized Scan and Capture Modul*. Tahun pertama operasional KPDDP Makasar tahun 2012 maka selisih hasil dari perkiraan pendapatan pajak tahun 2011 dengan biaya yang di dikeluarkan sebesar Rp 10.873.688.649.988,-. Untuk biaya operasional KPDDP Makasar nantinya diperkirakan sebesar Rp 87.350.728.000,- dan beban biaya administrasi dan umum sebesar Rp 33.480.000 yang digunakan untu perjalanan dinas 3 orang pegawai ke KPP dalam rangka sosialisasi tentang pengolahan data dan dokumen perpajakan. Pada tahun pertama perkiraan total beban biaya kantor yang dikeluarkan lebih besar yaitu Rp 87.384.208.000,- dari tahun ke dua sampai dengan tahun ke 12. Selanjutnya tahun ke-2 Rp 28.977.805.000,- sampai dengan Tahun ke 12 beban biaya Rp 77.989.681.000,-.

IV.4.2.1. Federated Scan and Centralized Capture Model

Berdasarkan bahwa konsep proses bisnis federated *scan and centralized capture* yang akan di kembangkan untuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar adalah dimana SPT yang disampaikan wajib pajak (WP) diterima di KPP (*Service Center*). Selanjutnya SPT dimasukkan kedalam satu kemasan. Setelah kemasan tersebut penuh maka kemasan tersebut di kirim ke KPDDP Makasar (*Area*). Di KPDDP Makasar dilakukan proses pemilahan SPT dan proses pemindaian dokumen (*scanning*), serta penyimpanan dokumen SPT. Sedangkan proses *data entry (capturing)* dilakukan di PPDDP (*Head quarter*). Setelah dokumen SPT menjadi *image* dan data yang lengkap di PPDDP, maka selanjutnya data dan *image* SPT di *transfer* ke *database* Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP). Setelah data dan *image* SPT diterima di KPDJP.

IV.4.2.1.1 Biaya Proyek

Perkiraan kebutuhan investasi perangkat TIK yang akan di dinstalasi di KPDDP Makasar tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1. Harga Perangkat TIK Rp 28,518,461,359,-
(asumsi harga 1 US \$ = Rp 9.006)

Tabel 4.11. Perkiraan Biaya Perangkat TIK

No	Type	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Harga Satuan (Rupiah)	Total Harga (Rupiah)
I	Hardware				
	A	Server			
	1	Aplication Server	12	Rp 141,574,320.00	Rp 1,698,891,840.00
	2	Database Server	2	Rp 790,006,320.00	Rp 1,580,012,640.00
	3	Rack 42 U	5	Rp 70,697,100.00	Rp 353,485,500.00
	4	Rack 24 U	0	Rp 29,809,860.00	-
		Total			Rp 3,632,389,980.00
	B	Workstation			
	5	Komputer Personal untuk manajemen	60	Rp 11,887,920.00	Rp 713,275,200.00
	6	komputer Personal untuk <i>Data entry</i>	68	Rp 11,212,470.00	Rp 762,447,960.00
	7	Windows Server CAL OLP user CAL	128	Rp 258,382.14	Rp 33,072,913.92
	8	Windows Server STD OLP	12	Rp 6,578,792.94	Rp 78,945,515.28
	9	Management Desktop	140	Rp 368,435.46	Rp 51,580,964.40
	10	Management Server	12	Rp 5,226,091.74	Rp 62,713,100.88

(Sambungan Tabel 4.11)

	11	Management Printer & Network	2	Rp 540,360.00	Rp 1,080,720.00
	12	CRM Professional CAL	10	Rp 8,693,671.92	Rp 86,936,719.20
	13	CRM Professional Server OLP	1	Rp 18,319,464.84	Rp 18,319,464.84
	14	SQL server Enterprise edition	1	Rp 77,870,018.76	Rp 77,870,018.76
	15	SQL CAL OLP user CAL	10	Rp 1,409,348.94	Rp 14,093,489.40
		Total			Rp 1,900,336,066.68
C		Notebook			
	16	Notebook PC with Intel Centrino Duo Technology	10	Rp 14,292,522.00	Rp 142,925,220.00
		Total			Rp 142,925,220.00
D		Scanner			
	17	High Speed Scanner:	6	Rp 711,428,970.00	Rp 4,268,573,820.00
	18	Medium Speed Scanner	2	Rp 383,016,174.00	Rp 766,032,348.00
	19	Flatbed Scanner:	2	Rp 73,263,810.00	Rp 146,527,620.00
	20	Handheld Barcode Scanner – RAM based	10	Rp 14,859,900.00	Rp 148,599,000.00
	21	Handheld Barcode Reader - Cordless	10	Rp 10,491,990.00	Rp 104,919,900.00
	22	Handheld Barcode Reader Cord	17	Rp 1,801,200.00	Rp 30,620,400.00
		Total			Rp 5,465,273,088.00
E		Backup System Device			
	23	Eksternal DVD Writer	4	Rp 670,000.00	Rp 2,680,000.00
	24	DVD R/W 4,7 gbyte	1000	Rp 9,006.00	Rp 9,006,000.00
		Total			Rp 11,686,000.00
F		Media Komunikasi dan Network			
	25	Core Switch	1	Rp 4,506,557,370.00	Rp 4,506,557,370.00
	26	Access Switch	6	Rp 819,996,300.00	Rp 4,919,977,800.00
	27	Router	1	Rp 125,273,460.00	Rp 125,273,460.00
	28	Access Control & Manager	1	Rp 702,738,180.00	Rp 702,738,180.00
	29	Access Control	1		
	29	Installation Cabling (UTP)	140	Rp 1,125,750.00	Rp 157,605,000.00
	30	Kabel Fiber (6 Lantai)	1	Rp 126,084,000.00	Rp 126,084,000.00
		Wireless Access Point	17	Rp 10,830,615.60	Rp 184,120,465.20
	31	Accelerator & load balancer	2	Rp 722,672,961.00	Rp 1,445,345,922.00
	32	Wireless LAN Controller + Manager	1	Rp 124,392,673.20	Rp 124,392,673.20
		Total			Rp 12,292,094,870.40
G		Penyimpanan Data dan Gambar			
	33	Storage 20 TB	0	Rp 12,313,921,812.00	-
	34	SAN Switch	0	Rp 316,723,008.00	-
	35	Storage 1 TB	1	Rp 5,160,438.00	Rp 5,160,438.00
		Total			Rp 5,160,438.00

(Sambungan Tabel 4.11)

	H	Peralatan Keamanan Gedung				
	36	Printer Laser Jet	10	Rp 5,727,816.00	Rp 57,278,160.00	
		Barcode Printer + Label		Rp 21,614,400.00	Rp 43,228,800.00	
	37	Barcode	2			
		Label	100	Rp 40,000.00	Rp 4,000,000.00	
	38	Mesin Pemotong Kertas	1	Rp 127,272,000.00	Rp 127,272,000.00	
	39	Mesin Multifunction	2	Rp 123,490,272.00	Rp 246,980,544.00	
	40	TV Monitor LCD 40" + Bracket	7	Rp 23,500,000.00	Rp 164,500,000.00	
	41	FingerPrint	15	Rp 22,727,000.00	Rp 340,905,000.00	
	42	CCTV for security	1	Rp 1,063,636,000.00	Rp 1,063,636,000.00	
		- FIXED OUTDOOR CAMERA + Housing	4			
		- Fix Dome Camera	24			
		- Moving Dome Camera	8			
		- Digital Video Recorder	2			
		- Monitor LCD	2			
		- Keyboard Digital Joystick	1			
	43	Raised Floor	1	Rp 29,872,902.00	Rp 29,872,902.00	
		ongkos raised floor	1	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00	
	44	Printer DotMatrix	5	Rp 2,908,938.00	Rp 14,544,690.00	
		Total			Rp 2,100,218,096.00	
II	Software					
		Database Engine				
	1	Database License	2	Rp 430,486,800.00	Rp 860,973,600.00	
		Digitalisasi & Document Management				
	2	Aplikasi Document Management (licenses)	100	Rp 2,107,404,000.00	Rp 2,107,404,000.00	
		- Administrator aplikasi (licenses)	1			
		- Developer aplikasi (Licenses)	1			
	3	Input Management Solution (300 licenses)	0	Rp 12,248,898,492.00	-	
		Total			Rp 2,107,404,000.00	
		Aplikasi Administrasi Kantor Besar Pengolahan Data dan Dokumen		Rp 3,328,160,000.00	-	
	4	- Modul Manajemen Transportasi	0		-	
		- Modul Manajemen Template Dokumen			-	
		- Modul Manajemen Gateway			-	
		- Modul Manajemen Perekaman Data			-	
		- Modul Manajemen Pemantauan Kinerja			-	
		- Modul Manajemen Interfacing ke SIDJP			-	
		- Modul Manajemen Kepegawaian			-	

(Sambungan Tabel 4.11)

		- Modul Manajemen Penyimpanan & Peminjaman Berkas			-
		- Modul Manajemen Command Center & helpdesk management			-
		- Modul Command Center & helpdesk management			-
		Total			Rp 28,518,461,359.08

IV.4.2.1.2 Rencana Pembiayaan

Untuk pembiayaan pengadaan perangkat TIK di KPDDP Makasar menggunakan dana DIPA yang telah disetujui oleh Bagian Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana DIPA tersebut 100% di tanggung oleh pemerintah.

IV.4.2.1.3 Pendapatan

Pendapatan yang akan diperoleh dengan adanya pengolahan data dan dokumen perpajakan di Makasar secara nyata tidak akan terlihat. Akan tetapi secara keseluruhan akan informasi yang akan diolah di KPDDP Makasar merupakan dalam rangka perbaikan administrasi perpajakan, sehingga nantinya akan mempermudah dalam penggalian potensi perpajakan. Untuk mendapat estimasi pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan cakupan wilayah KPDDP Makasar yaitu menggunakan pendekatan pendapatan penerimaan pajak nasional untuk :

1. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat;
2. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara
3. Kanwil DJP Papua, dan Maluku

Pendapatan penerimaan pajak secara nasional untuk cakupan wilayah KPDDP Makasar tahun 2009 sebesar Rp 7.604.250.000.000,-. Sehingga diperkirakan kenaikan tahun 2011 sebesar 20% yaitu Rp 10.961.072.858.000,-. Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil Rapimnas III, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20%. Oleh karena itu kenaikan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20% dimulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-12. Adapun alasan sampai tahun ke-12 bahwa perangkat TIK yang akan diinvestasikan akan habis masa pakai perangkat tersebut setelah 12 tahun (berdasarkan pemeriksaan barang dan jasa yang berlaku 12 tahun menurut aturan yang berlaku). Setelah 12 tahun perangkat tersebut

masih tetap bias digunakan apabila kondisi perangkat TIK tersebut masih bisa berjalan dengan baik.

IV.4.2.1.4. Biaya Operasi KPDDP Makasar

IV.4.2.1.4.1. Biaya Langsung

IV.4.2.1.4.1.a Biaya Tetap

(1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Untuk awal dalam pembangunan KPDDP Makasar ini perlu dilakukan pengadaan barang dan jasa TIK di KPDDP Makasar, maka perangkat TIK termasuk dalam komponen biaya di awal Tahun 1. Sementara pa da tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 12 tidak ada lagi pembelian atau pengadaan perangkat TIK sebesar Rp. 0 ,-

Total biaya perangkat TIK yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 28,518,461,359,-tidak termasuk Pajak.

(2) Pegawai *Outsource*

Dalam kegiatan ini direncanakan sebanyak 68 orang. Adapun perkiraan dana yang akan dianggarkan sebesar Rp 1.381.802.500. Adapun komponen biayanya sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai *Outsource* (sudah include dalam harga pengolahan lembar SPT)
 - a. Gaji (per tahun) Rp 1.239.300.000,-
 - b. Tunjangan (per tahun) Rp 142.502.500,-

Tabel 4.12. Perkiraan biaya Pegawai *outsorce*

Biaya Pegawai <i>Outsource</i>		Jumlah
1)	Gaji Pegawai <i>Outsource</i>	
	Pemilahan Dokumen	30
	Pemindaian Dokumen	8
	<i>Quality control</i>	10
	<i>Document review</i>	10
	<i>Data entry</i>	
	<i>Completion</i>	-
	<i>Supervisor</i>	-
	Pengemasan Ulang	10

(Sambungan Tabel 4.12)

	- Jumlah Pegawai	68
	- Gaji rata-rata / orang / bulan	1,518,750
	Jumlah gaji / tahun	1,239,300,000
2)	Tunjangan	
	a) Uang makan / orang / hari	10,000
	Biaya uang makan / tahun	680,000
	c) Kesehatan / orang / bulan	15,000
	Biaya kesehatan / tahun	1,020,000
	d) Pakaian dinas 2 (dua) stel / orang / tahun	400,000
	Biaya pakaian dinas/tahun	27,200,000
	e) JAMSOSTEK 10% x total gaji	10,327,500
	f) Tunjangan Hari Raya (1 x gaji) dan jasa produksi	103,275,000
	Jumlah Tunjangan / Tahun	142,502,500
Jumlah Total Biaya Pegawai <i>Outsource</i> + Tunjangan		1,381,802,500

(3) Biaya Depresiasi/ Penyusutan

Depresiasi perangkat TIK dihitung dengan metode *Straight Line*, dengan jumlah depresiasi sebagai berikut :

JUMLAH Perangkat TIK (unit)	1
HARGA PER UNIT	28,518,461,359
TOTAL HARGA PEROLEHAN	28,518,461,359
NILAI SISA	2,851,846,136
UMUR EKONOMIS (tahun)	12
Nilai Depresiasi	2,138,884,602

(4) Biaya *Repairs, Maintenance*

Agar seluruh perangkat TIK dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan perkiraan biaya pemeliharaan perangkat TIK baik Hardware maupun software yaitu Rp 4.277.769.204,- atau 15% dari harga investasi TIK yang dikeluarkan. Angka 15% diperoleh dari angka yang dilelangkan untuk jasa pemeliharaan TIK di Direktorat Jenderal Pajak (asumsi kenaikan akibat inflasi dan faktor-faktor lain 15% per tahun).

(5) Biaya Kemasan/*Box* SPT

Kemasan/*Box* SPT digunakan untuk mengangkut SPT dari KPP ke KPDDP Makasar. Pengadaan kemasan tersebut dilakukan di KPDDP, dimana untuk satu kemasan mampu menampung 3000 lembar SPT dengan berat 20 kg. Adapun biaya per satu kemasan saat ini sebesar Rp 27.500,-. Jumlah yang dibutuhkan untuk mengangkut SPT tersebut sebanyak 1.564 kemasan dengan total biaya sebesar Rp 43.013.098,- selama setahun. Adapun kenaikan harga per satu kemasan sebesar 10% berdasarkan asumsi akibat inflasi per tahun.

IV.4.2.1.4.1.b Biaya Variabel

(1) Agar operasional KPDDP Makasar dapat berjalan, maka dibutuhkan transportasi yang dapat mengambil/mengirim kemasan dari KPP ke KPDDP Makasar. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam transportasi pengambilan/pengiriman kemasan ke KPDDP di rencanakan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Sewa kendaraan Mobil

Untuk sewa kendaraan mobil dibutuhkan untuk pengambilan kemasan dari KPP Pratama yang berada satu lokasi atau jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari KPDDP Makasar. Adapun perkiraan biaya sewa kendaraan mobil sebanyak 2 unit sebesar Rp.6.000.000,-. Sehingga dalam setahun dibutuhkan Rp. 72.000.000,-. Adapun kenaikan dari biaya pengambilan dari KPP ke KPDDP sebesar 10% per tahun berdasarkan asumsi kenaikan inflasi setiap tahun.

b. Menggunakan jasa kurir

Untuk jasa kurir dalam penulisan ini menggunakan informasi data dari PT. JNE. Adapun perkiraan total biaya yang dibutuhkan selama setahun sebesar Rp 632.292.452,- selama setahun. Adapun kenaikan dari biaya pengiriman dari KPP ke KPDDP sebesar 10% per tahun berdasarkan asumsi kenaikan inflasi setiap tahun.

IV.4.2.1.5. Bunga

Karena dana pengadaan pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di Makasar menggunakan 100% DIPA yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak dihitung bunga pinjaman dalam evaluasi proyek ini.

IV.4.2.1.6. Pajak

Pajak penghasilan dari pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar tidak dihitung.

IV.4.2.1.7. Kerangka Analisa

Untuk menilai kelayakan proyek telah dibuat proyeksi keuangan yang meliputi proyeksi laba rugi, dan arus kas. Masa manfaat diproyeksikan 12 tahun untuk Perangkat TIK KPDDP Makasar, dengan nilai sisa pada akhir proyek sebesar 10 % dari harga perolehan.

(1) Proyeksi Laba Rugi

Perkiraan laba rugi selengkapnya disajikan pada lampiran *Federated Scan and Centralized Capture Model*. Pada tahun pertama operasional KPDDP Makasar perkiraan total pendapatan adalah sebesar Rp. 10.961.072.858.530,-. Sedangkan biaya operasionalnya sebesar Rp 45.162.702.955,-. Sehingga laba sebelum pajak dan sesudah pajak dicapai sebesar Rp 10.915.910.154.575,-. Sejak di operasikan mulai tahun ke-1 sampai dengan tahun ke -12 perkiraan laba atau pendapatan penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 81.843.226.308.000,-.

(2) Arus Kas

Perkiraan arus kas selengkapnya akan di sajikan pada lampiran *Federated Scan and Centralized Capture Model*. Tahun pertama operasional KPDDP Makasar tahun 2012 maka selisih hasil dari perkiraan pendapatan pajak tahun 2011 dengan biaya yang di dikeluarkan sebesar Rp 10.915.910.154.575,-. Untuk biaya operasional KPDDP Makasar nantinya diperkirakan sebesar Rp 45.129.223.000,- dan beban biaya administrasi dan umum sebesar Rp 33.480.000 yang digunakan untu perjalan dinas 3 orang pegawai ke KPP dalam rangka sosialisasi tentang pengolahan data dan dokumen perpajakan. Pada tahun pertama total beban biaya kantor yang dikeluarkan lebih besar yaitu Rp 45.162.703.000,- dari tahun ke dua sampai dengan tahun ke 12. Selanjutnya tahun ke-2 Rp 17.431.902.000,- sampai dengan Tahun ke 12 beban biaya Rp 47.513.334.000,-.

IV.4.3.1. Distributed Scan and Centralized Capture Model

Berdasarkan konsep proses bisnis *distributed scan and centralized capture* yang akan dikembangkan untuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah proses pemilahan dokumen SPT dan pemindaian dokumen (*scanning*), serta penyimpanan dokumen fisik SPT di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (*Service Center*). Sedangkan proses *data entry* dilakukan di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar (*Head*

quarter). Dimana data hasil dari *data entry* di simpan sementara di KPDDP Makasar sebelum di *transfer* ke PPDDP.

IV.4.3.1.1 Biaya Proyek

Perkiraan kebutuhan investasi perangkat TIK yang akan di instalasi di KPDDP Makasar tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1. Harga Perangkat TIK Rp 49.731.946.566,-

(asumsi harga 1 US \$ = Rp 9.006)

Tabel 4.13. Perkiraan biaya Perangkat TIK

No	Type	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Harga Satuan (Rupiah)	Total Harga (Rupiah)
I	Hardware				
	A	Server			
1		Aplication Server	12	Rp 141,574,320.00	Rp 1,698,891,840.00
2		Database Server	2	Rp 790,006,320.00	Rp 1,580,012,640.00
3		Rack 42 U	5	Rp 70,697,100.00	Rp 353,485,500.00
4		Rack 24 U	7	Rp 29,809,860.00	Rp 208,669,020.00
		Total			Rp 3,841,059,000.00
	B	Workstation			
5		Komputer Personal untuk manajemen	60	Rp 11,887,920.00	Rp 713,275,200.00
6		komputer Personal untuk <i>Data entry</i>	175	Rp 11,212,470.00	Rp 1,962,182,250.00
7		Windows Server CAL OLP user CAL	235	Rp 258,382.14	Rp 60,719,802.90
8		Windows Server STD OLP	12	Rp 6,578,792.94	Rp 78,945,515.28
9		Management Desktop	247	Rp 368,435.46	Rp 91,003,558.62
10		Management Server	17	Rp 5,226,091.74	Rp 88,843,559.58
11		Management Printer & Network	2	Rp 540,360.00	Rp 1,080,720.00
12		CRM Professional CAL	10	Rp 8,693,671.92	Rp 86,936,719.20
13		CRM Professional Server OLP	1	Rp 18,319,464.84	Rp 18,319,464.84
14		SQL server Enterprise edition	1	Rp 77,870,018.76	Rp 77,870,018.76
15		SQL CAL OLP user CAL	10	Rp 1,409,348.94	Rp 14,093,489.40
		Total			Rp 3,193,270,298.58
	C	Notebook			
16		Notebook PC with Intel Centrino Duo Technology	10	Rp 14,292,522.00	Rp 142,925,220.00
		Total			Rp 142,925,220.00
	D	Scanner			
17		High Speed Scanner:	0	Rp 711,428,970.00	-
18		Medium Speed Scanner	0	Rp 383,016,174.00	-

(Sambungan Tabel 4.13)

19	Flatbed Scanner:	0	Rp	73,263,810.00	-
20	Handheld Barcode Scanner – RAM based	0	Rp	14,859,900.00	-
21	Handheld Barcode Reader - Cordless	0	Rp	10,491,990.00	-
22	Handheld Barcode Reader Cord	0	Rp	1,801,200.00	-
	Total				-
E	Backup System Device				
23	Eksternal DVD Writer	4	Rp	670,000.00	Rp 2,680,000.00
24	DVD R/W 4,7 gbyte	1000	Rp	9,006.00	Rp 9,006,000.00
	Total				Rp 11,686,000.00
F	Media Komunikasi dan Network				
25	Core Switch	1	Rp	4,506,557,370.00	Rp 4,506,557,370.00
26	Access Switch	6	Rp	819,996,300.00	Rp 4,919,977,800.00
27	Router	1	Rp	125,273,460.00	Rp 125,273,460.00
28	Access Control & Manager Access Control	1	Rp	702,738,180.00	Rp 702,738,180.00
29	Installation Cabling (UTP)	247	Rp	1,125,750.00	Rp 278,060,250.00
30	Kabel Fiber (6 Lantai)	1	Rp	126,084,000.00	Rp 126,084,000.00
	Wireless Access Point	17	Rp	10,830,615.60	Rp 184,120,465.20
31	Accelerator & load balancer	2	Rp	722,672,961.00	Rp 1,445,345,922.00
32	Wireless LAN Controller + Manager	1	Rp	124,392,673.20	Rp 124,392,673.20
	Total				Rp 12,412,550,120.40
G	Penyimpanan Data dan Gambar				
33	Storage 20 TB	1	Rp	12,313,921,812.00	Rp 12,313,921,812.00
34	SAN Switch	2	Rp	316,723,008.00	Rp 633,446,016.00
35	Storage 1 TB	0	Rp	5,160,438.00	-
	Total				Rp 12,947,367,828.00
H	Peralatan Keamanan Gedung				
36	Printer Laser Jet	17	Rp	5,727,816.00	Rp 97,372,872.00
37	Barcode Printer + Label Barcode Label	0	Rp	21,614,400.00	-
		0	Rp	40,000.00	-
38	Mesin Pemetong Kertas	0	Rp	127,272,000.00	-
39	Mesin Multifunction	2	Rp	123,490,272.00	Rp 246,980,544.00
40	TV Monitor LCD 40" + Bracket	7	Rp	23,500,000.00	Rp 164,500,000.00
41	FingerPrint	15	Rp	22,727,000.00	Rp 340,905,000.00
42	CCTV for security	1	Rp	1,063,636,000.00	Rp 1,063,636,000.00
	- FIXED OUTDOOR CAMERA + Housing	4			
	- Fix Dome Camera	24			
	- Moving Dome Camera	8			
	- Digital Video Recorder	2			
	- Monitor LCD	2			
	- Keyboard Digital Joystick	1			
43	Raised Floor	1	Rp	29,872,902.00	Rp 29,872,902.00
	ongkos raised floor	1	Rp	8,000,000.00	Rp 8,000,000.00
44	Printer DotMatrix	5	Rp	2,908,938.00	Rp 14,544,690.00
	Total				Rp 1,965,812,008.00

(Sambungan Tabel 4.13)

II	Software	Database Engine				
		1	Database License	2	Rp 430,486,800.00	Rp 860,973,600.00
		2	Digitalisasi & Document Management			
			Aplikasi Document Management (licenses)	100	Rp 2,107,404,000.00	Rp 2,107,404,000.00
			- Administrator aplikasi (licenses)	1		
			- Developer aplikasi (Licenses)	1		
		3	Input Management Solution (licenses)	1	Rp 12,248,898,492.00	Rp 12,248,898,492.00
			Total			Rp 14,356,302,492.00
			Aplikasi Administrasi Kantor Besar Pengolahan Data dan Dokumen		Rp 3,328,160,000.00	-
		4		0		
	- Modul Manajemen Transportasi			-		
	- Modul Manajemen Template Dokumen			-		
	- Modul Manajemen Gateway			-		
	- Modul Manajemen Perakaman Data			-		
	- Modul Manajemen Pemantauan Kinerja			-		
	- Modul Manajemen Interfacing ke SIDJP			-		
	- Modul Manajemen Kepegawaian			-		
	- Modul Manajemen Penyimpanan & Peminjaman Berkas			-		
	- Modul Manajemen Command Center & helpdesk management			-		
	- Modul Command Center & helpdesk management			-		
Total					Rp 49,731,946,566.98	

IV.4.3.1.2 Rencana Pembiayaan

Untuk pembiayaan pengadaan perangkat TIK di KPDDP Makasar menggunakan dana DIPA yang telah disetujui oleh Bagian Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana DIPA tersebut 100% di tanggung oleh pemerintah.

IV.4.3.1.3 Pendapatan

Pendapatan yang akan diperoleh dengan adanya pengolahan data dan dokumen perpajakan di Makasar secara nyata tidak akan terlihat. Akan tetapi secara keseluruhan akan informasi yang akan diolah di KPDDP Makasar merupakan dalam rangka perbaikan administrasi perpajakan, sehingga nantinya akan mempermudah dalam penggalian potensi perpajakan. Untuk mendapat estimasi pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan cakupan

wilayah KPDDP Makasar yaitu menggunakan pendekatan pendapatan penerimaan pajak nasional untuk :

1. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat;
2. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara
3. Kanwil DJP Papua, dan Maluku

Pendapatan penerimaan pajak secara nasional untuk cakupan wilayah KPDDP Makasar tahun 2009 sebesar Rp 7.604.250.000.000,-. Sehingga diperkirakan kenaikan tahun 2011 sebesar 20% yaitu Rp 10.961.072.858.530,-. Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil Rapimnas III, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20%. Oleh karena itu kenaikan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20% dimulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-12. Adapun alasan sampai tahun ke-12 bahwa perangkat TIK yang akan diinvestasikan akan habis masa pakai perangkat tersebut setelah 12 tahun (berdasarkan pemeriksaan barang dan jasa yang berlaku 12 tahun menurut aturan yang berlaku). Setelah 12 tahun perangkat tersebut masih tetap bias digunakan apabila kondisi perangkat TIK tersebut masih bisa berjalan dengan baik.

IV.4.3.1.4. Biaya Operasi KPDDP Makasar

IV.4.3.1.4.1. Biaya Langsung

IV.4.3.1.4.1.a Biaya Tetap

(1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Untuk awal dalam pembangunan KPDDP Makasar ini perlu dilakukan pengadaan barang dan jasa TIK di KPDDP Makasar, maka perangkat TIK termasuk dalam komponen biaya di awal Tahun 1. Sementara pa da tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 12 tidak ada lagi pembeilian atau pengadaan perangkat TIK sebesar Rp. 0 ,-

Perkiraan total biaya perangkat TIK yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 49.731.946.566,- tidak termasuk Pajak.

(2) Pegawai *Outsource*

Dalam kegiatan ini direncanakan sebanyak 175 orang. Adapun perkiraan dana yang akan dianggarkan sebesar Rp 3.556.109.375. Sedangkan untuk menghitung gaji pegawai *outsorce* diambil dari total jumlah lembar SPT yang akan di proses di

KPDDP Makasar dikalikan harga per lembar SPT yang diolah. Adapun komponen biayanya sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai *Outsource* (sudah include dalam harga pengolahan lembar SPT)

a. Gaji (per tahun) Rp 3.189.375.000,-

b. Tunjangan (per tahun) Rp 366.734.375,-

Tabel 4.14. Perkiraan biaya Pegawai *outsorce*

Biaya Pegawai <i>Outsource</i>		Jumlah
1)	Gaji Pegawai <i>Outsource</i>	
	Pemilahan Dokumen	-
	Pemindaian Dokumen	-
	<i>Quality control</i>	-
	<i>Document review</i>	-
	<i>Data entry</i>	-
	<i>Completion</i>	150
	<i>Supervisor</i>	25
	Pengemasan Ulang	-
	- Jumlah Pegawai	175
	- Gaji rata-rata / orang / bulan	1,518,750
	Jumlah gaji / tahun	3,189,375,000
2)	Tunjangan	
	a) Uang makan / orang / hari	10,000
	Biaya uang makan / tahun	1,750,000
	c) Kesehatan / orang / bulan	15,000
	Biaya kesehatan / tahun	2,625,000
	d) Pakaian dinas 2 (dua) stel / orang / tahun	400,000
	Biaya pakaian dinas/tahun	70,000,000
	e) JAMSOSTEK 10% x total gaji	26,578,125
	f) Tunjangan Hari Raya (1 x gaji) dan jasa produksi	265,781,250
	Jumlah Tunjangan / Tahun	366,734,375
Jumlah Total Biaya Pegawai <i>Outsource</i> + Tunjangan		3,556,109,375

(3) Biaya Depresiasi/ Penyusutan

Depresiasi perangkat TIK dihitung dengan metode *Straight Line*, dengan jumlah depresiasi sebagai berikut :

JUMLAH Perangkat TIK (unit)	1
HARGA PER UNIT	49,731,946,567
TOTAL HARGA PEROLEHAN	49,731,946,567
NILAI SISA	4,973,194,657
UMUR EKONOMIS (tahun)	12
Nilai Depresiasi	3,729,895,993

IV.4.3.1.4.1.b Biaya Variabel

(1) Biaya Pengambilan/Pengiriman Kemasan

Agar operasional KPDDP Makasar dapat berjalan, maka dibutuhkan transportasi yang dapat mengambil/mengirim kemasan dari KPP ke KPDDP Makasar. Adapun perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam transportasi Pengambilan/Pengiriman kemasan ke KPDDP tidak dilakukan, karena proses hanya melakukan proses perekaman data saja.

(2) Biaya *Repairs, Maintenance*

Agar seluruh perangkat TIK dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan perkiraan biaya pemeliharaan perangkat TIK baik Hardware maupun software yaitu Rp 7.459.791.985 atau 15% dari harga investasi TIK yang dikeluarkan. Angka 15% diperoleh dari angka yang dilelangkan untuk jasa pemeliharaan TIK di Direktorat Jenderal Pajak (asumsi kenaikan akibat inflasi dan faktor-faktor lain 15% per tahun).

(3) Biaya Kemasan / Box SPT

Kemasan / Box SPT digunakan untuk mengangkut SPT dari KPP ke KPDDP Makasar. Pengadaan kemasan tersebut dilakukan di KPDDP, dimana untuk satu kemasan mampu menampung 3000 lembar SPT dengan berat 20 kg. Adapun perkiraan biaya per satu kemasan untuk *Distributed Scan and Centralized Capture Model* tidak dilakukan. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan Rp. 0,- .

IV.4.3.1.5. Bunga

Karena dana pengadaan pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan diMakasar menggunakan 100% DIPA yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak dihitung bunga pinjaman dalam evaluasi proyek ini.

IV.4.3.1.6. Pajak

Pajak penghasilan dari pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar tidak dihitung.

IV.4.3.1.7. Kerangka Analisa

Untuk menilai kelayakan proyek telah dibuat proyeksi keuangan yang meliputi proyeksi laba rugi, dan arus kas. Masa manfaat diproyeksikan 12 tahun untuk Perangkat TIK KPDDP Makasar, dengan nilai sisa pada akhir proyek sebesar 10 % dari harga perolehan.

(1) Proyeksi Laba Rugi

Perkiraan laba rugi selengkapnya disajikan pada lampiran *Distributed Scan and Centralized Capture Model*. Pada tahun pertama operasional KPDDP Makasar total pendapatan adalah sebesar Rp. 10.961.072.858.530,-. Sedangkan biaya operasionalnya sebesar Rp 72.571.223.660,-. Sehingga laba sebelum pajak dan sesudah pajak dicapai sebesar Rp 10.888.501.633.870,-. Sejak di operasikan mulai tahun ke-1 sampai dengan tahun ke -12 perkiraan laba atau pendapatan penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 81.825.258.894,- .

(2) Arus Kas

Perkiraan arus kas selengkapnya akan di sajikan pada lampiran *Distributed Scan and Centralized Capture Model*. Tahun pertama operasional KPDDP Makasar tahun 2012 maka selisih hasil dari perkiraan pendapatan pajak tahun 2011 dengan biaya yang di keluarkan sebesar Rp 10.880.385.850.000,-. Untuk biaya operasional KPDDP Makasar nantinya diperkirakan sebesar Rp 72.537.744.000,- dan beban biaya administrasi dan umum sebesar Rp 33.480.000 yang digunakan untu perjalan dinas 3 orang pegawai ke KPP dalam rangka sosialisasi tentang pengolahan data dan dokumen perpajakan. Pada tahun pertama total beban biaya kantor yang dikeluarkan lebih besar yaitu Rp 72.571.224.000,- dari tahun ke dua sampai dengan tahun ke 12. Selanjutnya tahun ke-2 Rp 24.137.725.000,- sampai dengan Tahun ke 12 beban biaya Rp 65.480.748.000,-.

IV.4.4.1. *Distributed Scan and Federated Capture Model*

Berdasarkan konsep proses bisnis *distributed scan and federated capture* yang akan dikembangkan untuk Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan adalah proses pemilahan dokumen SPT dan proses pemindaian dokumen (*scanning*), serta penyimpanan fisik SPT dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (*Service Center*). Sedangkan proses *data entry* dilakukan di Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makasar (*Area*). Sementara data hasil *data entry* dan *image* SPT tersimpan di *database* PPDDP (*Head quarter*). PPDDP hanya sebagai tempat penampungan data dan *image* SPT sebelum data dan *image* SPT tersebut ditransfer ke *database* SIDJP di KPDJP.

IV.4.4.1.1 Biaya Proyek

Perkiraan kebutuhan investasi perangkat TIK yang akan di instalasi di KPDDP Makasar tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1. Harga Perangkat TIK Rp 36,836,183,118,-
(asumsi harga 1 US \$ = Rp 9.006)

Tabel 4.15. Perkiraan biaya Perangkat TIK

No	Type	Jenis Barang/Jasa	Jumlah	Harga Satuan (Rupiah)	Total Harga (Rupiah)
I	Hardware				
	A	Server			
	1	Aplication Server	12	Rp 141,574,320.00	Rp 1,698,891,840.00
	2	Database Server	2	Rp 790,006,320.00	Rp 1,580,012,640.00
	3	Rack 42 U	5	Rp 70,697,100.00	Rp 353,485,500.00
	4	Rack 24 U	7	Rp 29,809,860.00	Rp 208,669,020.00
		Total			Rp 3,841,059,000.00
	B	Workstation			
	5	Komputer Personal untuk manajemen	60	Rp 11,887,920.00	Rp 713,275,200.00
	6	komputer Personal untuk <i>Data entry</i>	175	Rp 11,212,470.00	Rp 1,962,182,250.00
	7	Windows Server CAL OLP user CAL	235	Rp 258,382.14	Rp 60,719,802.90
	8	Windows Server STD OLP	12	Rp 6,578,792.94	Rp 78,945,515.28
	9	Management Desktop	247	Rp 368,435.46	Rp 91,003,558.62
	10	Management Server	17	Rp 5,226,091.74	Rp 88,843,559.58
	11	Management Printer & Network	2	Rp 540,360.00	Rp 1,080,720.00
	12	CRM Professional CAL	10	Rp 8,693,671.92	Rp 86,936,719.20

(Sambungan Tabel 4.15)

	13	CRM Professional Server OLP	1	Rp 18,319,464.84	Rp 18,319,464.84
	14	SQL server Enterprise edition	1	Rp 77,870,018.76	Rp 77,870,018.76
	15	SQL CAL OLP user CAL	10	Rp 1,409,348.94	Rp 14,093,489.40
		Total			Rp 3,193,270,298.58
C		Notebook			
	16	Notebook PC with Intel Centrino Duo Technology	10	Rp 14,292,522.00	Rp 142,925,220.00
		Total			Rp 142,925,220.00
D		Scanner			
	17	High Speed Scanner:	0	Rp 711,428,970.00	-
	18	Medium Speed Scanner	0	Rp 383,016,174.00	-
	19	Flatbed Scanner:	0	Rp 73,263,810.00	-
	20	Handheld Barcode Scanner – RAM based	0	Rp 14,859,900.00	-
	21	Handheld Barcode Reader - Cordless	0	Rp 10,491,990.00	-
	22	Handheld Barcode Reader Cord	0	Rp 1,801,200.00	-
		Total			-
E		Backup System Device			
	23	Eksternal DVD Writer	4	Rp 670,000.00	Rp 2,680,000.00
	24	DVD R/W 4,7 gbyte	1000	Rp 9,006.00	Rp 9,006,000.00
		Total			Rp 11,686,000.00
F		Media Komunikasi dan Network			
	25	Core Switch	1	Rp 4,506,557,370.00	Rp 4,506,557,370.00
	26	Access Switch	6	Rp 819,996,300.00	Rp 4,919,977,800.00
	27	Router	1	Rp 125,273,460.00	Rp 125,273,460.00
	28	Access Control & Manager Access Control	1	Rp 702,738,180.00	Rp 702,738,180.00
	29	Installation Cabling (UTP)	247	Rp 1,125,750.00	Rp 278,060,250.00
	30	Kabel Fiber (6 Lantai)	1	Rp 126,084,000.00	Rp 126,084,000.00
	31	Wireless Access Point	17	Rp 10,830,615.60	Rp 184,120,465.20
	32	Accelerator & load balancer	2	Rp 722,672,961.00	Rp 1,445,345,922.00
	32	Wireless LAN Controller + Manager	1	Rp 124,392,673.20	Rp 124,392,673.20
		Total			Rp 12,412,550,120.40
G		Penyimpanan Data dan Gambar			
	33	Storage 20 TB	0	Rp 12,313,921,812.00	-
	34	SAN Switch	0	Rp 316,723,008.00	-
	35	Storage 1 TB	10	Rp 5,160,438.00	Rp 51,604,380.00
		Total			Rp 51,604,380.00
H		Peralatan Keamanan Gedung			

(Sambungan Tabel 4.15)

	36	Printer Laser Jet	17	Rp 5,727,816.00	Rp 97,372,872.00
		Barcode Printer + Label		Rp 21,614,400.00	-
	37	Barcode Label	0	Rp 40,000.00	-
	38	Mesin Pemotong Kertas	0	Rp 127,272,000.00	-
	39	Mesin Multifunction	2	Rp 123,490,272.00	Rp 246,980,544.00
	40	TV Monitor LCD 40" + Bracket	7	Rp 23,500,000.00	Rp 164,500,000.00
	41	FingerPrint	15	Rp 22,727,000.00	Rp 340,905,000.00
	42	CCTV for security	1	Rp 1,063,636,000.00	Rp 1,063,636,000.00
		- FIXED OUTDOOR CAMERA + Housing	4		
		- Fix Dome Camera	24		
		- Moving Dome Camera	8		
		- Digital Video Recorder	2		
		- Monitor LCD	2		
		- Keyboard Digital Joystick	1		
	43	Raised Floor	1	Rp 29,872,902.00	Rp 29,872,902.00
		ongkos raised floor	1	Rp 8,000,000.00	Rp 8,000,000.00
	44	Printer DotMatrix	5	Rp 2,908,938.00	Rp 14,544,690.00
		Total			Rp 1,965,812,008.00
II	Software				
		Database Engine			
	1	Database License	2	Rp 430,486,800.00	Rp 860,973,600.00
		Digitalisasi & Document Management			
	2	Aplikasi Document Management (licenses)	100	Rp 2,107,404,000.00	Rp 2,107,404,000.00
		- Administrator aplikasi (licenses)	1		
		- Developer aplikasi (Licenses)	1		
	3	Input Management Solution (licenses)	1	Rp 12,248,898,492.00	Rp 12,248,898,492.00
		Total			Rp 14,356,302,492.00
		Aplikasi Administrasi Kantor Besar Pengolahan Data dan Dokumen		Rp 3,328,160,000.00	-
	4	- Modul Manajemen Transportasi	0		-
		- Modul Manajemen Template Dokumen			-
		- Modul Manajemen Gateway			-
		- Modul Manajemen Perekaman Data			-
		- Modul Manajemen Pemantauan Kinerja			-
		- Modul Manajemen Interfacing ke SIDJP			-
		- Modul Manajemen Kepegawaian			-

(Sambungan Tabel 4.15)

	- Modul Manajemen Penyimpanan & Peminjaman Berkas			-
	- Modul Manajemen Command Center & helpdesk management			-
	- Modul Command Center & helpdesk management			-
Total				Rp 36,836,183,118.98

IV.4.4.1.2 Rencana Pembiayaan

Untuk pembiayaan pengadaan perangkat TIK di KPDDP Makasar menggunakan dana DIPA yang telah disetujui oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana DIPA tersebut 100% ditanggung oleh pemerintah.

IV.4.4.1.3 Pendapatan

Pendapatan yang akan diperoleh dengan adanya pengolahan data dan dokumen perpajakan di Makasar secara nyata tidak akan terlihat. Akan tetapi secara keseluruhan akan informasi yang akan diolah di KPDDP Makasar merupakan dalam rangka perbaikan administrasi perpajakan, sehingga nantinya akan mempermudah dalam penggalan potensi perpajakan. Untuk mendapat estimasi pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan cakupan wilayah KPDDP Makasar yaitu menggunakan pendekatan pendapatan penerimaan pajak nasional untuk :

1. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat;
2. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara
3. Kanwil DJP Papua, dan Maluku

Pendapatan penerimaan pajak secara nasional untuk cakupan wilayah KPDDP Makasar tahun 2009 sebesar Rp 7.604.250.000.000,-. Sehingga diperkirakan kenaikan tahun 2011 sebesar 20% yaitu Rp 10.961.072.858.530,-. Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil Rapimnas III, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20%. Oleh karena itu kenaikan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20% dimulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-12. Adapun alasan sampai tahun ke-12 bahwa perangkat TIK yang akan diinvestasikan akan habis masa pakai perangkat tersebut setelah 12 tahun (berdasarkan pemeriksaan barang dan jasa yang berlaku 12 tahun menurut aturan yang berlaku). Setelah 12 tahun perangkat tersebut

masih tetap bias digunakan apabila kondisi perangkat TIK tersebut masih bisa berjalan dengan baik.

IV.4.4.1.4. Biaya Operasi KPDDP Makasar

IV.4.4.1.4.1. Biaya Langsung

IV.4.4.1.4.1.a Biaya Tetap

(1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Untuk awal dalam pembangunan KPDDP Makasar ini perlu dilakukan pengadaan barang dan jasa TIK di KPDDP Makasar, maka perangkat TIK termasuk dalam komponen biaya di awal Tahun 1. Sementara pa da tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 12 tidak ada lagi pembeilian atau pengadaan perangkat TIK sebesar Rp. 0 ,-

Perkiraan total biaya perangkat TIK yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 36,836,183,118,- tidak termasuk Pajak.

(2) Pegawai *Outsource*

Dalam kegiatan ini direncanakan sebanyak 175 orang. Adapun perkiraan dana yang akan dianggarkan sebesar Rp 3.556.109.375. Adapun komponen biayanya sebagai berikut:

1. Gaji Pegawai *Outsource* (sudah include dalam harga pengolahan lembar SPT)
 - a. Gaji (per tahun) Rp 3.189.375.000,-
 - b. Tunjangan (per tahun) Rp 366.734.375,-

Tabel 4.16. Perkiraan biaya Pegawai *outsorce*

Biaya Pegawai <i>Outsource</i>		Jumlah
1)	Gaji Pegawai <i>Outsource</i>	
	Pemilahan Dokumen	-
	Pemindaian Dokumen	-
	<i>Quality control</i>	-
	<i>Document review</i>	-
	<i>Data entry</i>	
	<i>Completion</i>	150
	<i>Supervisor</i>	25

(Sambungan Tabel 4.16)

	Pengemasan Ulang	-
	- Jumlah Pegawai	175
	- Gaji rata-rata / orang / bulan	1,518,750
	Jumlah gaji / tahun	3,189,375,000
2)	Tunjangan	
	a) Uang makan / orang / hari	10,000
	Biaya uang makan / tahun	1,750,000
	c) Kesehatan / orang / bulan	15,000
	Biaya kesehatan / tahun	2,625,000
	d) Pakaian dinas 2 (dua) stel / orang / tahun	400,000
	Biaya pakaian dinas/tahun	70,000,000
	e) JAMSOSTEK 10% x total gaji	26,578,125
	f) Tunjangan Hari Raya (1 x gaji) dan jasa produksi	265,781,250
	Jumlah Tunjangan / Tahun	366,734,375
	Jumlah Total Biaya Pegawai <i>Outsource</i> + Tunjangan	3,556,109,375

(3) Biaya Depresiasi/ Penyusutan

Depresiasi perangkat TIK dihitung dengan metode *Straight Line*, dengan jumlah depresiasi sebagai berikut :

JUMLAH Perangkat TIK (unit)	1
HARGA PER UNIT	36,836,183,119
TOTAL HARGA PEROLEHAN	36,836,183,119
NILAI SISA	3,683,618,312
UMUR EKONOMIS (tahun)	12
Nilai Depresiasi	2,762,713,734

IV.4.4.1.4.1.b Biaya Variabel

(1) Biaya Pengambilan/Pengiriman Kemasan

Agar operasional KPDDP Makasar dapat berjalan, maka dibutuhkan transportasi yang dapat mengambil/mengirim kemasan dari KPP ke KPDDP Makasar. Adapun

perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam transportasi Pengambilan/Pengiriman kemasan ke KPDDP tidak dilakukan, karena proses hanya melakukan proses perekaman data saja.

(2) *Biaya Repairs, Maintenance*

Agar seluruh perangkat TIK dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan perkiraan biaya pemeliharaan perangkat TIK baik Hardware maupun software yaitu Rp 5.525.427.468,- atau 15% dari harga investasi TIK yang dikeluarkan. Angka 15% diperoleh dari angka yang dilelangkan untuk jasa pemeliharaan TIK di Direktorat Jenderal Pajak (asumsi kenaikan akibat inflasi dan faktor-faktor lain 15% per tahun).

(3) *Biaya Kemasan / Box SPT*

Kemasan / Box SPT digunakan untuk mengangkut SPT dari KPP ke KPDDP Makasar. Pengadaan kemasan tersebut dilakukan di KPDDP, dimana untuk satu kemasan mampu menampung 3000 lembar SPT dengan berat 20 kg. Adapun perkiraan biaya per satu kemasan untuk *distributed scan and federated capture* tidak dilakukan. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan Rp. 0,- .

IV.4.4.1.5. Bunga

Karena dana pengadaan pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan diMakasar menggunakan 100% DIPA yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak dihitung bunga pinjaman dalam evaluasi proyek ini.

IV.4.4.1.6. Pajak

Pajak penghasilan dari pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar tidak dihitung.

IV.4.4.1.7. Kerangka Analisa

Untuk menilai kelayakan proyek telah dibuat proyeksi keuangan yang meliputi proyeksi laba rugi, dan arus kas. Masa manfaat diproyeksikan 12 tahun untuk Perangkat TIK KPDDP Makasar, dengan nilai sisa pada akhir proyek sebesar 10 % dari harga perolehan.

(1) *Proyeksi Laba Rugi*

Perkiraan laba rugi selengkapnya disajikan pada lampiran *Centralized Scan and Capture Model*. Pada tahun pertama operasional KPDDP Makasar total pendapatan adalah sebesar Rp. 10.961.072.858.530,-. Sedangkan biaya operasionalnya sebesar Rp

56.773.913.436,- dan beban administrasi & umum sebesar Rp 33.480.000 yang digunakan untuk perjalanan dinas 3 orang pegawai ke KPP dalam rangka sosialisasi tentang pengolahan data dan dokumen perpajakan. Sehingga laba sebelum pajak dan sesudah pajak dicapai sebesar Rp 10.904.298.944.094,-. Sejak dioperasikan mulai tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-12 perkiraan laba atau pendapatan penerimaan pajak akan meningkat menjadi Rp 81.835.225.497,-.

(2) Arus Kas

Perkiraan arus kas selengkapnya akan disajikan pada lampiran Centralized Scan and Capture Modul. Tahun pertama operasional KPDDP Makasar tahun 2012 maka selisih hasil dari perkiraan pendapatan pajak tahun 2011 dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 10.904.298.944.094,-. Dimana biaya operasional KPDDP Makasar di tahun 2012. Untuk biaya operasional KPDDP Makasar nantinya diperkirakan sebesar Rp 56.740.433.000,- dan beban biaya administrasi dan umum sebesar Rp 33.480.000 yang digunakan untuk perjalanan dinas 3 orang pegawai ke KPP dalam rangka sosialisasi tentang pengolahan data dan dokumen perpajakan. Pada tahun pertama total beban biaya kantor yang dikeluarkan lebih besar yaitu Rp 56.773.913.436,- dari tahun ke dua sampai dengan tahun ke 12. Selanjutnya tahun ke-2 Rp 20.946.024.000,- sampai dengan Tahun ke 12 beban biaya Rp 55.514.144.000,-.

IV.5 Perbandingan Hasil Evaluasi Kelayakan Proyek Antar Model

IV.5.1. Biaya Proyek

Perkiraan kebutuhan investasi perangkat TIK yang akan diinstalasi di KPDDP Makasar tahun 2011, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17. Perbandingan Biaya Proyek

Deskripsi	Nilai Investasi (Rp)
Centralized Scan and Capture	60,082,049,287,-
Federated Scan and Centralized Capture	28,518,461,359,-
Distributed Scan and Centralized Capture	49.731.946.566,-
Distributed Scan and Federated Capture	36,836,183,118,-

(asumsi harga 1 US \$ = Rp 9.006)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas biaya pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan untuk KPDDP Makasar yang paling efektif adalah

Federated Scan and Centralized Capture Model, dimana biaya yang di keluarkan sebesar Rp 28,518,461,359,-

IV.5.2. Rencana Pembiayaan

Untuk pembiayaan pengadaan perangkat TIK di KPDDP Makasar ke empat model yang diusulkan menggunakan dana DIPA yang telah disetujui oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dana DIPA tersebut 100% di tanggung oleh pemerintah.

IV.5.3. Pendapatan

Pendapatan yang akan diperoleh dengan adanya pengolahan data dan dokumen perpajakan di Makasar secara nyata tidak akan terlihat. Akan tetapi secara keseluruhan akan informasi yang akan diolah di KPDDP Makasar merupakan dalam rangka perbaikan administrasi perpajakan, sehingga nantinya akan mempermudah dalam penggalan potensi perpajakan. Untuk mendapat estimasi pendapatan yang akan diperoleh sesuai dengan cakupan wilayah KPDDP Makasar dengan ke empat model yang diteliti yaitu menggunakan pendekatan pendapatan penerimaan pajak nasional untuk:

1. Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat;
2. Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara
3. Kanwil DJP Papua, dan Maluku

Pendapatan penerimaan pajak secara nasional untuk cakupan wilayah KPDDP Makasar tahun 2009 sebesar Rp 7.604.250.000.000,-. Sehingga diperkirakan kenaikan tahun 2011 sebesar 20% yaitu Rp 10.961.072.858.530,-. Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan hasil Rapimnas III, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20%. Oleh karena itu kenaikan target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20% dimulai dari tahun ke-1 sampai tahun ke-12. Adapun alasan sampai tahun ke-12 bahwa perangkat TIK yang akan diinvestasikan akan habis masa pakai perangkat tersebut setelah 12 tahun (berdasarkan pemeriksaan barang dan jasa yang berlaku 12 tahun menurut aturan yang berlaku). Setelah 12 tahun perangkat tersebut masih tetap bias digunakan apabila kondisi perangkat TIK tersebut masih bisa berjalan dengan baik.

IV.5.4. Biaya Operasi KPDDP Makasar

IV.5.4.1. Biaya Langsung

IV.5.4.1.a. Biaya Tetap

(1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Untuk awal dalam pembangunan KPDDP Makasar ini perlu dilakukan pengadaan barang dan jasa TIK di KPDDP Makasar, maka perangkat TIK termasuk dalam komponen biaya di awal Tahun 1. Sementara pada tahun ke 2 sampai dengan tahun ke 12 tidak ada lagi pembelian atau pengadaan perangkat TIK sebesar Rp. 0 ,-. Investasi TIK untuk efektivitas biaya pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan sebesar Rp 28,518,461,359,- tidak termasuk pajak. Berdasarkan *table* 4.18. dibawah ini dapat disimpulkan bahwa model proses bisnis yang paling efektif adalah ***Federated Scan and Centralized Capture Model***. Model ini lebih efektif karena biaya investasi TIK dalam pembelian hardware paling efektif sebesar **Rp. 28,518,461,359,-** karena fungsi di *data entry* berkurang sebanyak 175 unit computer. Disamping itu hardware lain seperti storage juga tidak diperlukan, karena proses penyimpanan data dan *image* di simpan di Kantor Pusat DJP.

Tabel 4.18. Perbandingan Perangkat TIK

Deskripsi	Nilai Investasi (Rp)
Centralized Scan and <i>Capture</i>	60,082,049,287,-
Federated Scan and Centralized <i>Capture</i>	28,518,461,359,-
Distributed Scan and Centralized <i>Capture</i>	49.731.946.566,-
Distributed Scan and Federated <i>Capture</i>	36,836,183,118,-

(asumsi harga 1 US \$ = Rp 9.006)

(2) Pegawai *Outsource*

Dari hasil pada perhitungan gaji pegawai dan tunjangan *outsource* dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 4.19. Perbandingan Pegawai *Outsource*

Deskripsi	Pegawai <i>Outsource</i>			Jumlah Orang
	Gaji Pegawai (Rp)	Tunjangan (Rp)	Total (Rp)	
Centralized Scan and <i>Capture</i>	4.428.675.000	509.236.875	4.937.911.875	243
Federated Scan and Centralized <i>Capture</i>	1.239.300.000	142.502.500	1.381.802.500	68
Distributed Scan and Centralized <i>Capture</i>	3.189.375.000	366.734.375	3.556.109.375	175
Distributed Scan and Federated <i>Capture</i>	3.189.375.000	366.734.375	3.556.109.375	175

Berdasarkan tabel 4.19. diatas dapat di simpulkan bahwa bahwa biaya gaji pegawai *outsource* yang diperkirakan paling efektif adalah ***Federated Scan and Centralized Capture Model*** sebesar **Rp 1.381.802.500,-** dengan jumlah pegawai yang akan dibutuhkan sebanyak **68** orang. Ini terjadi dikarena proses *data entry* yaitu *completion dan supervisor* tidak dilakukan di KPDDP Makasar,sementra ketiga model lainnya menggunakan tenaga kerja untuk di *data entry* yaitu *completion dan supervisor*.

(3) Biaya Depresiasi/ Penyusutan

Depresiasi perangkat TIK dihitung dengan metode *Straight Line*, dengan jumlah depresiasi sebagai berikut :

Tabel 4.20. Perbandingan Biaya Depresiasi

Deskripsi	Depresiasi				
	Harga per unit (Rp)	Total Harga Perolehan (Rp)	Nilai Sisa (Rp)	Umur Ekonomis (tahun)	Nilai Depresiasi (Rp)
Centralized Scan and <i>Capture</i>	60,082,049,287,-	60,082,049,287,-	6,008,204,929	12	4,506,153,697,-
Federated Scan and Centralized <i>Capture</i>	28,518,461,359,-	28,518,461,359,-	2.851.846.135	12	2,138,884,602,-
Distributed Scan and Centralized <i>Capture</i>	49.731.946.566,-	49.731.946.566,-	4.973.194.656	12	3,729,895,993,-
Distributed Scan and Federated <i>Capture</i>	36,836,183,118,-	36,836,183,118,-	3.683.618.311	12	2,762,713,734,-

Berdasarkan tabel 4.20. diatas dapat disimpulkan bahwa biaya penyusutan yang paling kecil adalah *Federated Scan and Centralized Capture Model* sebesar **Rp 2,138,884,602,-**. Ini disebabkan karena model ini dalam melakukan investasi perangkat TIK nya paling kecil. Sehingga terjadi penghematan biaya yang harus dikeluarkan jika dibandingkan dengan ketiga model lainnya.

IV.5.4.1.b. Biaya Variabel

(1) Biaya Pengambilan/Pengiriman Kemasan

Agar operasional KPDDP Makasar dapat berjalan, maka dibutuhkan transportasi yang dapat mengambil/mengirim kemasan dari KPP ke KPDDP Makasar. Adapun biaya yang butuhkan dalam transportasi Pengambilan/Pengiriman kemasan ke KPDDP dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.21. Perbandingan Biaya Pengambilan/ Pengiriman Kemasan SPT

Deskripsi	Biaya Pengambilan /Pengiriman Kemasan (Rp)
Centralized Scan and <i>Capture</i>	765.238.879 ,-
Federated Scan and Centralized <i>Capture</i>	765.238.879 ,'
Distributed Scan and Centralized <i>Capture</i>	-
Distributed Scan and Federated <i>Capture</i>	-

Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan bahwa untuk model *Distributed Scan and Centralized Capture*, dan *Distributed Scan and Federated Capture* tidak membutuhkan biaya. Ini dikarenakan proses pengambilan tidak dilakukan, sehingga proses pemilahan dokumen SPT serta pemindaian dilakukan di KPP. Sementara untuk model *centralized scan and capture*, dan *federated scan and centralized* membutuhkan biaya sebesar Rp 765.238.879,-. Biaya ini nantinya digunakan untuk mengirimkan dokumen SPT dari KPP ke KPDDP Makasar. Secara biaya memang jauh lebih besar dibandingkan model (*Distributed scan and centralized*, dan *distributed scan and federated capture*) ini, akan tetapi dari sisi tempat penyimpanan di KPP terhadap dokumen SPT serta keamanan dokumen fisik SPT jauh lebih besar membutuhkan ruangan di KPP dan resiko kehilangan dokumen SPT jauh lebih besar.

(2) Biaya *Repairs, Maintenance*

Agar seluruh perangkat TIK dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan biaya pemeliharaan perangkat TIK baik Hardware maupun software sebesar 15% dari harga investasi TIK yang dikeluarkan. Angka 15% diperoleh dari angka yang dilelangkan untuk jasa pemeliharaan TIK di Direktorat Jenderal Pajak (asumsi kenaikan akibat inflasi dan faktor-faktor lain 15% per tahun). Adapun rekapitulasi biaya repairs dan maintenance dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.22. Perbandingan Biaya *Repairs, Maintenance*

Deskripsi	Biaya Repairs, Maintenance (Rp)
Centralized Scan and <i>Capture</i>	9.012.307.393
Federated Scan and Centralized <i>Capture</i>	4.277.769.204
Distributed Scan and Centralized <i>Capture</i>	7.459.791.985
Distributed Scan and Federated <i>Capture</i>	5.525.427.468

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa biaya *maintenance* yang paling efektif dalam pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar adalah *Federated Scan and Centralized Capture* sebesar **Rp 4.277.769.204,-**. Ini terjadi karena pada saat investasi keseluruhan perangkat TIK jauh lebih kecil jika dibandingkan ketiga model lainnya yaitu sebesar Rp 28.005.066.531,-.

(3) Biaya Kemasan / Box SPT

Kemasan / Box SPT digunakan untuk mengangkut SPT dari KPP ke KPDDP Makasar. Pengadaan kemasan tersebut dilakukan di KPDDP, dimana untuk satu kemasan mampu menampung 3000 lembar SPT dengan berat 20 kg. Adapun biaya per satu kemasan untuk ke empat model yang diusulkan dalam pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23. Rekapitulasi Biaya Kemasan / Box SPT

Deskripsi	Biaya Kemasan / Box SPT
Centralized Scan and <i>Capture</i>	43,013,098
Federated Scan and Centralized <i>Capture</i>	43,013,098
Distributed Scan and Centralized <i>Capture</i>	-
Distributed Scan and Federated <i>Capture</i>	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk model *Distributed scan and Centralized Capture* dan *Distributed Scan and Federated Capture* tidak membutuhkan biaya. Ini terjadi disebabkan oleh tidak adanya dokumen SPT yang akan dikirim dari KPP ke KPDDP Makasar.

IV.5.4.2. Bunga

Karena dana pengadaan pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan diMakasar menggunakan 100% DIPA yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak dihitung bunga pinjaman dalam evaluasi proyek ini.

IV.5.4.3. Pajak

Pajak penghasilan dari pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar tidak dihitung.

IV.5.4.4. Kerangka Analisa

Untuk menilai kelayakan proyek telah dibuat proyeksi keuangan yang meliputi proyeksi laba rugi, dan arus kas. Masa manfaat diproyeksikan 12 tahun untuk Perangkat TIK KPDDP Makasar, dengan nilai sisa pada akhir proyek sebesar 10 % dari harga perolehan.

(1) Proyeksi Laba Rugi

Perkiraan laba rugi selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.24. Rekapitulasi Laba Rugi

Deskripsi	Perkiraan Pendapatan	Perkiraan Biaya	Sisa Hasil Usaha
<i>Centralized Scan and Capture</i>	10.961.072.857.530	87.384.207.542	10.873.688.649.988
<i>Federated Scan and Centralized Capture</i>	10.961.072.857.530	45.162.702.955	10.915.910.154.575
<i>Distributed Scan and Centralized Capture</i>	10.961.072.857.530	72.571.223.660	10.888.501.633.870
<i>Distributed Scan and Federated Capture</i>	10.961.072.857.530	56.773.913.436	10.904.298.944.094

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perkiraan pendapatan pajak sama untuk ke empat model yang diusulkan dalam pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar sebesar Rp 10.961.072.857.530,-. Sementara perkiraan biaya yang akan dikeluarkan oleh *Federated Scan and Centralized Capture Model* paling lebih

rendah sebesar **Rp 45.162.702.955,-** sehingga perkiraan sisa hasil usaha sebesar **Rp 10.915.910.154.575,-** menjadi yang paling besar dari pada ketiga model lainnya. Model *Federated Scan and Centralized Capture Model* ini diperkirakan paling efektif dari sisi biaya dikarena investasi awal perangkat TIK yang paling kecil diantara ketiga model lainnya, meskipun biaya jasa sewa mobil dan jasa kurir, serta biaya kemasan/*Box* SPT lebih besar yaitu Rp 765.238.879,- dari pada model *distirbuted Scan and Centralized Capture* dan *Distributed Scan and Federated Capture* sebesar Rp 0,-

(2) Arus Kas

Perkiraan arus kas selengkapnya akan di sajikan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.25. Perbandingan Arus Kas

Deskripsi	Perkiraan Pendapatan	Perkiraan Biaya Tahun ke 1	Perkiraan Biaya Tahun ke 2	Perkiraan Biaya Tahun ke 12
<i>Centralized Scan and Capture</i>	10.961.072.857.530	87.384.208.000	28.977.805.000	77.989.681.000
<i>Federated Scan and Centralized Capture</i>	10.961.072.857.530	45.162.703.000	17.431.902.000	47.513.334.000
<i>Distributed Scan and Centralized Capture</i>	10.961.072.857.530	72.571.224.000	24.137.725.000	65.480.748.000
<i>Distributed Scan and Federated Capture</i>	10.961.072.857.530	56.773.913.000	20.946.024.000	55.514.144.000

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan dari keempat model sistem pengembangan pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar terlihat bahwa dengan perkiraan pendapatan penerimaan pajak yang sama di tahun 2011 untuk ke empat model yang diusulkan. Akan tetapi diperkirakan beban biaya yang paling efektif yaitu *Federated Scan and Centralized Capture Model* pada tahun pertama sebesar **Rp 45.162.703.000,-**, tahun ke dua sebesar **Rp 17.431.902.000,-** sampai dengan tahun ke 12 sebesar **Rp 47.513.334.000,-**

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar telah dilakukan peninjauan terhadap beberapa aspek yaitu: aspek teknis, Aspek Data Wajib Pajak Tahunan Orang Pribadi (PPh OP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sistem pengadaan barang dan jasa, dan aspek-aspek lainnya proyek ini telah memenuhi standar untuk dapat dijalankan.

Adapun dari hasil perhitungan dan analisa kelayakan proyek terhadap ke empat model yaitu *Centralized Scan and Capture*, *Federated Scan and Centralized Capture*, *Distributed Scan and Centralized Capture*, dan *Distributed Scan and Federated Capture* dari aspek finansial dengan menggunakan metode efektivitas biaya maka dapat disimpulkan bahwa yang paling sesuai untuk pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar adalah ***Federated Scan and Centralized Capture Model***, serta dari aspek finansial proyek ini adalah **LAYAK**.

Ada beberapa alasan pertimbangan bahwa *Federated Scan and Centralized Capture Model* ini telah memenuhi syarat terhadap **uji kelayakan**, dimana :

- ✓ Untuk perkiraan biaya investasi perangkat TIK paling efektif sebesar **Rp. 28.518.461.359,-** jika dibandingkan dengan ke-3 model lainnya.
- ✓ Untuk perkiraan Biaya gaji pegawai *outsourse* dan tunjangannya paling efektif sebesar **Rp 1.381.802.500,-**, serta penggunaan jumlah pegawai yang paling sedikit yaitu sebanyak 68 orang;
- ✓ Untuk perkiraan depresiasi dari investasi perangkat TIK yang paling efektif sebesar **Rp 2.138.884.602,-**;
- ✓ Kebutuhan akan perkiraan biaya repair, maintanance jauh lebih efektif sebesar **Rp 4.277.769.204,-**.
- ✓ Perkiraan sisa hasil usaha sebesar **Rp 10.915.910.154.575,-** menjadi yang paling besar dari pada ketiga model lainnya;
- ✓ Perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dari tahun pertama, kedua, sampai dengan tahun ke-12 jauh lebih murah jika dibandingkan model yang lainnya, yaitu tahun

ke-1 sebesar **45.162.703.000,-**, tahun ke-2 sebesar **Rp 17.431.902.000,-** sampai dengan tahun ke-12 sebesar **Rp 47.513.334.000,-**

5.2 SARAN

Mengingat proyek ini telah dapat disimpulkan bahwa *Federated Scan and Centralized Capture Model* yang ditawarkan untuk pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajakan di KPDDP Makasar dapat memberikan manfaat secara finansial kepada Direktorat Jenderal Pajak, dan layak dari segi aspek lainnya, oleh karena itu rencana pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen perpajak di KPDDP Makasar dimaksud dapat segera di realisasikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka saran-saran yang perlu diajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat segera merealisasikan pengadaan barang dan jasa pengembangan sistem pengolahan data dan dokumen untuk KPDDP Makasar, mengingat waktu sudah di akhir juni tahun 2011 ini, maka perlu segera di lelangkan agar pada akhir tahun sudah dapat di uji coba dan beroperasi sesuai target yang diharapkan pada awal tahun 2012;
2. Mengingat keterbatasan waktu, data dan tools dalam penulisan penelitian ini, maka untuk kesempurnaan dan kelengkapan penelitian ini dapat dilakukan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain seperti perhitungan manfaat ekonomi dari proyek.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Burch, J.G.**, System Analysis, Design, and Implementation, Boyd & Frasher Publishing Company, 1992.
- Forest, Adam dan Stevan M.Sheffrin.** 2002.Complexity and Compliance : An Empirical Investivigation, National Tax JOURNAL, Vol LV, No. 1, March, p.p 75-88
- Hansen & Mowen**, *Management Accounting*, Buku 2, Edisi ke-7 Salemba Empat, Jakarta 2005.
- Jogiyanto**, Analisis dan Disain Sistem Informasi, Andi Offset Yogyakarta, 1990.
- Kadariah**, Evalausi Proyek Analisa Ekonomis, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,1986.
- Karanta, Maria, Hakkan Malmer, Ingrid Munck, Gunar Olsson** 2000. A Citizen's Persfektive on Public Sector Performance and Services Delivey. Prograss in Measurement and Modelling of Data from Swedish Taxpayer Survey.
- No Name (NN)**, Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan umum perpajakan khususnya pajakan penghasilan (study khusus pada nasabah Bank Danamon Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk), Chaizi Nasucha dalam laporan hasil penelitian Badan Analisa Keuangan dan Moneter tahun 1999.
- Pandiangan, Liberty**, 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan perpajakan. Jakarta : Elex Media.

Senn, James A., Analysis and Design of Information Systems, McGraw-Hill Publishing Company, 1989.

Yourdan, Edward, Modern Structure Analysis, Prentice-Hall, Inc, 1989.

Zulkarnain Djamin, S.E., Dipl. PD, Perencanaan Dan Analisa Proyek, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.

II. TESIS

Alwi Yusuf yang berjudul Studi Kelayakan Ekonomi Penambahan Armada PT.ADP Indonesia-Ferry (persero) di Lintas Penyeberangan merak-Bakauheni, 2006:14-27)

III. ARTIKEL MEDIA CETAK DAN PUBLIKASI ELEKTRONIK

Alam Santosa tentang presentasi “study kelayakan (feasibility study)”, artikel diunduh <http://infokomhmtiunikom.files.wordpress.com/2010/04/studi-kelayakan-usaha.pdf> tanggal 07 mei 2011

Direktorat Jenderal Pajak, Buku saku

Fredy A. Sitohang yang berjudul Mengkaji administrasi perpajakan yang baik (Bisnis Indonesia: 16 Juni 2003), artikel diunduh <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Mengkaji%20administrasi%20perpajakan.htm> tanggal 13 mei 2011

<http://www.aiim.org/What-Is-Document-Imaging>

<http://www.document-management-guide.com/glossary.html>

http://en.wikipedia.org/wiki/Net_present_value

<http://excel.aurino.com/?p=26>

IV. PERATURAN

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 Juni 2008

tentang rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008 – 2012

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, SE-18/PJ/2011 tentang target rasio kepatuhan

penyampaian surat pemberitahuan pada tahun 2011



DAFTAR SINGKATAN

APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
B/C	: <i>Benefit and Cost</i>
BKF	: Badan Kebijakan Fiskal
BPS	: Bukti Penerimaan Surat
CBA	: <i>Cost and Benefit Analysis</i>
CEA	: <i>Cost Effectiveness Analysis</i>
DIPA	: Daftar Isian Penggunaan Anggaran
DJPB	: Direktorat Jenderal Pembendaharaan
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
Ditjen Pajak	: Direktorat Jenderal Pajak
e-GEP	: e-Government Project
KANWIL	: Kantor Wilayah
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KPDDP	: Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
LPAD	: Lembar Pengawasan Arus Dokumen
NDA	: <i>Non Disclosed Agreement</i>
PPDDP	: Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
PINTAR	: <i>Project for Indonesian tax administration reform</i>
PPN	: Pajak pertambahan Nilai
PPh OP	: Pajak Penghasilan Orang Pribadi
PPh OPS	: Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sederhana
PPh OPSS	: Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sangat Sederhana
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Rapimnas	: Rapat Pimpinan Nasional
SE	: Surat Edaran
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SPT	: Surat Pemberitahuan
TI	: Teknologi Informasi
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
UU KUP	: Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan
WP	: Wajib Pajak



Lanjutan Lampiran 1-1

(Centralized Scan and Capture Model)		
Perincian Perhitungan Biaya		
Total Perhitungan Biaya		87,384,207,542
Biaya Operasional Langsung		79,290,727,802
Biaya Tetap		
Perangkat TIK		
I. Hardware		
A. Server	Rp.	4,265,781,960
B. Workstation	Rp.	4,019,183,541
C. Note Book	Rp.	142,925,220
D. Scanner	Rp.	5,465,273,088
E. Back Up System Device	Rp.	11,686,000
F. Media Komunikasi dan Network	Rp.	12,492,478,370
G. Penyimpanan Data dan Gambar	Rp.	12,998,972,208
H. Peralatan IT Keamanan Gedung	Rp.	2,140,312,808
II. Software		
A. Database Engine	Rp.	860,973,600
B. Digitalisasi dan Document Management	Rp.	14,356,302,492
C. Aplikasi Administrasi KPDDP	Rp.	3,328,160,000
Jumlah Total Biaya Perangkat TIK		Rp. 60,082,049,287
Biaya Penyusutan :		
Harga Perangkat TIK :		60,082,049,287
Nilai penyusutan Perangkat TIK (12 Tahun) (Nilai Sisa 10 %)		12 6,008,204,929
Jumlah Total Penyusutan		4,506,153,697
Biaya Pegawai Outsource		
1)	Gaji Pegawai Outsource	
	Pemilahan Dokumen	30
	Pemindaian Dokumen	8
	Quality Control	10
	Document Review	10
	Data Entry	
	Completion	150
	Supervisor	25
	Pengemasan Ulang	10
	- Jumlah Pegawai	243
	- Gaji rata-rata / orang / bulan	1,518,750
	Jumlah gaji / tahun	4,428,675,000
2)	Tunjangan	
	a) Uang makan / orang / hari	10,000
	Biaya uang makan / tahun	2,430,000
	c) Kesehatan / orang / bulan	15,000
	Biaya kesehatan / tahun	3,645,000
	d) Pakaian dinas 2 (dua) stel / orang / tahun	400,000
	Biaya pakaian dinas/tahun	97,200,000
	e) JAMSOSTEK 10% x total gaji Crew.	36,905,625
	f) Tunjangan Hari Raya (1 x gaji) dan jasa produksi	369,056,250
	Jumlah Tunjangan / Tahun	509,236,875
Jumlah Total Biaya Pegawai Outsource + Tunjangan		4,937,911,875
Biaya Repairs, Maintanance		
Biaya ini meliputi pekerjaan :		
	1) Pemeliharaan / Perawatan Harian Hardware dan Software	
	2) Pemeliharaan Peralatan Incidental	
	3) Peralatan dan Perlengkapan Hardware dan Software	
Adapun Biaya maintanance tersebut 15% /tahun dari Harga Perolehan Perangkat TIK		9,012,307,393
Jumlah Biaya Repairs, Maintanance		9,012,307,393

Lanjutan Lampiran 1-2

Biaya Kemasan / Box SPT		
Jumlah Kemasan yang dibutuhkan		1,564
Harga per kemasan		27,500
Jumlah Biaya Kemasan / Box SPT		43,013,098
Biaya Tidak Tetap		
Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan		
1) Jasa Sewa Mobil		
- Pemakaian kendaraan Mobil per bulan		3,000,000
- Jumlah Kendaraan Mobil		2
- Biaya Kendaraan Mobil per tahun		72,000,000
2) Jasa Kurir		
- Biaya Pengiriman/pengambilan		637,292,452
- Biaya Pengiriman/pengambilan per tahun.		
Jumlah Total Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan		709,292,452
Biaya Operasional Tidak Langsung		8,093,479,740
Biaya Tetap		
Biaya Pegawai KPDDP Makasar		
a.	Gaji Pegawai PNS	
	Golongan IV	1
	Golongan III	9
	Golongan II	50
	- Jumlah pegawai	60
	- Gaji rata-rata / orang / bulan	10,333,333
	Jumlah gaji / tahun	7,439,999,760
b.	Tunjangan	
	1) Tunjangan Gaji ke 13 (1 x gaji) dan jasa produksi	10,333,333
	Biaya Tunjangan Pegawai PNS / Tahun	619,999,980
Jumlah Total Biaya Pegawai KPDDP Makasar		8,059,999,740
Biaya Tidak Tetap		
Biaya Administrasi dan Umum.		
a.	Biaya ATK dan barang cetakan	
	- Rata-rata / bulan	
	- Beban Biaya / Kantor / Tahun	
b.	Biaya Telephone; Pos; Listrik dan Air Tawar	
	- Rata-rata / bulan	
	- Beban Biaya / Kantor / Tahun	
c.	Biaya Inventaris Kantor	
	- Total nilai investasi	
	- Nilai ekonomis	
	- Pembebanan biaya / tahun.	
	- Beban Biaya / Kantor / Tahun	
d.	Biaya Perjalanan Dinas	
	- Biaya perjalanan dibebankan untuk /orang	3
	- Biaya Tiket pp. rata-rata / Orang	1,500,000
	- Uang Harian diperhitungkan selama 3 hari/orang	360,000
	- Perjalanan Dinas / Tahun sebanyak	6
	- Beban Biaya / Kantor / Tahun	33,480,000
Jumlah Total Biaya Administrasi Umum		33,480,000

JUMLAH Perangkat TIK (unit)	1
HARGA PER UNIT	60,082,049,287
TOTAL HARGA PEROLEHAN	60,082,049,287
NILAI SISA	6,008,204,929
UMUR EKONOMIS (tahun)	12
Nilai Depresiasi	4,506,153,697

AWAL TAHUN	DEBET DEPRESIASI	KREDIT AKM DEPR	TOTAL AKM DEPRESIASI	NILAI BUKU
0	-	-	-	60,082,049,287
1	4,506,153,697	4,506,153,697	4,506,153,697	55,575,895,590
2	4,506,153,697	4,506,153,697	9,012,307,393	51,069,741,894
3	4,506,153,697	4,506,153,697	13,518,461,090	46,563,588,197
4	4,506,153,697	4,506,153,697	18,024,614,786	42,057,434,501
5	4,506,153,697	4,506,153,697	22,530,768,483	37,551,280,804
6	4,506,153,697	4,506,153,697	27,036,922,179	33,045,127,108
7	4,506,153,697	4,506,153,697	31,543,075,876	28,538,973,411
8	4,506,153,697	4,506,153,697	36,049,229,572	24,032,819,715
9	4,506,153,697	4,506,153,697	40,555,383,269	19,526,666,018
10	4,506,153,697	4,506,153,697	45,061,536,965	15,020,512,322
11	4,506,153,697	4,506,153,697	49,567,690,662	10,514,358,625
12	4,506,153,697	4,506,153,697	54,073,844,358	6,008,204,929
13	4,506,153,697	4,506,153,697	58,579,998,055	1,502,051,232
14	4,506,153,697	4,506,153,697	63,086,151,751	(3,004,102,464)
15	4,506,153,697	4,506,153,697	67,592,305,448	(7,510,256,161)
16	4,506,153,697	4,506,153,697	72,098,459,144	(12,016,409,857)
17	4,506,153,697	4,506,153,697	76,604,612,841	(16,522,563,554)
18	4,506,153,697	4,506,153,697	81,110,766,537	(21,028,717,250)
19	4,506,153,697	4,506,153,697	85,616,920,234	(25,534,870,947)
20	4,506,153,697	4,506,153,697	90,123,073,930	(30,041,024,643)

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

(Rp. Ribuan)

Sumber Dana		Penggunaan Dana	
Modal Sendiri (Pemerintah)	60,082,049,287	Pembelian Perangkat TIK KPDDP Makasar	60,082,049,287
Pinjaman	0	Lain-lain	0
Jumlah	<u>60,082,049,287</u>	Jumlah	<u>60,082,049,287</u>

PERHITUNGAN BIAYA POKOK CENTRALIZED SCAN AND CAPTURE
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAF
(UMUR PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

Lanjutan Lampiran 1-4

I BIAYA LANGSUNG			
1 Biaya Tetap			
a.	Investasi Perangkat TIK	= Rp.	60,082,049,287
b.	Biaya Pegawai Outsource Gaji Upah Tunjangan	= Rp.	4,937,911,875
c.	Biaya Penyusutan	= Rp.	4,506,153,697
			Rp. 60,082,049,287 - Rp. 6,008,204,929 12 Tahun
d.	Biaya Repairs, Maintenance dan Supplie	= Rp.	9,012,307,393
e.	Biaya Kemasan / Box SPT	= Rp.	43,013,098
JUMLAH BIAYA TETAP			= Rp. 78,581,435,349
2 Biaya Tidak Tetap			
a.	Jasa Sewa Mobil	= Rp.	72,000,000
b.	Jasa Kurir	= Rp.	637,292,452
JUMLAH BIAYA TIDAK TETAP			= Rp. 709,292,452
II BIAYA TAK LANGSUNG (Asumsi Tidak menambah biaya tak langsung kecuali SPJ ABK untuk pelatih:			
1 Biaya Tetap			
a.	Biaya Pegawai KPDDP Makasaf Gaji Upah Tunjangan	= Rp.	7,439,999,760
		= Rp.	619,999,980
b.	Biaya Pengelolaan dan Manajeme	= Rp.	0
JUMLAH BIAYA TETAP			= Rp. 8,059,999,740
2 Biaya Tidak Tetap			
a.	Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	= Rp.	0
b.	Biaya Telepon, Telegram, Pos, Listrik dan Air Tawa	= Rp.	0
c.	Biaya sewa kantor & pemeliharaan	= Rp.	0
D.	Biaya Lain-lain SPPL	= Rp.	33,480,000
JUMLAH BIAYA TIDAK TETAP			= Rp. 33,480,000
III TOTAL BIAYA PER TAHUN			
a.	JUMLAH BIAYA LANGSUNG	= Rp.	79,290,727,802
b.	JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG	= Rp.	8,093,479,740
TOTAL BIAYA			= Rp. 87,384,207,542
IV PERKIRAAN PENDAPATAN & HASIL USAHA			
a.	Penerimaan Pajak di lingkungan KPDDP Makasa - Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara - Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulteng, Gorontalo, Maluku - Kanwil DJP Papua, Maluku Jumlah	= Rp. = Rp. = Rp.	3,306,995,717 2,902,123,949 4,751,953,192 10,961,072,858
d.	PERKIRAAN PENDAPATAN	= Rp.	10,961,072,857,530
e.	PERKIRAAN BIAYA	= Rp.	87,384,207,542
f.	SISA HASIL USAHA	=	Rp. 10,873,688,649,988
SISA HASIL USAHA PER THN			= Rp. 10,873,688,649,988

PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAR
CENTRALIZED SCAN AND CAPTURE MODEL
(UMUR PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

Bunga 0

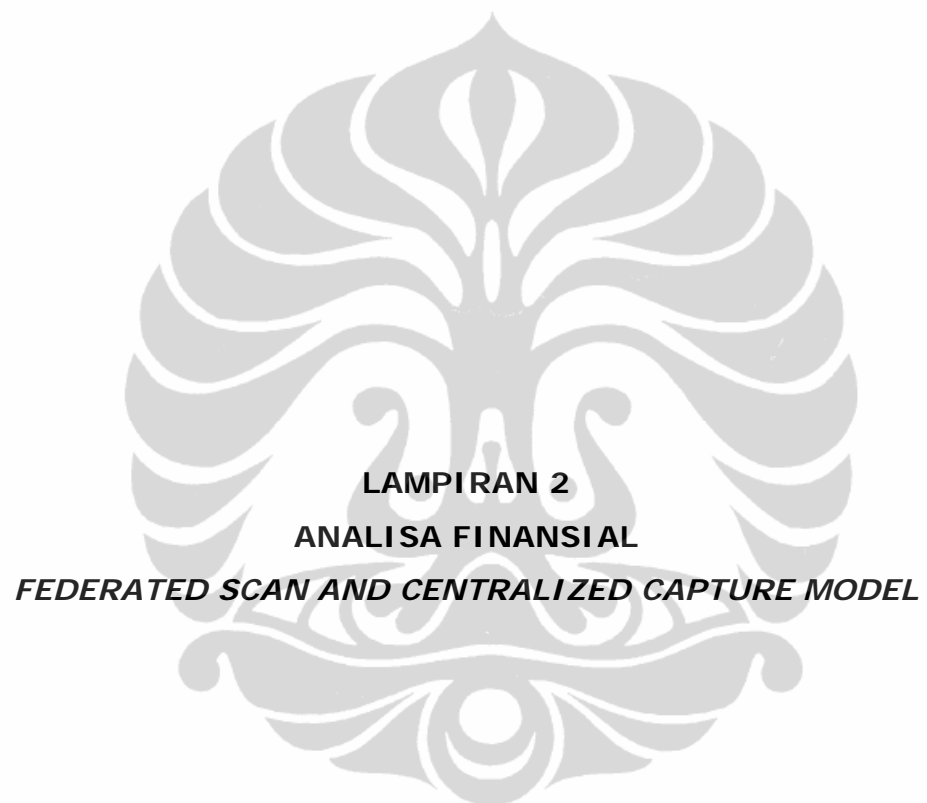
(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	0	1	2	3	4	5
A. MODAL KERJA	-					
B. PENDAPATAN						
- Wilayah KPDDP Makasar						
1. Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	3,306,995,717	3,970,379,058	4,766,837,097	5,723,064,619	6,871,111,381	8,249,456,324
2. Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku	2,902,123,949	3,484,290,013	4,183,238,590	5,022,396,251	6,029,888,938	7,239,484,660
3. Kanwil DJP Papua, Maluku	4,751,953,192	5,705,195,002	6,849,657,119	8,223,698,337	9,873,372,224	11,853,970,692
	10,961,072,858	13,159,864,073	15,799,732,806	18,969,159,207	22,774,372,543	27,342,911,676
C. B I A Y A						
I Biaya Langsung						
a. Perangkat TIK	60,082,049	0	0	0	0	0
a. Pegawai Outsource	4,937,912	5,184,807	5,444,048	5,716,250	6,002,063	6,302,166
b. Biaya Penyusutan	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154
d. Biaya Biaya Repairs, Maintenance dan Supplies	9,012,307	10,364,154	11,918,777	13,706,593	15,762,582	18,126,969
e. Biaya Kemasan / Box SPT	43,013	47,314	52,046	57,250	62,975	69,273
f. Biaya Operasional	709,292	780,222	858,244	944,068	1,038,475	1,142,323
II Biaya Tak Langsung						
a. Karyawan PNS	7,440,000	7,440,000	8,184,000	9,002,400	9,902,640	10,892,904
b. Tunjangan Pengelolaan dan Manajemen	620,000	620,000	682,000	750,200	825,220	907,742
c. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	0	0	0	0	0	0
d. Biaya Telepon, Telegram, Listrik dan Pos	0	0	0	0	0	0
e. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	0	0	0	0	0	0
f. Biaya Lain-lain	87,350,728	33,480	35,154	36,912	38,757	42,730
TOTAL BIAYA	87,384,208	28,977,805	31,682,179	34,721,673	38,140,804	41,990,260
D. RUGI / LABA						
- Akumulasi R / L sebelum Pajak	10,873,688,650	13,130,886,268	15,768,050,627	18,934,437,534	22,736,231,740	27,300,921,416
- Pajak Pendapatan	0	0	0	0	0	0
- Akumulasi R / L setelah Pajak	10,873,688,650	13,130,886,268	15,768,050,627	18,934,437,534	22,736,231,740	27,300,921,416
- Akumulasi R / L tanpa penyusutan	10,878,194,804	13,135,392,422	15,772,556,780	18,938,943,688	22,740,737,893	27,305,427,569
PERHITUNGAN CASH FLOW						
- Saldo Awal	-	(60,082,049)	10,818,112,754	23,953,505,176	39,726,061,957	58,665,005,644
- Investasi	(60,082,049)	0	0	0	0	0
- Penyusutan	-	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154
- Pinjaman	-	0	0	0	0	0
- Pembayaran Bunga & Cicilan	-	0	0	0	0	0
- Cash in flow	-	10,878,194,804	13,135,392,422	15,772,556,780	18,938,943,688	22,740,737,893
- Saldo Akhir	(60,082,049)	10,818,112,754	23,953,505,176	39,726,061,957	58,665,005,644	81,405,743,538

PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAR
CENTRALIZED SCAN AND CAPTURE MODEL
(UMUR PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	6	7	8	9	10	11	12
A. MODAL KERJA							
B. PENDAPATAN							
- Wilayah KPDDP Makasar							
1. Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	9,904,297,263	11,891,099,294	14,276,453,812	17,140,310,447	20,578,656,723	24,706,735,261	0
2. Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku	8,691,725,282	10,435,285,374	12,528,603,620	15,041,841,506	18,059,234,912	21,681,917,435	0
3. Kanwil DJP Papua, Maluku	14,231,877,213	17,086,791,782	20,514,402,213	24,629,591,297	29,570,287,311	35,502,086,946	0
	32,827,899,758	39,413,176,449	47,319,459,645	56,811,743,250	68,208,178,945	81,890,739,642	0
C. B I A Y A							
I Biaya Langsung							
a. Perangkat TIK	0	0	0	0	0	0	0
a. Pegawai Outsource	6,617,274	6,948,138	7,295,545	7,660,322	8,043,338	8,445,505	8,867,780
b. Biaya Penyusutan	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154
d. Biaya Biaya Repairs, Maintenance dan Supplies	20,846,015	23,972,917	27,568,854	31,704,183	36,459,810	41,928,781	48,218,099
e. Biaya Kemasan / Box SPT	76,200	83,820	92,202	101,423	111,565	122,721	134,994
f. Biaya Operasional	1,256,555	1,382,210	1,520,431	1,672,475	1,839,722	2,023,694	2,226,064
II Biaya Tak Langsung							
a. Karyawan PNS	11,982,194	13,180,413	14,498,455	15,948,300	17,543,130	19,297,443	21,227,188
b. Tunjangan Pengelolaan dan Manajemen	998,516	1,098,368	1,208,205	1,329,025	1,461,928	1,608,120	1,768,932
c. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	0	0	0	0	0	0	0
d. Biaya Telepon, Telegram, Listrik dan Pos	0	0	0	0	0	0	0
e. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0
f. Biaya Lain-lain	44,866	47,110	49,465	51,938	54,535	57,262	60,125
TOTAL BIAYA	46,327,774	51,219,130	56,739,311	62,973,819	70,020,182	77,989,681	87,009,335
D. RUGI / LABA							
- Akumulasi R / L sebelum Pajak	32,781,571,983	39,361,957,319	47,262,720,334	56,748,769,431	68,138,158,764	81,812,749,961	(87,009,335)
- Pajak Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0
- Akumulasi R / L setelah Pajak	32,781,571,983	39,361,957,319	47,262,720,334	56,748,769,431	68,138,158,764	81,812,749,961	(87,009,335)
- Akumulasi R / L tanpa penyusutan	32,786,078,137	39,366,463,473	47,267,226,487	56,753,275,584	68,142,664,917	81,817,256,114	(82,503,181)
PERHITUNGAN CASH FLOW							
- Saldo Awal	108,711,171,107	141,497,249,244	180,863,712,717	228,130,939,204	284,884,214,789	353,026,879,706	434,844,135,820
- Investasi	0	0	0	0	0	0	0
- Penyusutan	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154	4,506,154
- Pinjaman	0	0	0	0	0	0	0
- Pembayaran Bunga & Cicilan	0	0	0	0	0	0	0
- Cash in flow	32,786,078,137	39,366,463,473	47,267,226,487	56,753,275,584	68,142,664,917	81,817,256,114	(82,503,181)
- Saldo Akhir	141,497,249,244	180,863,712,717	228,130,939,204	284,884,214,789	353,026,879,706	434,844,135,820	434,761,632,639



LAMPIRAN 2

ANALISA FINANSIAL

FEDERATED SCAN AND CENTRALIZED CAPTURE MODEL

Lanjutan Lampiran 2-1

(Federated Scan and Centralized Capture Model)		
Perincian Perhitungan Biaya		45,219,596,784
Biaya Operasional Langsung		37,126,117,044
Biaya Tetap		
Perangkat TIK (include maintenance 3 tahun)		
I. Hardware		
A. Server	Rp.	3,632,389,980
B. Workstation	Rp.	1,900,336,067
C. Note Book	Rp.	142,925,220
D. Scanner	Rp.	5,465,273,088
E. Back Up System Device	Rp.	11,686,000
F. Media Komunikasi dan Network	Rp.	12,292,094,870
G. Penyimpanan Data dan Gambar	Rp.	51,604,380
H. Peralatan IT Keamanan Gedung	Rp.	2,100,218,096
II. Software		
A. Database Engine	Rp.	860,973,600
B. Digitalisasi dan Document Management	Rp.	2,107,404,000
C. Aplikasi Administrasi KPDDP	Rp.	-
Jumlah Total Biaya Perangkat TIK		Rp. 28,564,905,301
Biaya Penyusutan :		
Harga Perangkat TIK :		28,564,905,301
Nilai penyusutan Perangkat TIK (12 Tahun)		12
(Nilai Sisa 10 %)		2,856,490,530
Jumlah Total Penyusutan		2,142,367,898
Biaya Pegawai Outsource		
1)	Gaji Pegawai Outsource	
	Pemilahan Dokumen	30
	Pemindaian Dokumen	8
	Quality Control	10
	Document Review	10
	Data Entry	-
	Completion Supervisor	-
	Pengemasan Ulang	10
	- Jumlah Pegawai	68
	- Gaji rata-rata / orang / bulan	1,518,750
	Jumlah gaji / tahun	1,239,300,000
2)	Tunjangan	
a)	Uang makan / orang / hari	10,000
	Biaya uang makan / tahun	680,000
c)	Kesehatan / orang / bulan	15,000
	Biaya kesehatan / tahun	1,020,000
d)	Pakaian dinas 2 (dua) stel / orang / tahun	400,000
	Biaya pakaian dinas/tahun	27,200,000
e)	JAMSOSTEK 10% x total gaji	10,327,500
f)	Tunjangan Hari Raya (1 x gaji) dan jasa produksi	103,275,000
	Jumlah Tunjangan / Tahun	142,502,500
Jumlah Total Biaya Pegawai Outsource + Tunjangan		1,381,802,500

Biaya Repairs, Maintenance		Lanjutan Lampiran 2-2	
Biaya ini meliputi pekerjaan :			
1)	Pemeliharaan / Perawatan Harian Hardware dan Software		
2)	Pemeliharaan Peralatan Incidental		
3)	Peralatan dan Perlengkapan Hardware dan Software		
Adapun Biaya maintenance tersebut 15% /tahun dari Harga Perolehan Perangkat TIK		4,284,735,795	
Jumlah Biaya Repairs, Maintenance		4,284,735,795	
Biaya Kemasan / Box SPT			
Jumlah Kemasan yang dibutuhkan		1,564	
Harga per kemasan		27,500	
Jumlah Biaya Kemasan / Box SPT		43,013,098	
Biaya Tidak Tetap			
Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan			
1)	Jasa Sewa Mobil		
-	Pemakaian kendaraan Mobil per bulan	3,000,000	
-	Jumlah Kendaraan Mobil	2	
-	Biaya Kendaraan Mobil per tahun	72,000,000	
2)	Jasa Kurir		
-	Biaya Pengiriman/pengambilan		
-	Biaya Pengiriman/pengambilan per tahun	637,292,452	
Jumlah Total Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan		709,292,452	
Biaya Operasional Tidak Langsung		8,093,479,740	
Biaya Tetap			
Biaya Pegawai KPDDP Makasar			
a.	Gaji Pegawai PNS		
	Golongan IV	1	15,000,000
	Golongan III	9	10,000,000
	Golongan II	50	6,000,000
-	Jumlah pegawai	60	
-	Gaji rata-rata / orang / bulan	10,333,333	10,333,333
	Jumlah gaji / tahun	7,439,999,760	
b.	Tunjangan		
1)	Tunjangan Gaji ke 13 (1 x gaji) dan jasa produksi	10,333,333	
	Biaya Tunjangan Pegawai PNS / Tahun	619,999,980	
Jumlah Total Biaya Pegawai KPDDP Makasar		8,059,999,740	
Biaya Tidak Tetap			
Biaya Administrasi dan Umum.			
a.	Biaya ATK dan barang cetakan		
-	Rata-rata / bulan		
-	Beban Biaya / Kantor / Tahun		
b.	Biaya Telephone; Pos; Listrik dan Air Tawar		
-	Rata-rata / bulan		
-	Beban Biaya / Kantor / Tahun		
c.	Biaya Inventaris Kantor		
-	Total nilai investasi		
-	Nilai ekonomis		
-	Pembebanan biaya / tahun.		
-	Beban Biaya / Kantor / Tahun		
d.	Biaya Perjalanan Dinas		
-	Biaya perjalanan dibebankan untuk /orang	3	
-	Biaya Tiket pp. rata-rata / Orang	1,500,000	4,500,000
-	Uang Harian diperhitungkan selama 3 hari/orang	360,000	1,080,000
-	Perjalanan Dinas / Tahun sebanyak	6	
-	Beban Biaya / Kantor / Tahun	33,480,000	
Jumlah Total Biaya Administrasi Umum		33,480,000	

JUMLAH Perangkat TIK (unit)	1
HARGA PER UNIT	28,564,905,301
TOTAL HARGA PEROLEHAN	28,564,905,301
NILAI SISA	2,856,490,530
UMUR EKONOMIS (tahun)	12
Nilai Depresiasi	2,142,367,898

AWAL TAHUN	DEBIT DEPRESIASI	KREDIT AKM DEPR	TOTAL AKM DEPRESIASI	NILAI BUKU
0	-	-	-	28,564,905,301
1	2,142,367,898	2,142,367,898	2,142,367,898	26,422,537,403
2	2,142,367,898	2,142,367,898	4,284,735,795	24,280,169,506
3	2,142,367,898	2,142,367,898	6,427,103,693	22,137,801,608
4	2,142,367,898	2,142,367,898	8,569,471,590	19,995,433,711
5	2,142,367,898	2,142,367,898	10,711,839,488	17,853,065,813
6	2,142,367,898	2,142,367,898	12,854,207,385	15,710,697,916
7	2,142,367,898	2,142,367,898	14,996,575,283	13,568,330,018
8	2,142,367,898	2,142,367,898	17,138,943,181	11,425,962,120
9	2,142,367,898	2,142,367,898	19,281,311,078	9,283,594,223
10	2,142,367,898	2,142,367,898	21,423,678,976	7,141,226,325
11	2,142,367,898	2,142,367,898	23,566,046,873	4,998,858,428
12	2,142,367,898	2,142,367,898	25,708,414,771	2,856,490,530
13	2,142,367,898	2,142,367,898	27,850,782,669	714,122,633
14	2,142,367,898	2,142,367,898	29,993,150,566	(1,428,245,265)
15	2,142,367,898	2,142,367,898	32,135,518,464	(3,570,613,163)
16	2,142,367,898	2,142,367,898	34,277,886,361	(5,712,981,060)
17	2,142,367,898	2,142,367,898	36,420,254,259	(7,855,348,958)
18	2,142,367,898	2,142,367,898	38,562,622,156	(9,997,716,855)
19	2,142,367,898	2,142,367,898	40,704,990,054	(12,140,084,753)
20	2,142,367,898	2,142,367,898	42,847,357,952	(14,282,452,651)

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

(Rp. Ribuan)

Sumber Dana		Penggunaan Dana	
Modal Sendiri (Pemerintah)	28,564,905,301	Pembelian Perangkat TIK KPDDP Makasar	28,564,905,301
Pinjaman	0	Lain-lain	0
Jumlah	<u>28,564,905,301</u>	Jumlah	<u>28,564,905,301</u>

**KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAF
(UMUR PERANGKAT 12 TAHUN)**

I BIAYA LANGSUNG			
1 Biaya Tetap			
a. Investasi Perangkat TIK	=	Rp.	28,564,905,301
b. Biaya Pegawai Outsource Gaji Upah Tunjangan	=	Rp.	1,381,802,500
c. Biaya Penyusutan	=	Rp.	2,142,367,898
			12 Tahun
d. Biaya Repairs, Maintenance dan Supplie	=	Rp.	4,284,735,795
e. Biaya Kemasan / Box SPT	=	Rp.	43,013,098
JUMLAH BIAYA TETAP			= Rp. 36,416,824,592
2 Biaya Tidak Tetap			
a. Jasa Sewa Mobil	=	Rp.	72,000,000
b. Jasa Kurir	=	Rp.	637,292,452
JUMLAH BIAYA TIDAK TETAP			= Rp. 709,292,452
II BIAYA TAK LANGSUNG (Asumsi Tidak menambah biaya tak langsung kecuali SPJ ABK untuk pelatih:			
1 Biaya Tetap			
a. Biaya Pegawai KPDDP Makasaf Gaji Upah Tunjangan	=	Rp.	7,439,999,760
	=	Rp.	619,999,980
b. Biaya Pengelolaan dan Manajeme	=	Rp.	0
JUMLAH BIAYA TETAP			= Rp. 8,059,999,740
2 Biaya Tidak Tetap			
a. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetaka	=	Rp.	0
b. Biaya Telepon, Telegram, Pos, Listrik dan Air Tawa	=	Rp.	0
c. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	=	Rp.	0
D. Biaya Lain-lain SPPE	=	Rp.	33,480,000
JUMLAH BIAYA TIDAK TETAP			= Rp. 33,480,000
III TOTAL BIAYA PER TAHUN			
a. JUMLAH BIAYA LANGSUNG	=	Rp.	37,126,117,044
b. JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG	=	Rp.	8,093,479,740
TOTAL BIAYA			= Rp. 45,219,596,784
IV PERKIRAAN PENDAPATAN & HASIL USAHA			
a.			
Penerimaan Pajak di lingkungan KPDDP Makasaf	=	Rp.	3,306,995,717
- Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara	=	Rp.	2,902,123,949
- Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulteng, Gorontalo, Maluku	=	Rp.	4,751,953,192
- Kanwil DJP Papua, Maluku Jumlah	=	Rp.	10,961,072,858
d. PERKIRAAN PENDAPATAN	=	Rp.	10,961,072,857,530
e. PERKIRAAN BIAYA	=	Rp.	45,219,596,784
f. SISA HASIL USAHA	=	Rp.	10,915,853,260,746
SISA HASIL USAHA PER THN	=	Rp.	10,915,853,260,746

PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAR
FEDERATED SCAN AND CENTRALIZED CAPTURE MODEL
(UMUR PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

Lanjutan Lampiran 2-5

Bunga 0

(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	0	1	2	3	4	5	
A. MODAL KERJA							
B. PENDAPATAN							
- Kanwil DJP							
1. Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	3,306,995,717	3,970,379,058	4,766,837,097	5,723,064,619	6,871,111,381	8,249,456,324	
2. Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku	2,902,123,949	3,484,290,013	4,183,238,590	5,022,396,251	6,029,888,938	7,239,484,660	
3. Kanwil DJP Papua, Maluku	4,751,953,192	5,705,195,002	6,849,657,119	8,223,698,337	9,873,372,224	11,853,970,692	
	10,961,072,858	13,159,864,073	15,799,732,806	18,969,159,207	22,774,372,543	27,342,911,676	
C. B I A Y A							
I Biaya Langsung							
a. Perangkat IT	28,564,905	0	0	0	0	0	
b. Pegawai Outsource	1,381,803	1,450,893	1,523,437	1,599,609	1,679,590	1,763,569	
c. Biaya Penyusutan	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	
d. Biaya Biaya Repairs, Maintenance dan Supplies	4,284,736	4,927,446	5,666,563	6,516,548	7,494,030	8,618,134	
e. Biaya Kemasan / Box SPT	43,013	47,314	52,046	57,250	62,975	69,273	
f. Biaya Operasional	709,292	780,222	858,244	944,068	1,038,475	1,142,323	
II Biaya Tak Langsung							
a. Karyawan PNS	7,440,000	7,440,000	8,184,000	9,002,400	9,902,640	10,892,904	
b. Tunjangan Pengelolaan dan Manajemen	620,000	620,000	682,000	750,200	825,220	907,742	
c. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	0	0	0	0	0	0	
d. Biaya Telepon, Telegram, Listrik dan Pos	0	0	0	0	0	0	
e. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	
f. Biaya Lain-lain	45,186,117	33,480	35,154	36,912	38,757	40,695	
	45,219,597	17,443,397	19,145,569	21,051,200	23,185,993	25,579,042	
TOTAL BIAYA	45,219,597	17,443,397	19,145,569	21,051,200	23,185,993	25,579,042	
D. RUGI / LABA							
- Akumulasi R / L sebelum Pajak	10,915,853,261	13,142,420,676	15,780,587,236	18,948,108,006	22,751,186,551	27,317,332,633	
- Pajak Pendapatan	0	0	0	0	0	0	
- Akumulasi R / L setelah Pajak	10,915,853,261	13,142,420,676	15,780,587,236	18,948,108,006	22,751,186,551	27,317,332,633	
- Akumulasi R / L tanpa penyusutan	10,917,995,629	13,144,563,044	15,782,729,604	18,950,250,374	22,753,328,919	27,319,475,001	
PERHITUNGAN CASH FLOW							
- Saldo Awal	-	(28,564,905)	10,889,430,723	24,033,993,767	39,816,723,372	58,766,973,746	81,520,302,665
- Investasi	(28,564,905)	0	0	0	0	0	
- Penyusutan	-	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	
- Pinjaman	-	0	0	0	0	0	
- Pembayaran Bunga & Cicilan	-	0	0	0	0	0	
- Cash in flow	-	10,917,995,629	13,144,563,044	15,782,729,604	18,950,250,374	22,753,328,919	27,319,475,001
- Saldo Akhir	(28,564,905)	10,889,430,723	24,033,993,767	39,816,723,372	58,766,973,746	81,520,302,665	108,839,777,666

PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAR
FEDERATED SCAN AND CENTRALIZED CAPTURE MODEL
(UMUR PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

Lanjutan Lampiran 2-6

(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	6	7	8	9	10	11	12
A. MODAL KERJA							
B. PENDAPATAN							
- Kanwil DJP							
1. Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	9,904,297,263	11,891,099,294	14,276,453,812	17,140,310,447	20,578,656,723	24,706,735,261	29,662,906,354
2. Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku	8,691,725,282	10,435,285,374	12,528,603,620	15,041,841,506	18,059,234,912	21,681,917,435	26,031,310,073
3. Kanwil DJP Papua, Maluku	14,231,877,213	17,086,791,782	20,514,402,213	24,629,591,297	29,570,287,311	35,502,086,946	42,623,805,587
	32,827,899,758	39,413,176,449	47,319,459,645	56,811,743,250	68,208,178,945	81,890,739,642	98,318,022,014
C. B I A Y A							
I Biaya Langsung							
a. Perangkat IT	0	0	0	0	0	0	0
b. Pegawai Outsource	1,851,748	1,944,335	2,041,552	2,143,629	2,250,811	2,363,351	2,481,519
c. Biaya Penyusutan	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368
d. Biaya Biaya Repairs, Maintenance dan Supplies	9,910,854	11,397,482	13,107,105	15,073,170	17,334,146	19,934,268	22,924,408
e. Biaya Kemasan / Box SPT	76,200	83,820	92,202	101,423	111,565	122,721	134,994
f. Biaya Operasional	1,256,555	1,382,210	1,520,431	1,672,475	1,839,722	2,023,694	2,226,064
II Biaya Tak Langsung							
a. Karyawan PNS	11,982,194	13,180,413	14,498,455	15,948,300	17,543,130	19,297,443	21,227,188
b. Tunjangan Pengelolaan dan Manajemen	998,516	1,098,368	1,208,205	1,329,025	1,461,928	1,608,120	1,768,932
c. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	0	0	0	0	0	0	0
d. Biaya Telepon, Telegram, Listrik dan Pos	0	0	0	0	0	0	0
e. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0
f. Biaya Lain-lain	44,866	47,110	49,465	51,938	54,535	57,262	60,125
TOTAL BIAYA	28,263,301	31,276,107	34,659,783	38,462,328	42,738,205	47,549,228	52,965,597
D. RUGI / LABA							
- Akumulasi R / L sebelum Pajak	32,799,636,456	39,381,900,342	47,284,799,862	56,773,280,921	68,165,440,741	81,843,190,414	98,265,056,417
- Pajak Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0
- Akumulasi R / L setelah Pajak	32,799,636,456	39,381,900,342	47,284,799,862	56,773,280,921	68,165,440,741	81,843,190,414	98,265,056,417
- Akumulasi R / L tanpa penyusutan	32,801,778,824	39,384,042,710	47,286,942,230	56,775,423,289	68,167,583,109	81,845,332,782	98,267,198,785
PERHITUNGAN CASH FLOW							
- Saldo Awal	108,839,777,666	141,641,556,490	181,025,599,201	228,312,541,431	285,087,964,720	353,255,547,829	435,100,880,610
- Investasi	0	0	0	0	0	0	0
- Penyusutan	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368	2,142,368
- Pinjaman	0	0	0	0	0	0	0
- Pembayaran Bunga & Cicilan	0	0	0	0	0	0	0
- Cash in flow	32,801,778,824	39,384,042,710	47,286,942,230	56,775,423,289	68,167,583,109	81,845,332,782	98,267,198,785
- Saldo Akhir	141,641,556,490	181,025,599,201	228,312,541,431	285,087,964,720	353,255,547,829	435,100,880,610	533,368,079,395



LAMPIRAN 3
ANALISA FINANSIAL
DISTRIBUTED SCAN AND CENTRALIZED CAPTURE MODEL

Lanjutan Lampiran 3-1

(Distributed Scan and Centralized Capture Model)		
Total Perhitungan Biaya		72,571,223,660
Biaya Operasional Langsung		64,477,743,920
Biaya Tetap		
Perangkat TIK (include maintainance 3 tahun)		
I. Hardware		
A. Server	Rp.	3,841,059,000
B. Workstation	Rp.	3,193,270,299
C. Note Book	Rp.	142,925,220
D. Scanner	Rp.	-
E. Back Up System Device	Rp.	11,686,000
F. Media Komunikasi dan Network	Rp.	12,412,550,120
G. Storage	Rp.	12,947,367,828
H. Others	Rp.	1,965,812,008
II. Software		
A. Database Engine	Rp.	860,973,600
B. Digitalisasi dan Document Management	Rp.	14,356,302,492
C. Aplikasi Administrasi KPDDP	Rp.	-
Jumlah Total Biaya Perangkat TIK		Rp. 49,731,946,567
Biaya Penyusutan :		
Harga Perangkat TIK :		49,731,946,567
Nilai penyusutan Perangkat TIK (12 Tahun)		12
(Nilai Sisa 10 %)		4,973,194,657
Jumlah Total Penyusutan		3,729,895,993
Biaya Pegawai Outsource		
1)	Gaji Pegawai Outsource	
	Pemilahan Dokumen	-
	Pemindaian Dokumen	-
	Quality Control	-
	Document Review	-
	Data Entry	
	Completion	150
	Supervisor	25
	Pengemasan Ulang	-
-	Jumlah Pegawai	175
-	Gaji rata-rata / orang / bulan	1,518,750
	Jumlah gaji / tahun	3,189,375,000
2)	Tunjangan	
a)	Uang makan / orang / hari	10,000
	Biaya uang makan / tahun	1,750,000
c)	Kesehatan / orang / bulan	15,000
	Biaya kesehatan / tahun	2,625,000
d)	Pakaian dinas 2 (dua) stel / orang / tahun	400,000
	Biaya pakaian dinas/tahun	70,000,000
e)	JAMSOSTEK 10% x total gaji	26,578,125
f)	Tunjangan Hari Raya (1 x gaji) dan jasa produksi	265,781,250
	Jumlah Tunjangan / Tahun	366,734,375
Jumlah Total Biaya Pegawai Outsource + Tunjangan		3,556,109,375
Biaya Repairs, Maintanance		
Biaya ini meliputi pekerjaan :		
1)	Pemeliharaan / Perawatan Harian Hardware dan Software	

2) Pemeliharaan Peralatan Incidental		
3) Peralatan dan Perlengkapan Hardware dan Software		
Adapun Biaya maintenance tersebut 15% /tahun dari Harga Perolehan Perangkat TIK		7,459,791,985
Jumlah Biaya Repairs, Maintenance		7,459,791,985
Biaya Kemasan / Box SPT		
Jumlah Kemasan yang dibutuhkan		-
Harga per kemasan		27,500
Jumlah Biaya Kemasan / Box SPT		-
Biaya Tidak Tetap		
Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan		
1) Jasa Sewa Mobil		
- Pemakaian kendaraan Mobil per bulan		-
- Jumlah Kendaraan Mobil		2
- Biaya Kendaraan Mobil per tahun		-
2) Jasa Kurir		
- Biaya Pengiriman/pengambilan		-
- Biaya Pengiriman/pengambilan per tahun.		-
Jumlah Total Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan		-
Biaya Operasional Tidak Langsung		8,093,479,740
Biaya Tetap		
Biaya Pegawai KPDDP Makasar		
a. Gaji Pegawai PNS		
Golongan IV		1
Golongan III		9
Golongan II		50
- Jumlah pegawai		60
- Gaji rata-rata / orang / bulan		10,333,333
Jumlah gaji / tahun		7,439,999,760
b. Tunjangan		
1) Tunjangan Gaji ke 13 (1 x gaji) dan jasa produksi		10,333,333
Biaya Tunjangan Pegawai PNS / Tahun		619,999,980
Jumlah Total Biaya Pegawai KPDDP Makasar		8,059,999,740
Biaya Tidak Tetap		
Biaya Administrasi dan Umum.		
a. Biaya ATK dan barang cetakan		
- Rata-rata / bulan		
- Beban Biaya / Kantor / Tahun		
b. Biaya Telephone; Pos; Listrik dan Air Tawar		
- Rata-rata / bulan		
- Beban Biaya / Kantor / Tahun		
c. Biaya Inventaris Kantor		
- Total nilai investasi		
- Nilai ekonomis		
- Pembebanan biaya / tahun.		
- Beban Biaya / Kantor / Tahun		
d. Biaya Perjalanan Dinas		
- Biaya perjalanan dibebankan untuk /orang		3
- Biaya Tiket pp. rata-rata / Orang		1,500,000
- Uang Harian diperhitungkan selama 3 hari/orang		360,000
- Perjalanan Dinas / Tahun sebanyak		6
- Beban Biaya / Kantor / Tahun		33,480,000
Jumlah Total Biaya Administrasi Umum		33,480,000

Lanjutan Lampiran 3-2

JUMLAH Perangkat TIK (unit)	1
HARGA PER UNIT	49,731,946,567
TOTAL HARGA PEROLEHAN	49,731,946,567
NILAI SISA	4,973,194,657
UMUR EKONOMIS (tahun)	12
Nilai Depresiasi	3,729,895,993

AWAL TAHUN	DEBIT DEPRESIASI	KREDIT AKM DEPR	TOTAL AKM DEPRESIASI	NILAI BUKU
0	-	-	-	49,731,946,567
1	3,729,895,993	3,729,895,993	3,729,895,993	46,002,050,574
2	3,729,895,993	3,729,895,993	7,459,791,985	42,272,154,582
3	3,729,895,993	3,729,895,993	11,189,687,978	38,542,258,589
4	3,729,895,993	3,729,895,993	14,919,583,970	34,812,362,597
5	3,729,895,993	3,729,895,993	18,649,479,963	31,082,466,604
6	3,729,895,993	3,729,895,993	22,379,375,955	27,352,570,612
7	3,729,895,993	3,729,895,993	26,109,271,948	23,622,674,619
8	3,729,895,993	3,729,895,993	29,839,167,940	19,892,778,627
9	3,729,895,993	3,729,895,993	33,569,063,933	16,162,882,634
10	3,729,895,993	3,729,895,993	37,298,959,925	12,432,986,642
11	3,729,895,993	3,729,895,993	41,028,855,918	8,703,090,649
12	3,729,895,993	3,729,895,993	44,758,751,910	4,973,194,657
13	3,729,895,993	3,729,895,993	48,488,647,903	1,243,298,664
14	3,729,895,993	3,729,895,993	52,218,543,895	(2,486,597,328)
15	3,729,895,993	3,729,895,993	55,948,439,888	(6,216,493,321)
16	3,729,895,993	3,729,895,993	59,678,335,880	(9,946,389,313)
17	3,729,895,993	3,729,895,993	63,408,231,873	(13,676,285,306)
18	3,729,895,993	3,729,895,993	67,138,127,865	(17,406,181,298)
19	3,729,895,993	3,729,895,993	70,868,023,858	(21,136,077,291)
20	3,729,895,993	3,729,895,993	74,597,919,850	(24,865,973,283)

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

(Rp. Ribuan)

Sumber Dana		Penggunaan Dana	
Modal Sendiri (Pemerintah)	49,731,946,567	Pembelian Perangkat TIK KPDDP Makasar	49,731,946,567
Pinjaman	0	Lain-lain	0
Jumlah	<u>49,731,946,567</u>	Jumlah	<u>49,731,946,567</u>

PERHITUNGAN BIAYA POKOK DISTRIBUTED SCAN AND CENTRALIZED CAPTURE

Lanjutan Lampiran 3-4

**KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAF
(UMUR PERANGKATIK 12 TAHUN)**

I BIAYA LANGSUNG			
1 Biaya Tetap			
a. Investasi Perangkat TIK	=	Rp.	49,731,946,567
b. Biaya Pegawai Outsource Gaji Upah Tunjangan	=	Rp.	3,556,109,375
c. Biaya Penyusutan	=	Rp.	4,973,194,657
		12 Tahun	
d. Biaya Repairs, Maintenance dan Supplie	=	Rp.	7,459,791,985
e. Biaya Kemasan / Box SPT	=	Rp.	-
JUMLAH BIAYA TETAP			= Rp. 64,477,743,920
2 Biaya Tidak Tetap			
a. Jasa Sewa Mobil	=	Rp.	0
b. Jasa Kurir	=	Rp.	0
JUMLAH BIAYA TIDAK TETAP			= Rp. 0
II BIAYA TAK LANGSUNG (Asumsi Tidak menambah biaya tak langsung kecuali SPJ ABK untuk pelatih:			
1 Biaya Tetap			
a. Biaya Pegawai KPDDP Makasaf Gaji Upah Tunjangan	=	Rp.	7,439,999,760
	=	Rp.	619,999,980
b. Biaya Pengelolaan dan Manajeme	=	Rp.	0
JUMLAH BIAYA TETAP			= Rp. 8,059,999,740
2 Biaya Tidak Tetap			
a. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetaka	=	Rp.	0
b. Biaya Telepon, Telegram, Pos, Listrik dan Air Tawa	=	Rp.	0
c. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	=	Rp.	0
D. Biaya Lain-lain SPPE	=	Rp.	33,480,000
JUMLAH BIAYA TIDAK TETAP			= Rp. 33,480,000
III TOTAL BIAYA PER TAHUN			
a. JUMLAH BIAYA LANGSUNG	=	Rp.	64,477,743,920
b. JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG	=	Rp.	8,093,479,740
TOTAL BIAYA			= Rp. 72,571,223,660
IV PERKIRAAN PENDAPATAN & HASIL USAHA			
a.	Penerimaan Pajak di lingkungan KPDDP Makasaf	=	Rp.
	- Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara	=	Rp.
	- Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulteng, Gorontalo, Maluku	=	Rp.
	- Kanwil DJP Papua, Maluku	=	Rp.
	Jumlah		10,961,072,858
d.	PERKIRAAN PENDAPATAN	=	Rp.
e.	PERKIRAAN BIAYA	=	Rp.
f.	SISA HASIL USAHA	=	Rp.
SISA HASIL USAHA PER THN			= Rp. 10,888,501,633,870

PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAR
DISTRIBUTED SCAN AND CENTRALIZED CAPTURE MODEL
(UMUR PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

Bunga 0

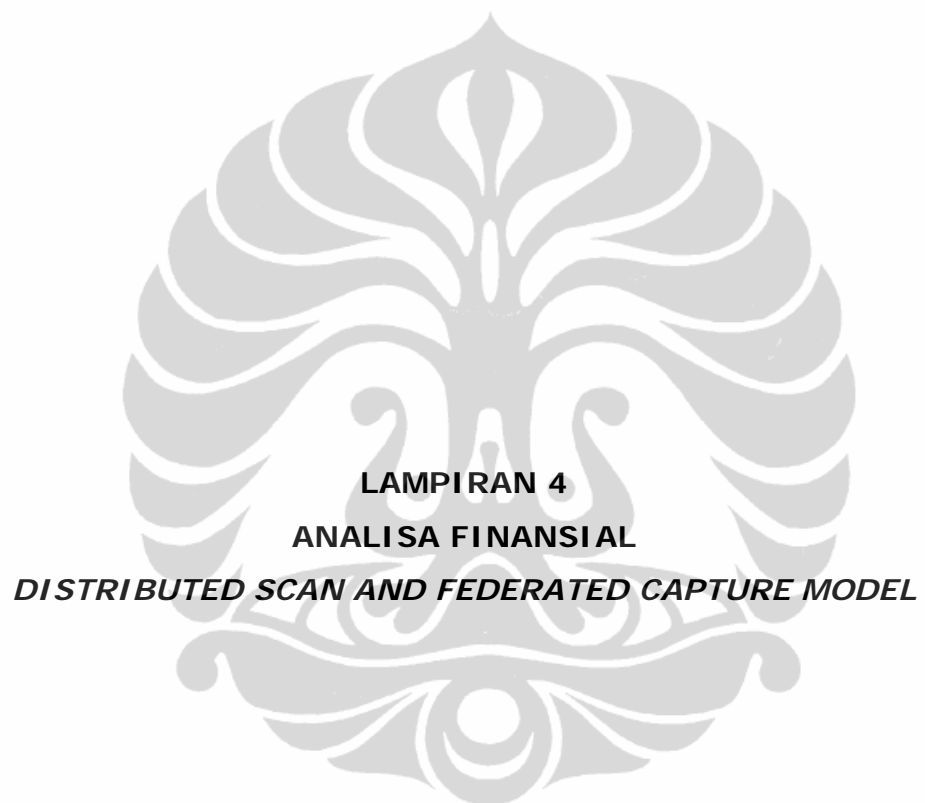
(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	0	1	2	3	4	5	6	
A. MODAL KERJA	-							
B. PENDAPATAN								
#NAME?								
1. Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	3,306,995,717	3,970,379,058	4,766,837,097	5,723,064,619	6,871,111,381	8,249,456,324	9,904,297,263	
2. Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku	2,902,123,949	3,484,290,013	4,183,238,590	5,022,396,251	6,029,888,938	7,239,484,660	8,691,725,282	
3. Kanwil DJP Papua, Maluku	4,751,953,192	5,705,195,002	6,849,657,119	8,223,698,337	9,873,372,224	11,853,970,692	14,231,877,213	
	10,961,072,858	13,159,864,073	15,799,732,806	18,969,159,207	22,774,372,543	27,342,911,676	32,827,899,758	
C. B I A Y A								
I Biaya Langsung								
a. Perangkat TIK	49,731,947							
B. Pegawai Outsourcing	3,556,109	3,733,915	3,920,611	4,116,641	4,322,473	4,538,597	4,765,527	
C. Biaya Penyusutan	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	
d. Biaya Biaya Repairs, Maintenance dan Supplies	7,459,792	8,578,761	9,865,575	11,345,411	13,047,223	15,004,306	17,254,952	
e. Biaya Kemasan / Box SPT	0	0	0	0	0	0	0	
f. Biaya Operasional	0	0	0	0	0	0	0	
II Biaya Tak Langsung								
a. Karyawan PNS	7,440,000	7,440,000	8,184,000	9,002,400	9,902,640	10,892,904	11,982,194	
b. Tunjangan Pengelolaan dan Manajemen	620,000	620,000	682,000	750,200	825,220	907,742	998,516	
c. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	0	0	0	0	0	0	0	
d. Biaya Telepon, Telegram, Listrik dan Pos	0	0	0	0	0	0	0	
e. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0	
f. Biaya Lain-lain	72,537,744	33,480	35,154	36,912	38,757	40,695	44,866	
TOTAL BIAYA	72,571,224	24,137,725	26,418,993	28,983,305	31,868,147	35,116,175	38,775,951	
D. RUGI / LABA								
- Akumulasi R / L sebelum Pajak	10,888,501,634							
- Pajak Pendapatan	10,888,501,634	13,135,726,347	15,773,313,813	18,940,175,901	22,742,504,397	27,307,795,501	32,789,123,806	
- Pajak Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0	
- Akumulasi R / L setelah Pajak	10,888,501,634	13,135,726,347	15,773,313,813	18,940,175,901	22,742,504,397	27,307,795,501	32,789,123,806	
- Akumulasi R / L tanpa penyusutan	10,892,231,530	13,139,456,243	15,777,043,709	18,943,905,797	22,746,234,293	27,311,525,397	32,792,853,702	
PERHITUNGAN CASH FLOW								
- Saldo Awal	-	(49,731,947)	10,842,499,583	23,981,955,827	39,758,999,536	58,702,905,333	81,449,139,626	108,760,665,023
- Investasi	(49,731,947)	0	0	0	0	0	0	
- Penyusutan	-	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	
- Pinjaman	-	0	0	0	0	0	0	
- Pembayaran Bunga & Cicilan	-	0	0	0	0	0	0	
- Cash in flow	-	10,892,231,530	13,139,456,243	15,777,043,709	18,943,905,797	22,746,234,293	27,311,525,397	32,792,853,702
- Saldo Akhir	(49,731,947)	10,842,499,583	23,981,955,827	39,758,999,536	58,702,905,333	81,449,139,626	108,760,665,023	141,553,518,725

PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAR
DISTRIBUTED SCAN AND CENTRALIZED CAPTURE MODEL
(UMUR PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	7	8	9	10	11	12
A. MODAL KERJA						
B. PENDAPATAN						
#NAME?						
1. Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	11,891,099,294	14,276,453,812	17,140,310,447	20,578,656,723	24,706,735,261	29,662,906,354
2. Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku	10,435,285,374	12,528,603,620	15,041,841,506	18,059,234,912	21,681,917,435	26,031,310,073
3. Kanwil DJP Papua, Maluku	17,086,791,782	20,514,402,213	24,629,591,297	29,570,287,311	35,502,086,946	42,623,805,587
	39,413,176,449	47,319,459,645	56,811,743,250	68,208,178,945	81,890,739,642	98,318,022,014
C. B I A Y A						
I Biaya Langsung						
a. Perangkat TIK						
B. Pegawai Outsource	5,003,803	5,253,993	5,516,693	5,792,527	6,082,154	6,386,262
C. Biaya Penyusutan	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896
d. Biaya Biaya Repairs, Maintenance dan Supplies	19,843,195	22,819,674	26,242,625	30,179,019	34,705,872	39,911,753
e. Biaya Kemas / Box SPT	0	0	0	0	0	0
f. Biaya Operasional	0	0	0	0	0	0
II Biaya Tak Langsung						
a. Karyawan PNS	13,180,413	14,498,455	15,948,300	17,543,130	19,297,443	21,227,188
b. Tunjangan Pengelolaan dan Manajemen	1,098,368	1,208,205	1,329,025	1,461,928	1,608,120	1,768,932
c. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	0	0	0	0	0	0
d. Biaya Telepon, Telegram, Listrik dan Pos	0	0	0	0	0	0
e. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	0	0	0	0	0	0
f. Biaya Lain-lain	47,110	49,465	51,938	54,535	57,262	60,125
TOTAL BIAYA	42,902,785	47,559,688	52,818,478	58,761,036	65,480,748	73,084,156
D. RUGI / LABA						
- Akumulasi R / L sebelum Pajak	39,370,273,664	47,271,899,957	56,758,924,772	68,149,417,910	81,825,258,894	98,244,937,859
- Pajak Pendapatan	0	0	0	0	0	0
- Akumulasi R / L setelah Pajak	39,370,273,664	47,271,899,957	56,758,924,772	68,149,417,910	81,825,258,894	98,244,937,859
- Akumulasi R / L tanpa penyusutan	39,374,003,560	47,275,629,853	56,762,654,668	68,153,147,806	81,828,988,790	98,248,667,755
PERHITUNGAN CASH FLOW						
- Saldo Awal	141,553,518,725	180,927,522,285	228,203,152,138	284,965,806,806	353,118,954,612	434,947,943,402
- Investasi	0	0	0	0	0	0
- Penyusutan	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896	3,729,896
- Pinjaman	0	0	0	0	0	0
- Pembayaran Bunga & Cicilan	0	0	0	0	0	0
- Cash in flow	39,374,003,560	47,275,629,853	56,762,654,668	68,153,147,806	81,828,988,790	98,248,667,755
- Saldo Akhir	180,927,522,285	228,203,152,138	284,965,806,806	353,118,954,612	434,947,943,402	533,196,611,156



Lanjutan Lampiran 4-1

(Distributed Scan and Federated Capture Model)		
Perincian Perhitungan Biaya		56,773,913,436
Biaya Operasional Langsung		48,680,433,696
Biaya Tetap		
Perangkat TIK (include maintenance 3 tahun)		
I. Hardware		
A. Server	Rp.	3,841,059,000
B. Workstation	Rp.	3,193,270,299
C. Note Book	Rp.	142,925,220
D. Scanner	Rp.	-
E. Back Up System Device	Rp.	11,686,000
F. Media Komunikasi dan Network	Rp.	12,412,550,120
G. Storage	Rp.	51,604,380
H. Others	Rp.	1,965,812,008
II. Software		
A. Database Engine	Rp.	860,973,600
B. Digitalisasi dan Document Management	Rp.	14,356,302,492
C. Aplikasi Administrasi KPDDP	Rp.	-
Jumlah Total Biaya Perangkat TIK		Rp. 36,836,183,119
Biaya Penyusutan :		
Harga Perangkat TIK :		36,836,183,119
Nilai penyusutan Perangkat TIK (12 Tahun)		12
(Nilai Sisa 10 %)		3,683,618,312
Jumlah Total Penyusutan		2,762,713,734
Biaya Pegawai Outsource		
1)	Gaji Pegawai Outsource	
	Pemilahan Dokumen	-
	Pemindaian Dokumen	-
	Quality Control	-
	Document Review	-
	Data Entry	
	Completion	150
	Supervisor	25
	Pengemasan Ulang	-
	Jumlah Pegawai	175
	Gaji rata-rata / orang / bulan	1,518,750
	Jumlah gaji / tahun	3,189,375,000
2)	Tunjangan	
a)	Uang makan / orang / hari	10,000
	Biaya uang makan / tahun	1,750,000
c)	Kesehatan / orang / bulan	15,000
	Biaya kesehatan / tahun	2,625,000
d)	Pakaian dinas 2 (dua) stel / orang / tahun	400,000
	Biaya pakaian dinas/tahun	70,000,000
e)	JAMSOSTEK 10% x total gaji	26,578,125
f)	Tunjangan Hari Raya (1 x gaji) dan jasa produksi	265,781,250
	Jumlah Tunjangan / Tahun	366,734,375
Jumlah Total Biaya Pegawai Outsource + Tunjangan		3,556,109,375
Biaya Repairs, Maintenance		
Biaya ini meliputi pekerjaan :		
1)	Pemeliharaan / Perawatan Harian Hardware dan Software	
2)	Pemeliharaan Peralatan Incidental	
3)	Peralatan dan Perlengkapan Hardware dan Software	
Adapun Biaya maintenance tersebut 15% /tahun dari Harga Perolehan Perangkat TIK mulai tahun ke 4		5,525,427,468
Jumlah Biaya Repairs, Maintenance		5,525,427,468

Biaya Kemasan / Box SPT		
Jumlah Kemasan yang dibutuhkan		-
Harga per kemasan		27,500
Jumlah Biaya Kemasan / Box SPT		-
Biaya Tidak Tetap		
Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan		
1)	Jasa Sewa Mobil	
-	Pemakaian kendaraan Mobil per bulan	-
-	Jumlah Kendaraan Mobil	2
-	Biaya Kendaraan Mobil per tahun	-
2)	Jasa Kurir	
-	Biaya Pengiriman/pengambilan	-
-	Biaya Pengiriman/pengambilan per tahun.	-
Jumlah Total Biaya Pengiriman / Pengambilan Kemasan		-
Biaya Operasional Tidak Langsung		8,093,479,740
Biaya Tetap		
Biaya Pegawai KPDDP Makasar		
a.	Gaji Pegawai PNS	
	Golongan IV	1
	Golongan III	9
	Golongan II	50
-	Jumlah pegawai	60
-	Gaji rata-rata / orang / bulan	10,333,333
	Jumlah gaji / tahun	7,439,999,760
b.	Tunjangan	
1)	Tunjangan Gaji ke 13 (1 x gaji) dan jasa produksi	10,333,333
	Biaya Tunjangan Pegawai PNS / Tahun	619,999,980
Jumlah Total Biaya Pegawai KPDDP Makasar		8,059,999,740
Biaya Tidak Tetap		
Biaya Administrasi dan Umum.		
a.	Biaya ATK dan barang cetakan	
-	Rata-rata / bulan	
-	Beban Biaya / Kantor / Tahun	
b.	Biaya Telephone; Pos; Listrik dan Air Tawar	
-	Rata-rata / bulan	
-	Beban Biaya / Kantor / Tahun	
c.	Biaya Inventaris Kantor	
-	Total nilai investasi	
-	Nilai ekononis	
-	Pembebanan biaya / tahun.	
-	Beban Biaya / Kantor / Tahun	
d.	Biaya Perjalanan Dinas	
-	Biaya perjalanan dibebankan untuk /orang	3
-	Biaya Tiket pp. rata-rata / Orang	1,500,000
-	Uang Harian diperhitungkan selama 3 hari/orang	360,000
-	Perjalanan Dinas / Tahun sebanyak	6
-	Beban Biaya / Kantor / Tahun	33,480,000
Jumlah Total Biaya Administrasi Umum		33,480,000

JUMLAH Perangkat TIK (unit)	1
HARGA PER UNIT	36,836,183,119
TOTAL HARGA PEROLEHAN	36,836,183,119
NILAI SISA	3,683,618,312
UMUR EKONOMIS (tahun)	12
Nilai Depresiasi	2,762,713,734

AWAL TAHUN	DEBIT DEPRESIASI	KREDIT AKM DEPR	TOTAL AKM DEPRESIASI	NILAI BUKU
0	-	-	-	36,836,183,119
1	2,762,713,734	2,762,713,734	2,762,713,734	34,073,469,385
2	2,762,713,734	2,762,713,734	5,525,427,468	31,310,755,651
3	2,762,713,734	2,762,713,734	8,288,141,202	28,548,041,917
4	2,762,713,734	2,762,713,734	11,050,854,936	25,785,328,183
5	2,762,713,734	2,762,713,734	13,813,568,670	23,022,614,449
6	2,762,713,734	2,762,713,734	16,576,282,404	20,259,900,715
7	2,762,713,734	2,762,713,734	19,338,996,137	17,497,186,982
8	2,762,713,734	2,762,713,734	22,101,709,871	14,734,473,248
9	2,762,713,734	2,762,713,734	24,864,423,605	11,971,759,514
10	2,762,713,734	2,762,713,734	27,627,137,339	9,209,045,780
11	2,762,713,734	2,762,713,734	30,389,851,073	6,446,332,046
12	2,762,713,734	2,762,713,734	33,152,564,807	3,683,618,312
13	2,762,713,734	2,762,713,734	35,915,278,541	920,904,578
14	2,762,713,734	2,762,713,734	38,677,992,275	(1,841,809,156)
15	2,762,713,734	2,762,713,734	41,440,706,009	(4,604,522,890)
16	2,762,713,734	2,762,713,734	44,203,419,743	(7,367,236,624)
17	2,762,713,734	2,762,713,734	46,966,133,477	(10,129,950,358)
18	2,762,713,734	2,762,713,734	49,728,847,211	(12,892,664,092)
19	2,762,713,734	2,762,713,734	52,491,560,945	(15,655,377,826)
20	2,762,713,734	2,762,713,734	55,254,274,678	(18,418,091,559)

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

(Rp. Ribuan)

Sumber Dana		Penggunaan Dana	
Modal Sendiri (Pemerintah)	36,836,183,119	Pembelian Perangkat TIK KPDDP Makasar	36,836,183,119
Pinjaman	0	Lain-lain	0
Jumlah	<u>36,836,183,119</u>	Jumlah	<u>36,836,183,119</u>

PERHITUNGAN BIAYA POKOK DISTRIBUTED SCAN AND FEDERATED CAPTURE

Lanjutan Lampiran 4-4

**KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAF
(UMUR PERANGKATIK 12 TAHUN)**

I BIAYA LANGSUNG			
1 Biaya Tetap			
a. Investasi Perangkat TIK	=	Rp. 36,836,183,119	= Rp. 36,836,183,119
a. Biaya Pegawai Outsource Gaji Upah Tunjangan Pengolahan Lembar SPT	=		= Rp. 3,556,109,375
b. Biaya Penyusutan	=	Rp. 36,836,183,119 - Rp. 3,683,618,312 12 Tahun	= Rp. 2,762,713,734
d. Biaya Repairs, Maintenance dan Supplie	=		= Rp. 5,525,427,468
e. Biaya Kemasan / Box SPT	=		= Rp. -
JUMLAH BIAYA TETAP			= Rp. 48,680,433,696
2 Biaya Tidak Tetap			
a. Jasa Sewa Mobil	=		= Rp. 0
b. Jasa Kurir	=		= Rp. 0
JUMLAH BIAYA TIDAK TETAP			= Rp. 0
II BIAYA TAK LANGSUNG (Asumsi Tidak menambah biaya tak langsung kecuali SPJ ABK untuk pelatih:			
1 Biaya Tetap			
a. Biaya Pegawai KPDDP Makasaf Gaji Upah Tunjangan	=		= Rp. 7,439,999,760
	=		= Rp. 619,999,980
b. Biaya Pengelolaan dan Manajeme	=		= Rp. 0
JUMLAH BIAYA TETAP			= Rp. 8,059,999,740
2 Biaya Tidak Tetap			
a. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetaka	=		= Rp. 0
b. Biaya Telepon, Telegram, Pos, Listrik dan Air Tawa	=		= Rp. 0
c. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	=		= Rp. 0
D. Biaya Lain-lain SPPE	=		= Rp. 33,480,000
JUMLAH BIAYA TIDAK TETAP			= Rp. 33,480,000
III TOTAL BIAYA PER TAHUN			
a. JUMLAH BIAYA LANGSUNG	=		= Rp. 48,680,433,696
b. JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG	=		= Rp. 8,093,479,740
TOTAL BIAYA			= Rp. 56,773,913,436
IV PERKIRAAN PENDAPATAN & HASIL USAHA			
a.	Penerimaan Pajak di lingkungan KPDDP Makasa	=	Rp. 3,306,995,717
	- Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara	=	Rp. 2,902,123,949
	- Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulteng, Gorontalo, Maluku	=	Rp. 4,751,953,192
	- Kanwil DJP Papua, Maluku Jumlah	=	Rp. 10,961,072,858
d.	PERKIRAAN PENDAPATAN	=	Rp. 10,961,072,857,536
e.	PERKIRAAN BIAYA	=	Rp. 56,773,913,436
f.	SISA HASIL USAHA	=	Rp. 10,904,298,944,094
SISA HASIL USAHA PER THN			= Rp. 10,904,298,944,094

PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAR
DISTRIBUTED SCAN AND FEDERATED MODEL
(UMUR PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

Bunga 0
(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	0	1	2	3	4	5	
A. MODAL KERJA	-						
B. PENDAPATAN							
- Kanwil DJP							
1. Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	3,306,995,717	3,970,379,058	4,766,837,097	5,723,064,619	6,871,111,381	8,249,456,324	
2. Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku	2,902,123,949	3,484,290,013	4,183,238,590	5,022,396,251	6,029,888,938	7,239,484,660	
3. Kanwil DJP Papua, Maluku	4,751,953,192	5,705,195,002	6,849,657,119	8,223,698,337	9,873,372,224	11,853,970,692	
	10,961,072,858	13,159,864,073	15,799,732,806	18,969,159,207	22,774,372,543	27,342,911,676	
C. B I A Y A							
I Biaya Langsung							
a. Perangkat IT	36,836,183	0	0	0	0	0	
b. Pegawai Outsourc	3,556,109	3,733,915	3,920,611	4,116,641	4,322,473	4,538,597	
c. Biaya Penyusutan	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	
d. Biaya Biaya Repairs, Maintenance dan Supplies	5,525,427	6,354,242	7,307,378	8,403,485	9,664,007	11,113,608	
e. Biaya Kemasan / Box SPT	0	0	0	0	0	0	
f. Biaya Operasional	0	0	0	0	0	0	
II Biaya Tak Langsung							
a. Karyawan PNS	7,440,000	7,440,000	8,184,000	9,002,400	9,902,640	10,892,904	
b. Tunjangan Pengelolaan dan Manajemen	620,000	620,000	682,000	750,200	825,220	907,742	
c. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	0	0	0	0	0	0	
d. Biaya Telepon, Telegram, Listrik dan Pos	0	0	0	0	0	0	
e. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	
f. Biaya Lain-lain	56,740,433	33,480	35,154	38,757	40,695	42,730	
TOTAL BIAYA	56,773,913	20,946,024	22,893,614	25,074,196	27,517,749	30,258,294	
D. RUGI / LABA							
- Akumulasi R / L sebelum Pajak	10,904,298,944						
- Pajak Pendapatan	10,904,298,944	13,138,918,049	15,776,839,192	18,944,085,010	22,746,854,795	27,312,653,381	
- Akumulasi R / L setelah Pajak	0	0	0	0	0	0	
- Akumulasi R / L tanpa penyusutan	10,904,298,944	13,138,918,049	15,776,839,192	18,944,085,010	22,746,854,795	27,312,653,381	
- Akumulasi R / L tanpa penyusutan	10,907,061,658	13,141,680,763	15,779,601,906	18,946,847,724	22,749,617,508	27,315,416,095	
PERHITUNGAN CASH FLOW							
- Saldo Awal	-	(36,836,183)	10,870,225,475	24,011,906,237	39,791,508,143	58,738,355,867	81,487,973,375
- Investasi	(36,836,183)	0	0	0	0	0	0
- Penyusutan	-	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714
- Pinjaman	-	0	0	0	0	0	0
- Pembayaran Bunga & Cicilan	-	0	0	0	0	0	0
- Cash in flow	-	10,907,061,658	13,141,680,763	15,779,601,906	18,946,847,724	22,749,617,508	27,315,416,095
- Saldo Akhir	(36,836,183)	10,870,225,475	24,011,906,237	39,791,508,143	58,738,355,867	81,487,973,375	108,803,389,470

PROYEKSI PENDAPATAN & BIAYA
KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASAR
DISTRIBUTED SCAN AND FEDERATED MODEL
(UMUR PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	6	7	8	9	10	11	12
A. MODAL KERJA							
B. PENDAPATAN							
- Kanwil DJP							
1. Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	9,904,297,263	11,891,099,294	14,276,453,812	17,140,310,447	20,578,656,723	24,706,735,261	29,662,906,354
2. Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo, Maluku	8,691,725,282	10,435,285,374	12,528,603,620	15,041,841,506	18,059,234,912	21,681,917,435	26,031,310,073
3. Kanwil DJP Papua, Maluku	14,231,877,213	17,086,791,782	20,514,402,213	24,629,591,297	29,570,287,311	35,502,086,946	42,623,805,587
	32,827,899,758	39,413,176,449	47,319,459,645	56,811,743,250	68,208,178,945	81,890,739,642	98,318,022,014
C. B I A Y A							
I Biaya Langsung							
a. Perangkat IT	0	0	0	0	0	0	0
b. Pegawai Outsource	4,765,527	5,003,803	5,253,993	5,516,693	5,792,527	6,082,154	6,386,262
c. Biaya Penyusutan	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714
d. Biaya Biaya Repairs, Maintenance dan Supplies	12,780,649	14,697,747	16,902,409	19,437,770	22,353,436	25,706,451	29,562,419
e. Biaya Kemasan / Box SPT	0	0	0	0	0	0	0
f. Biaya Operasional	0	0	0	0	0	0	0
II Biaya Tak Langsung							
a. Karyawan PNS	11,982,194	13,180,413	14,498,455	15,948,300	17,543,130	19,297,443	21,227,188
b. Tunjangan Pengelolaan dan Manajemen	998,516	1,098,368	1,208,205	1,329,025	1,461,928	1,608,120	1,768,932
c. Biaya Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak	0	0	0	0	0	0	0
d. Biaya Telepon, Telegram, Listrik dan Pos	0	0	0	0	0	0	0
e. Biaya sewa kantor & pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0
f. Biaya Lain-lain	44,866	47,110	49,465	51,938	54,535	57,262	60,125
TOTAL BIAYA	33,334,466	36,790,155	40,675,240	45,046,441	49,968,270	55,514,144	61,767,639
D. RUGI / LABA							
- Akumulasi R / L sebelum Pajak	32,794,565,291	39,376,386,295	47,278,784,404	56,766,696,809	68,158,210,675	81,835,225,497	98,256,254,375
- Pajak Pendapatan	0	0	0	0	0	0	0
- Akumulasi R / L setelah Pajak	32,794,565,291	39,376,386,295	47,278,784,404	56,766,696,809	68,158,210,675	81,835,225,497	98,256,254,375
- Akumulasi R / L tanpa penyusutan	32,797,328,005	39,379,149,008	47,281,547,118	56,769,459,523	68,160,973,389	81,837,988,211	98,259,017,089
PERHITUNGAN CASH FLOW							
- Saldo Awal	108,803,389,470	141,600,717,475	180,979,866,484	228,261,413,602	285,030,873,125	353,191,846,514	435,029,834,725
- Investasi	0	0	0	0	0	0	0
- Penyusutan	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714	2,762,714
- Pinjaman	0	0	0	0	0	0	0
- Pembayaran Bunga & Cicilan	0	0	0	0	0	0	0
- Cash in flow	32,797,328,005	39,379,149,008	47,281,547,118	56,769,459,523	68,160,973,389	81,837,988,211	98,259,017,089
- Saldo Akhir	141,600,717,475	180,979,866,484	228,261,413,602	285,030,873,125	353,191,846,514	435,029,834,725	533,288,851,814



Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar

Lampiran 5-1

No	KPP/KANWIL	2008		2009	
		Pusat	Cabang	Pusat	Cabang
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	247,866	6,646	383,955	7,657
1	KPP Pratama Makasar Utara	31,472	1,073	50,931	1,110
2	KPP Pratama Pare-Pare	20,667	248	32,934	263
3	KPP Pratama Palopo	27,719	794	41,848	846
4	KPP Pratama Makasar Barat	32,362	936	42,898	1,041
5	KPP Pratama Makasar Selatan	25,682	1,316	42,710	1,543
6	KPP Pratama Bulukumba	6,417	243	13,343	357
7	KPP Pratama Bantaeng	17,288	922	28,675	1,032
8	KPP Pratama Watampone	19,868	553	29,123	560
9	KPP Pratama Maros	15,876	297	22,701	588
10	KPP Pratama Kendari	16,428	188	24,822	196
11	KPP Pratama Majene	9,635	26	14,743	60
12	KPP Pratama Mamuju	6,994	26	15,789	34
13	KPP Pratama Kolaka	5,217	11	7,239	12
14	KPP Pratama Bau-Bau	12,241	13	16,199	15
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	124,845	6,156	176,768	6,763
1	KPP Pratama Manado	23,903	1,339	37,268	1,476
2	KPP Pratama Gorontalo	17,196	1,292	26,215	1,488
3	KPP Pratama Bitung	13,448	677	24,006	718
4	KPP Pratama Kotamobagu	6,990	209	9,598	260
5	KPP Pratama Tahuna	3,594	68	4,193	73
6	KPP Pratama Palu	26,181	1,284	33,122	1,348
7	KPP Pratama Luwuk	9,203	436	14,307	522
8	KPP Pratama Poso	4,588	123	7,130	142
9	KPP Pratama Toli-Toli	4,459	93	4,914	99
10	KPP Pratama Ternate	12,453	544	12,850	544
11	KPP Pratama Tobelo	2,830	91	3,165	93
C	Kanwil Papua dan Maluku	82,485	4,046	121,408	4,157
1	KPP Pratama Ambon	22,468	1,258	28,376	1,270
2	KPP Pratama Sorong	9,484	1,073	17,416	1,080
3	KPP Pratama Jayapura	14,973	1,215	22,132	1,240
4	KPP Pratama Timika	17,888	145	27,719	171
5	KPP Pratama Biak	3,927	75	8,241	95
6	KPP Pratama Manokwari	7,374	177	8,252	195
7	KPP Pratama Merauke	6,371	103	9,272	106
	Total	455,196	16,848	682,131	18,577
			472,044		700,708

(sumber : Buku Saku Pajak Dalam Angka Tahun 2001-2009, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan: hal 96-97)



LAMPIRAN 6
JUMLAH WAJIB PAJAK MASA PPN
TERDAFTAR

Jumlah Wajib Pajak Masa PPN Terdaftar

No	KPP/KANWIL	2008		2009	
		Pusat	Cabang	Pusat	Cabang
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	48,349	3,214	53,815	3,675
1	KPP Pratama Makasar Utara	5,926	456	6,651	492
2	KPP Pratama Pare-Pare	4,261	279	4,583	384
3	KPP Pratama Palopo	3,838	301	4,293	342
4	KPP Pratama Makasar Barat	6,473	565	6,974	596
5	KPP Pratama Makasar Selatan	6,818	483	7,838	525
6	KPP Pratama Bulukumba	1,866	45	2,224	56
7	KPP Pratama Bantaeng	3,027	80	3,336	90
8	KPP Pratama Watampone	3,081	123	3,527	150
9	KPP Pratama Maros	1,980	94	2,162	99
10	KPP Pratama Kendari	4,715	455	5,217	562
11	KPP Pratama Majene	678	131	679	131
12	KPP Pratama Mamuju	1,768	38	1,941	51
13	KPP Pratama Kolaka	1,525	84	1,735	97
14	KPP Pratama Bau-Bau	2,393	80	2,655	100
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	36,616	2,367	39,642	2,573
1	KPP Pratama Manado	6,071	750	6,517	783
2	KPP Pratama Gorontalo	3,732	298	4,145	339
3	KPP Pratama Bitung	3,949	177	4,207	185
4	KPP Pratama Kotamobagu	2,564	68	2,752	85
5	KPP Pratama Tahuna	955	16	1,010	16
6	KPP Pratama Palu	8,032	503	8,626	541
7	KPP Pratama Luwuk	2,212	98	2,353	111
8	KPP Pratama Poso	2,312	57	2,640	71
9	KPP Pratama Toli-Toli	1,490	31	1,555	32
10	KPP Pratama Ternate	4,284	311	4,692	340
11	KPP Pratama Tobelo	1,015	58	1,145	70
C	Kanwil Papua dan Maluku	34,126	2,337	38,157	2,550
1	KPP Pratama Ambon	10,137	480	10,937	514
2	KPP Pratama Sorong	4,972	551	5,715	592
3	KPP Pratama Jayapura	8,988	532	10,094	570
4	KPP Pratama Timika	3,562	314	3,846	350
5	KPP Pratama Biak	2,677	200	2,998	211
6	KPP Pratama Manokwari	1,921	176	2,470	222
7	KPP Pratama Merauke	1,869	84	2,097	91
	Total	119,091	7,918	131,614	8,798
			127,009		140,412

(sumber data: Buku Saku Pajak dalam Angka tahun 2001-2009, Kementerian Keuangan RI, Ditjen Pajak, Dit Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Tahun 2010 halaman 60-62)



Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2008-2009

Lanjutan Lampiran 7-1

(Miliar Rupiah)

No	KPP/KANWIL	2008	2009
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	1,966,630,000,000	2,294,230,000,000
1	KPP Pratama Makasar Utara	247,380,000,000	330,810,000,000
2	KPP Pratama Pare-Pare	178,980,000,000	151,790,000,000
3	KPP Pratama Palopo	380,330,000,000	333,820,000,000
4	KPP Pratama Makasar Barat	103,980,000,000	239,290,000,000
5	KPP Pratama Makasar Selatan	358,330,000,000	239,290,000,000
6	KPP Pratama Bulukumba	46,970,000,000	76,960,000,000
7	KPP Pratama Bantaeng	57,190,000,000	109,610,000,000
8	KPP Pratama Watampone	72,820,000,000	117,570,000,000
9	KPP Pratama Maros	78,210,000,000	119,330,000,000
10	KPP Pratama Kendari	255,760,000,000	219,790,000,000
11	KPP Pratama Majene	30,910,000,000	56,800,000,000
12	KPP Pratama Mamuju	44,670,000,000	98,060,000,000
13	KPP Pratama Kolaka	54,340,000,000	90,460,000,000
14	KPP Pratama Bau-Bau	56,760,000,000	110,650,000,000
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	1,707,360,000,000	2,013,350,000,000
1	KPP Pratama Manado	652,620,000,000	572,780,000,000
2	KPP Pratama Gorontalo	184,520,000,000	236,190,000,000
3	KPP Pratama Bitung	10,650,000,000	132,490,000,000
4	KPP Pratama Kotamobagu	9,200,000,000	95,890,000,000
5	KPP Pratama Tahuna	8,290,000,000	61,340,000,000
6	KPP Pratama Palu	282,730,000,000	298,160,000,000
7	KPP Pratama Luwuk	141,930,000,000	104,590,000,000
8	KPP Pratama Poso	10,830,000,000	88,150,000,000
9	KPP Pratama Toli-Toli	5,690,000,000	44,990,000,000
10	KPP Pratama Ternate	392,440,000,000	231,730,000,000
11	KPP Pratama Tobelo	8,460,000,000	147,040,000,000
C	Kanwil Papua dan Maluku	3,067,980,000,000	3,296,670,000,000
1	KPP Pratama Ambon	350,350,000,000	412,630,000,000
2	KPP Pratama Sorong	672,870,000,000	466,230,000,000
3	KPP Pratama Jayapura	1,049,740,000,000	1,000,980,000,000
4	KPP Pratama Timika	926,040,000,000	736,250,000,000
5	KPP Pratama Biak	13,940,000,000	148,470,000,000
6	KPP Pratama Manokwari	26,670,000,000	339,290,000,000
7	KPP Pratama Merauke	28,370,000,000	192,820,000,000
	Total	6,741,970,000,000	7,604,250,000,000

(sumber data: Buku Saku Pajak dalam Angka tahun 2001-2009, Kementerian Keuangan RI, Ditjen Pajak, Dit Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Tahun 2010 halaman 60-62)



LAMPIRAN 8
PROYEKSI PENDAPATAN PENERIMAAN PAJAK

**PROYEKSI PENDAPATAN
KANTOR WILAYAH DJP DI LINGKUNGAN KPDDP MAKASAR
(PERANGKAT TIK 12 TAHUN)**

Lanjutan Lampiran 8-1

(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Pertumbuhan Penerimaan								
A. Pajak	20.06%	20.06%	20.06%	20.06%	20.06%	20.06%	20.06%	20.06%
B. Kanwil								
- Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	2,294,230,000	2,754,452,538	3,306,995,717	3,970,379,058	4,766,837,097	5,723,064,619	6,871,111,381	8,249,456,324
- Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo	2,013,350,000	2,417,228,010	2,902,123,949	3,484,290,013	4,183,238,590	5,022,396,251	6,029,888,938	7,239,484,660
- Kanwil DJP Papua, Maluku	3,296,670,000	3,957,982,002	4,751,953,192	5,705,195,002	6,849,657,119	8,223,698,337	9,873,372,224	11,853,970,692
JUMLAH	7,604,250,000	9,129,662,550	10,961,072,858	13,159,864,073	15,799,732,806	18,969,159,207	22,774,372,543	27,342,911,676
TOTAL	7,604,250,000	9,129,662,550	10,961,072,858	13,159,864,073	15,799,732,806	18,969,159,207	22,774,372,543	27,342,911,676

PROYEKSI PENDAPATAN **Lanjutan Lampiran 8-2**
KANTOR WILAYAH DJP DI LINGKUNGAN KPDDP MAKASAR
(PERANGKAT TIK 12 TAHUN)

(Dalam Ribuan)

TAHUN KE :	9	10	11	12	13	14
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pertumbuhan Penerimaan						
A. Pajak	20.06%	20.06%	20.06%	20.06%	20.06%	20.06%
B. Kanwil						
- Kanwil DJP Sulsel, Sulbar, Sultra	9,904,297,263	11,891,099,294	14,276,453,812	17,140,310,447	20,578,656,723	24,706,735,261
- Kanwil DJP Sulut, Sulteng, Gorontalo	8,691,725,282	10,435,285,374	12,528,603,620	15,041,841,506	18,059,234,912	21,681,917,435
- Kanwil DJP Papua, Maluku	14,231,877,213	17,086,791,782	20,514,402,213	24,629,591,297	29,570,287,311	35,502,086,946
JUMLAH	32,827,899,758	39,413,176,449	47,319,459,645	56,811,743,250	68,208,178,945	81,890,739,642
TOTAL	32,827,899,758	39,413,176,449	47,319,459,645	56,811,743,250	68,208,178,945	81,890,739,642



Lanjutan Lampiran 9-1

Biaya Pengambilan kemasan dengan Jasa PT.JNE

62.50%

62.5%

No	KPP/KANWIL	WP OP Terdaftar		WP Badan Terdaftar		WP OP Sampaikan SPT	
		Tahun 2009		Tahun 2009		Tahun 2009	
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	383,955	7,657	53,815	3,675	239,972	4,786
1	KPP Pratama Makasar Utara	50,931	1,110	6,651	492	31,832	694
2	KPP Pratama Pare-Pare	32,934	263	4,583	384	20,584	164
3	KPP Pratama Palopo	41,848	846	4,293	342	26,155	529
4	KPP Pratama Makasar Barat	42,898	1,041	6,974	596	26,811	651
5	KPP Pratama Makasar Selatan	42,710	1,543	7,838	525	26,694	964
6	KPP Pratama Bulukumba	13,343	357	2,224	56	8,339	223
7	KPP Pratama Bantaeng	28,675	1,032	3,336	90	17,922	645
8	KPP Pratama Watampone	29,123	560	3,527	150	18,202	350
9	KPP Pratama Maros	22,701	588	2,162	99	14,188	368
10	KPP Pratama Kendari	24,822	196	5,217	562	15,514	123
11	KPP Pratama Majene	14,743	60	679	131	9,214	38
12	KPP Pratama Mamuju	15,789	34	1,941	51	9,868	21
13	KPP Pratama Kolaka	7,239	12	1,735	97	4,524	8
14	KPP Pratama Bau-Bau	16,199	15	2,655	100	10,124	9
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	176,768	6,763	39,642	2,573	110,480	4,227
1	KPP Pratama Manado	37,268	1,476	6,517	783	23,293	923
2	KPP Pratama Gorontalo	26,215	1,488	4,145	339	16,384	930
3	KPP Pratama Bitung	24,006	718	4,207	185	15,004	449
4	KPP Pratama Kotamobagu	9,598	260	2,752	85	5,999	163
5	KPP Pratama Tahuna	4,193	73	1,010	16	2,621	46
6	KPP Pratama Palu	33,122	1,348	8,626	541	20,701	843
7	KPP Pratama Luwuk	14,307	522	2,353	111	8,942	326
8	KPP Pratama Poso	7,130	142	2,640	71	4,456	89
9	KPP Pratama Toli-Toli	4,914	99	1,555	32	3,071	62
10	KPP Pratama Ternate	12,850	544	4,692	340	8,031	340
11	KPP Pratama Tobelo	3,165	93	1,145	70	1,978	58
C	Kanwil Papua dan Maluku	121,408	4,157	38,157	2,550	75,880	2,598
1	KPP Pratama Ambon	28,376	1,270	10,937	514	17,735	794
2	KPP Pratama Sorong	17,416	1,080	5,715	592	10,885	675
3	KPP Pratama Jayapura	22,132	1,240	10,094	570	13,833	775
4	KPP Pratama Timika	27,719	171	3,846	350	17,324	107
5	KPP Pratama Biak	8,241	95	2,998	211	5,151	59
6	KPP Pratama Manokwari	8,252	195	2,470	222	5,158	122
7	KPP Pratama Merauke	9,272	106	2,097	91	5,795	66
	Total	682,131	18,577	131,614	8,798	426,332	11,611

Lanjutan Lampiran 9-2

Biaya Pengambilan kemasan dengan Jasa PT.

No	KPP/KANWIL	45%		30%	
		WP Badan Sampaikan SPT		WP OP Sampaikan SPT	
		Tahun 2009		Tahun 2010	
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	24,217	1,654	311,963	6,221
1	KPP Pratama Makasar Utara	2,993	221	41,381	902
2	KPP Pratama Pare-Pare	2,062	173	26,759	214
3	KPP Pratama Palopo	1,932	154	34,002	687
4	KPP Pratama Makasar Barat	3,138	268	34,855	846
5	KPP Pratama Makasar Selatan	3,527	236	34,702	1,254
6	KPP Pratama Bulukumba	1,001	25	10,841	290
7	KPP Pratama Bantaeng	1,501	41	23,298	839
8	KPP Pratama Watampone	1,587	68	23,662	455
9	KPP Pratama Maros	973	45	18,445	478
10	KPP Pratama Kendari	2,348	253	20,168	159
11	KPP Pratama Majene	306	59	11,979	49
12	KPP Pratama Mamuju	873	23	12,829	28
13	KPP Pratama Kolaka	781	44	5,882	10
14	KPP Pratama Bau-Bau	1,195	45	13,162	12
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	17,839	1,158	143,624	5,495
1	KPP Pratama Manado	2,933	352	30,280	1,199
2	KPP Pratama Gorontalo	1,865	153	21,300	1,209
3	KPP Pratama Bitung	1,893	83	19,505	583
4	KPP Pratama Kotamobagu	1,238	38	7,798	211
5	KPP Pratama Tahuna	455	7	3,407	59
6	KPP Pratama Palu	3,882	243	26,912	1,095
7	KPP Pratama Luwuk	1,059	50	11,624	424
8	KPP Pratama Poso	1,188	32	5,793	115
9	KPP Pratama Toli-Toli	700	14	3,993	80
10	KPP Pratama Ternate	2,111	153	10,441	442
11	KPP Pratama Tobelo	515	32	2,572	76
C	Kanwil Papua dan Maluku	17,171	1,148	98,644	3,378
1	KPP Pratama Ambon	4,922	231	23,056	1,032
2	KPP Pratama Sorong	2,572	266	14,151	878
3	KPP Pratama Jayapura	4,542	257	17,982	1,008
4	KPP Pratama Timika	1,731	158	22,522	139
5	KPP Pratama Biak	1,349	95	6,696	77
6	KPP Pratama Manokwari	1,112	100	6,705	158
7	KPP Pratama Merauke	944	41	7,534	86
	Total	59,226	3,959	554,231	15,094

Lanjutan Lampiran 9-3

Biaya Pengambilan kemasan dengan Jasa PT.

No	KPP/KANWIL	30%		30%	
		WP Badan Sampaikan SPT		WP OP Sampaikan SPT	
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2010	Tahun 2011
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	31,482	2,150	405,552	8,088
1	KPP Pratama Makasar Utara	3,891	288	53,796	1,172
2	KPP Pratama Pare-Pare	2,681	225	34,787	278
3	KPP Pratama Palopo	2,511	200	44,202	894
4	KPP Pratama Makasar Barat	4,080	349	45,311	1,100
5	KPP Pratama Makasar Selatan	4,585	307	45,112	1,630
6	KPP Pratama Bulukumba	1,301	33	14,094	377
7	KPP Pratama Bantaeng	1,952	53	30,288	1,090
8	KPP Pratama Watampone	2,063	88	30,761	592
9	KPP Pratama Maros	1,265	58	23,978	621
10	KPP Pratama Kendari	3,052	329	26,218	207
11	KPP Pratama Majene	397	77	15,572	63
12	KPP Pratama Mamuju	1,135	30	16,677	36
13	KPP Pratama Kolaka	1,015	57	7,646	13
14	KPP Pratama Bau-Bau	1,553	59	17,110	16
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	23,191	1,505	186,711	7,143
1	KPP Pratama Manado	3,812	458	39,364	1,559
2	KPP Pratama Gorontalo	2,425	198	27,690	1,572
3	KPP Pratama Bitung	2,461	108	25,356	758
4	KPP Pratama Kotamobagu	1,610	50	10,138	275
5	KPP Pratama Tahuna	591	9	4,429	77
6	KPP Pratama Palu	5,046	316	34,985	1,424
7	KPP Pratama Luwuk	1,377	65	15,112	551
8	KPP Pratama Poso	1,544	42	7,531	150
9	KPP Pratama Toli-Toli	910	19	5,190	105
10	KPP Pratama Ternate	2,745	199	13,573	575
11	KPP Pratama Tobelo	670	41	3,343	98
C	Kanwil Papua dan Maluku	22,322	1,492	128,237	4,391
1	KPP Pratama Ambon	6,398	301	29,972	1,341
2	KPP Pratama Sorong	3,343	346	18,396	1,141
3	KPP Pratama Jayapura	5,905	333	23,377	1,310
4	KPP Pratama Timika	2,250	205	29,278	181
5	KPP Pratama Biak	1,754	123	8,705	100
6	KPP Pratama Manokwari	1,445	130	8,716	206
7	KPP Pratama Merauke	1,227	53	9,794	112
	Total	76,994	5,147	720,501	19,622

Lanjutan Lampiran 9-4

Biaya Pengambilan kemasan dengan Jasa PT.

No	KPP/KANWIL	30%		5.33		Total
		WP Badan Sampaikan SPT		WP OP Sampaikan SPT (Lembar)		
		Tahun 2011		Tahun 2011		
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	40,926	2,795	2,161,595	43,107	2,204,702
1	KPP Pratama Makasar Utara	5,058	374	286,732	6,249	292,981
2	KPP Pratama Pare-Pare	3,485	292	185,412	1,481	186,893
3	KPP Pratama Palopo	3,265	260	235,596	4,763	240,359
4	KPP Pratama Makasar Barat	5,304	453	241,508	5,861	247,368
5	KPP Pratama Makasar Selatan	5,961	399	240,449	8,687	249,136
6	KPP Pratama Bulukumba	1,691	43	75,119	2,010	77,128
7	KPP Pratama Bantaeng	2,537	68	161,435	5,810	167,245
8	KPP Pratama Watampone	2,682	114	163,957	3,153	167,110
9	KPP Pratama Maros	1,644	75	127,802	3,310	131,113
10	KPP Pratama Kendari	3,968	427	139,743	1,103	140,847
11	KPP Pratama Majene	516	100	83,000	338	83,338
12	KPP Pratama Mamuju	1,476	39	88,889	191	89,081
13	KPP Pratama Kolaka	1,319	74	40,754	68	40,822
14	KPP Pratama Bau-Bau	2,019	76	91,197	84	91,282
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	30,148	1,957	995,171	38,074	1,033,245
1	KPP Pratama Manado	4,956	595	209,812	8,310	218,121
2	KPP Pratama Gorontalo	3,152	258	147,586	8,377	155,963
3	KPP Pratama Bitung	3,199	141	135,149	4,042	139,191
4	KPP Pratama Kotamobagu	2,093	65	54,035	1,464	55,499
5	KPP Pratama Tahuna	768	12	23,606	411	24,017
6	KPP Pratama Palu	6,560	411	186,471	7,589	194,060
7	KPP Pratama Luwuk	1,789	84	80,546	2,939	83,484
8	KPP Pratama Poso	2,008	54	40,141	799	40,940
9	KPP Pratama Toli-Toli	1,183	24	27,665	557	28,222
10	KPP Pratama Ternate	3,568	259	72,343	3,063	75,406
11	KPP Pratama Tobelo	871	53	17,818	524	18,342
C	Kanwil Papua dan Maluku	29,018	1,939	683,504	23,403	706,907
1	KPP Pratama Ambon	8,318	391	159,752	7,150	166,901
2	KPP Pratama Sorong	4,346	450	98,049	6,080	104,129
3	KPP Pratama Jayapura	7,676	433	124,599	6,981	131,580
4	KPP Pratama Timika	2,925	266	156,053	963	157,015
5	KPP Pratama Biak	2,280	160	46,395	535	46,930
6	KPP Pratama Manokwari	1,878	169	46,457	1,098	47,555
7	KPP Pratama Merauke	1,595	69	52,200	597	52,796
	Total	100,092	6,691	3,840,270	104,585	3,944,855

Biaya Pengambilan kemasan dengan Jasa PT.

7

7

No	KPP/KANWIL	WP Badan Sampaikan SPT(Lembar)		Total	Grand TOTAL
		Tahun 2011			
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	286,484	19,564	306,048	2,510,750
1	KPP Pratama Makasar Utara	35,407	2,619	38,026	331,007
2	KPP Pratama Pare-Pare	24,398	2,044	26,442	213,335
3	KPP Pratama Palopo	22,854	1,821	24,674	265,034
4	KPP Pratama Makasar Barat	37,126	3,173	40,299	287,667
5	KPP Pratama Makasar Selatan	41,726	2,795	44,520	293,657
6	KPP Pratama Bulukumba	11,839	298	12,138	89,266
7	KPP Pratama Bantaeng	17,759	479	18,238	185,483
8	KPP Pratama Watampone	18,776	799	19,575	186,684
9	KPP Pratama Maros	11,509	527	12,036	143,149
10	KPP Pratama Kendari	27,773	2,992	30,765	171,611
11	KPP Pratama Majene	3,615	697	4,312	87,650
12	KPP Pratama Mamuju	10,333	271	10,604	99,685
13	KPP Pratama Kolaka	9,236	516	9,753	50,574
14	KPP Pratama Bau-Bau	14,134	532	14,666	105,948
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	211,034	13,697	224,732	1,257,977
1	KPP Pratama Manado	34,693	4,168	38,862	256,983
2	KPP Pratama Gorontalo	22,066	1,805	23,871	179,833
3	KPP Pratama Bitung	22,396	985	23,381	162,572
4	KPP Pratama Kotamobagu	14,650	452	15,103	70,601
5	KPP Pratama Tahuna	5,377	85	5,462	29,479
6	KPP Pratama Palu	45,921	2,880	48,801	242,860
7	KPP Pratama Luwuk	12,526	591	13,117	96,602
8	KPP Pratama Poso	14,054	378	14,432	55,372
9	KPP Pratama Toli-Toli	8,278	170	8,448	36,671
10	KPP Pratama Ternate	24,978	1,810	26,788	102,194
11	KPP Pratama Tobelo	6,095	373	6,468	24,810
C	Kanwil Papua dan Maluku	203,129	13,575	216,704	923,611
1	KPP Pratama Ambon	58,223	2,736	60,959	227,861
2	KPP Pratama Sorong	30,424	3,152	33,575	137,704
3	KPP Pratama Jayapura	53,735	3,034	56,770	188,350
4	KPP Pratama Timika	20,474	1,863	22,337	179,353
5	KPP Pratama Biak	15,960	1,123	17,083	64,013
6	KPP Pratama Manokwari	13,149	1,182	14,331	61,886
7	KPP Pratama Merauke	11,163	484	11,648	64,444
	Total	700,647	46,836	747,483	4,692,338

Biaya Pengambilan kemasan dengan Jasa PT.

3,000

No	KPP/KANWIL	Kemasan	JNE			REG
			CTCREG	CTCOKE	SS(super speed)	
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra	837				
1	KPP Pratama Makasar Utara	110	x	x	x	x
2	KPP Pratama Pare-Pare	71	250,000	170,000		
3	KPP Pratama Palopo	88	250,000	170,000		
4	KPP Pratama Makasar Barat	96	x	x	x	x
5	KPP Pratama Makasar Selatan	98	x	x	x	x
6	KPP Pratama Bulukumba	30	250,000	170,000		50,000
7	KPP Pratama Bantaeng	62	250,000	170,000		50,000
8	KPP Pratama Watampone	62		170,000		250,000
9	KPP Pratama Maros	48	200,000	120,000		50,000
10	KPP Pratama Kendari	57			592,000	280,000
11	KPP Pratama Majene	29				300,000
12	KPP Pratama Mamuju	33				300,000
13	KPP Pratama Kolaka	17				640,000
14	KPP Pratama Bau-Bau	35				440,000
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut	419				
1	KPP Pratama Manado	86			687,000	360,000
2	KPP Pratama Gorontalo	60			687,000	300,000
3	KPP Pratama Bitung	54				680,000
4	KPP Pratama Kotamobagu	24				890,000
5	KPP Pratama Tahuna	10				990,000
6	KPP Pratama Palu	81			687,000	300,000
7	KPP Pratama Luwuk	32				610,000
8	KPP Pratama Poso	18				570,000
9	KPP Pratama Toli-Toli	12				570,000
10	KPP Pratama Ternate	34				500,000
11	KPP Pratama Tobelo	8				2,550,000
C	Kanwil Papua dan Maluku	308				
1	KPP Pratama Ambon	76			901,000	500,000
2	KPP Pratama Sorong	46				1,040,000
3	KPP Pratama Jayapura	63			1,186,000	660,000
4	KPP Pratama Timika	60				1,240,000
5	KPP Pratama Biak	21				1,060,000
6	KPP Pratama Manokwari	21				2,500,000
7	KPP Pratama Merauke	21				1,640,000
	Total	1,564				

Lanjutan Lampiran 9-7

Biaya Pengambilan kemasan dengan Jasa PT.

1 kemasan = 3000 lembar = 20 Kg

No	KPP/KANWIL	JNE		Total Biaya Kurir
		YES(Yakin Esok Sampai)	OKE	
A	Kanwil Sulsel, Sulbar, Sultra			
1	KPP Pratama Makasar Utara	x	x	-
2	KPP Pratama Pare-Pare			12,088,967
3	KPP Pratama Palopo			15,018,573
4	KPP Pratama Makasar Barat	x	x	-
5	KPP Pratama Makasar Selatan	x	x	-
6	KPP Pratama Bulukumba			1,487,767
7	KPP Pratama Bantaeng			3,091,386
8	KPP Pratama Watampone			15,557,019
9	KPP Pratama Maros			2,385,819
10	KPP Pratama Kendari	360,000	270,000	16,017,041
11	KPP Pratama Majene			8,765,015
12	KPP Pratama Mamuju			9,968,494
13	KPP Pratama Kolaka		560,000	10,789,210
14	KPP Pratama Bau-Bau		360,000	15,539,043
B	Kanwil Sulut, Sulteng, Gor, Malut			-
1	KPP Pratama Manado		300,000	30,837,961
2	KPP Pratama Gorontalo		300,000	17,983,327
3	KPP Pratama Bitung		600,000	36,849,720
4	KPP Pratama Kotamobagu		810,000	20,945,100
5	KPP Pratama Tahuna		910,000	9,727,968
6	KPP Pratama Palu		300,000	24,286,016
7	KPP Pratama Luwuk		530,000	19,642,324
8	KPP Pratama Poso		490,000	10,520,681
9	KPP Pratama Toli-Toli		490,000	6,967,422
10	KPP Pratama Ternate		520,000	17,032,260
11	KPP Pratama Tobelo		2,470,000	21,088,484
C	Kanwil Papua dan Maluku			-
1	KPP Pratama Ambon		420,000	37,976,803
2	KPP Pratama Sorong		1,260,000	47,737,500
3	KPP Pratama Jayapura		720,000	41,436,952
4	KPP Pratama Timika		1,160,000	74,132,522
5	KPP Pratama Biak		990,000	22,618,007
6	KPP Pratama Manokwari		2,420,000	51,571,573
7	KPP Pratama Merauke		1,560,000	35,229,496
	Total			637,292,452

Deskripsi	Nilai
Jumlah Kemasan	1,564
Harga Per Kemasan	27500
Total Biaya Kemasan	43,013,098